

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

PERATURAN BUPATI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4 Tujuan	I-5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-6

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA)	
TAHUN BERKENAAN	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah	
	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	
	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
	II-4
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	
	II-7
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	
	II-19
2.3 Evaluasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2017	
	II-20
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD	
	II-24
2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah	
	II-145
BAB III ARAH EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	
	III-1

3.1.1	Sasaran Ekonomi Makro Nasional	III-1
3.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur	III-5
3.1.3	Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Gresik	III-8
3.1.4	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Gresik	III-3
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-13
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		
4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2	Priorita dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)	IV-13
4.2.1	Prioritas Pembangunan Tematik	IV-13
4.2.2	Prioritas Program Pembangunan	IV-15
4.2.3	Prioritas Output Kunci	IV-22
4.2.4	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2019	IV-25
4.2.5	Penelaahan Pokok Pokok Pikiran DPRD	IV-27
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		
		V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		
		VI-1
BAB VII PENUTUP		
		VI-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rencana Zonasi Pada Sentra dan Sub Sentra Kawasan Agropolitan	II-8
Tabel 2.2 Lokasi Pengembangan Berdasarkan Komoditas	II-8
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk	II-10
Tabel 2.4 Jumlah Keluarga	II-11

Tabel 2.6	Kelompok Umur	II-12
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan	II-12
Tabel 2.8	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-13
Tabel 2.9	Urusan Pendidikan	II-16
Tabel 2.10	Urusan Kesehatan	II-16
Tabel 2.11	Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	II-17
Tabel 2.12	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-17
Tabel 2.13	Urusan Ketentraman., Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	II-18
Tabel 2.14	Urusan Sosial	II-18
Tabel 2.15	Urusan Kesehatan	II-19
Tabel 2.16	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-19
Tabel 2.17	Urusan Pangan	II-20
Tabel 2.18	Urusan Keluarga Berencana	II-20
Tabel 2.19	Urusan Lingkungan Hidup	II-20
Tabel 2.20	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	II-21
Tabel 2.21	Urusan Pemberdayaan Masyarakat	II-22
Tabel 2.22	Urusan Perhubungan	II-22
Tabel 2.23	Urusan Komunikasi dan Informatika	II-22
Tabel 2.24	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro	II-23

Tabel 2.25 Urusan Modal dan Pertanahan	II-23
Tabel 2.26 Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-23
Tabel 2.27 Urusan Kebudayaan	II-24
Tabel 2.28 Urusan Kelautan dan Perikanan	II-24
Tabel 2.29 Urusan Pariwisata	II-25
Tabel 2.30 Urusan Perdagangan	II-25
Tabel 2.31 Urusan Perindustrian	II-26
Tabel 2.32 Urusan Perencanaan	II-26
Tabel 2.33 Urusan Pengawasan	II-27
Tabel 2.34 Urusan Sekretariat Daerah	II-27
Tabel 2.35 Urusan Kepegawaian	II-28
Tabel 2.36 Urusan Keuangan	II-28
Tabel 2.37 Aspek Daya Saing Daerah	II-28
Tabel 2.38 Capaian Indikator Tujuan	II-30
Tabel 2.39 Capaian Sasaran	II-31
Tabel 2.40 Evaluasi Hasil Program	II-35
Tabel 2.41 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan	II-78
Tabel 2.42 Kebijakan atau Tindakan	II-155
Tabel 2.43 Identifikasi Permasalahan	II-156

Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran	IV-9
Tabel 4.2 Prioritas Program Pembangunan	IV-15
Tabel 4.3 Prioritas Kegiatan	IV-22
Tabel 4.4 Sasaran Pembangunan	IV-26
Tabel 5.1 Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019	V-2
Tabel 5.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2019	V-4
Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama	VI-2
Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VI-3

DAFTAR ISI
PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Nomor Urut	Daftar Organisasi Perangkat Daerah
1	DINAS PENDIDIKAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RSUD IBNU SINA
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	DINAS SOSIAL
9	DINAS TENAGA KERJA
10	DINAS PERTANAHAN
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
15	DINAS PERHUBUNGAN
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
21	DINAS PERIKANAN
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
23	DINAS PERTANIAN
24	INSPEKTORAT
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
26	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
28	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
29	BAGIAN HUKUM
30	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
31	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
32	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
33	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
34	BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
35	BAGIAN UMUM
36	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
37	BAGIAN KEUANGAN

Nomor Urut	Daftar Organisasi Perangkat Daerah
38	SEKRETARIAT DPRD
39	KECAMATAN GRESIK
40	KECAMATAN KEBOMAS
41	KECAMATAN MANYAR
42	KECAMATAN CERME
43	KECAMATAN BENJENG
44	KECAMATAN BALONG PANGGANG
45	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN
46	KECAMATAN DRIYOREJO
47	KECAMATAN WRINGINANOM
48	KECAMATAN KEDAMEAN
49	KECAMATAN MENGANTI
50	KECAMATAN SIDAYU
51	KECAMATAN UJUNG PANGKAH
52	KECAMATAN PANCENG
53	KECAMATAN BUNGAH
54	KECAMATAN DUKUN
55	KECAMATAN SANGKAPURA
56	KECAMATAN TAMBAK
57	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : JULI 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 merupakan penjabaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik 2016-2021 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKPD Tahun 2019 merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Bupati Gresik.

Penyusunan RKPD tahun 2019 dengan prinsip money follows program melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, Politis, bottom-up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

1.2 **Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021.

1.3 **Hubungan Antar Dokumen**

Secara substansial, penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 berpedoman kepada :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Tahun 2019;
2. RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;
4. Keselarasan terhadap kebijakan tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;

Selain keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, RKPD Kabupaten Gresik memperhatikan terhadap kebijakan pemerintah, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, nasional, regional, hingga global antara lain Sustainable Development goal's (SDG's), Masyarakat Ekonomi Asean, Pembangunan Responsif Perubahan Iklim, Pengarustamaan Gender, Pro Poor Planning Budgeting and Monitoring, dan pelbagai isu strategis lainnya.

1.4 Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2019 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik. RKPD tahun 2019 digunakan sebagai landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat kabupaten, pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa.

Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2019 untuk menjabarkan pokok-pokok pikiran dokumen perencanaan pembangunan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, regional, nasional hingga global serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat Kabupaten, pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa. Sedangkan tujuan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan kepastian kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019 sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dan jangka panjang dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

- b. Merumuskan rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2019 dengan gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah;
- c. Merumuskan Program prioritas pembangunan daerah dengan memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan;
- d. Merumuskan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan
- e. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019;
- f. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);

1.5 **Sistematika Dokumen RKPD**

Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Gresik Mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana berikut :

BAB I_PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II_GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.	
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	
2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	
BAB III_KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	
BAB IV_SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019	
BAB V_RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
BAB VI_KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
BAB VII_PENUTUP	

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

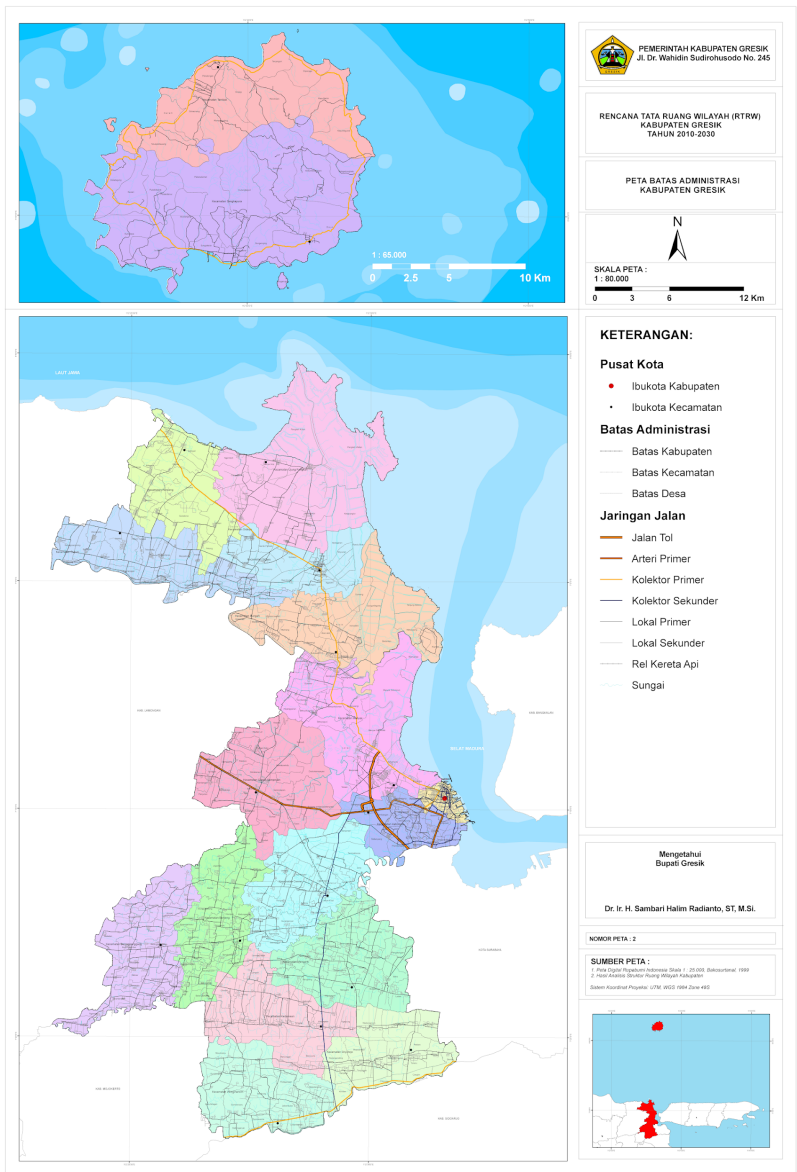
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean.

Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Peta administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan).

Berikut ini gambar yang menunjukkan posisi strategis Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur:



Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Gambar 2.2
Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur

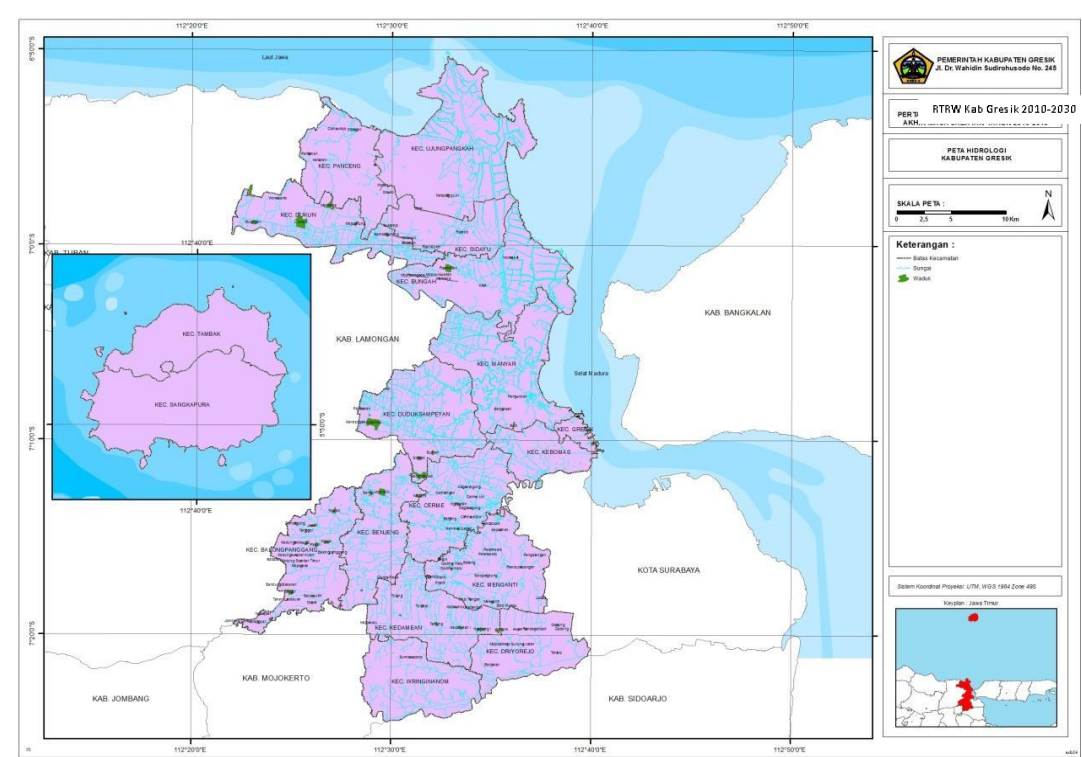
Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Gresik tergabung dalam Kawasan Andalan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya –Sidoarjo – Lamongan) dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya.

Berdasarkan kondosi **topografis**, pada umumnya Ketinggian tempat di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong.Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Wilayah dengan ketinggian 0 –10 mdpl seluas 92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.

pemukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan.

Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.



Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Gambar 2.4
Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik

Secara **Klimatologi**, seperti halnya kondisi Jawa Timur lainnya, di wilayah Kabupaten Gresik mempunyai kondisi iklim yang hampir sama. Iklim Kabupaten Gresik termasuk tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun.

Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84% terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar

antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan. Iklim daerah Kabupaten Gresik dibedakan menjadi :

- a. musim kering terjadi pada bulan Juni sampai dengan Bulan September;
- b. musim penghujan basah terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret;
- c. musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November; dan
- d. musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

Adapun secara **Penggunaan Lahan**, Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

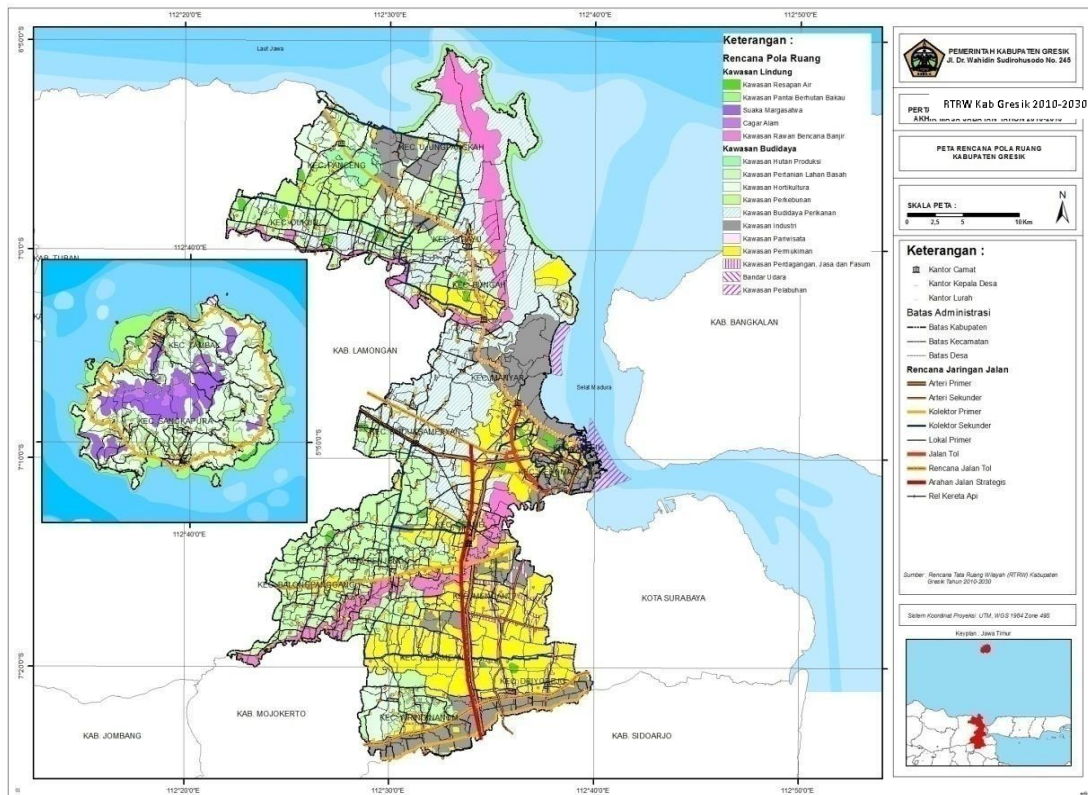
a. Kawasan Lindung

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir 9.426,12 hektar;
2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5.828,62 hektar;
3. Kawasan Terumbu Karang 5.387,00 hektar;
4. Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3.831,60 hektar;
5. Kawasan Resapan Air 1.252,58 hektar;
6. Kawasan Cagar Alam 725,00 hektar;

b. Kawasan Budidaya

1. Kawasan Permukiman 26.06,55 hektar;
2. Kawasan Pertanian Lahan Basah 23.372,70 hektar;
3. Kawasan Perikanan Budidaya 21.678,36 hektar;
4. Kawasan Hortikultura 16.885,48 hektar;
5. Kawasan Industri 12.448,03 hektar;
6. Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum 6.644,01 hektar;
7. Kawasan Perkebunan 2.573,67 hektar;
8. Kawasan Hutan Produksi 1.017,00 hektar;
9. Kawasan Pertambangan 817,25 hektar;
10. Kawasan Pariwisata 82,85 hektar;
11. Kawasan Bandar Udara 68,44 hektar;
12. Kawasan Pelabuhan 1.257,69 hektar;

Peta rencana pola ruang Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber data : RTRW Kab. Gresik Tahun 2010- 2030

Gambar 2.5
Peta Rencana Pola Ruang Daratan Kabupaten Gresik 2030

Rencana struktur ruang kawasan Agropolitan Kabupaten Gresik terbagi menjadi pusat (agropolitan center), sub pusat (agropolitan district) dan sub sub pusat (agropolitan hinterland) yang berfungsi sebagai berlangsungnya setiap tahapan yang ada pada sektor agropolitan. Penetapan struktur ruang kawasan agropolitan Kabupaten Gresik memiliki tujuan untuk mengembangkan komoditas unggulan. Penetapan dan rencana struktur ruang kawasan Agropolitan Kabupaten Gresik ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut.

1. Saranan prasarana kawasan Agropolitan yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan.
2. Adanya keterkaitan atau hubungan antara kota dengan desa.
3. Kegiatan yang mendominasi di suatu kecamatan serta guna lahan yang mendominasi di setiap wilayah.

Adapun Konsep pengembangan zonasi kawasan agropolitan Kabupaten Gresik terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Konsep zonasi pengembangan kawasan tanaman pangan yaitu padi sawah
2. Konsep zonasi pengembangan kawasan peternakan yaitu itik

Rencana zonasi pada kawasan agropolitan adalah arahan pengembangan penggunaan lahan peruntukan berdasarkan pada fungsi kegiatan yang diarahkan pada masing-masing lahan sebagai kawasan agropolitan yang ditinjau dari persebaran sarana penunjang agropolitan, ketersediaan lahan, kecenderungan persebaran wilayah komoditas dan industri pengolahan serta arahan guna lahan kawasan agropolitan.

Tabel 2.1
Rencana Zonasi Pada Sentra Dan Sub Sentra Kawasan Agropolitan

Kecamatan	Fungsi	Arahan
Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Benjeng	Kawasan pendukung sentra komoditi agropolitan	Digunakan mengolah hasil dari komoditi
Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Sidayu dan Kecamatan Bungah.	Produksi budidaya pertanian/peternakan dan pusat pembibitan	Digunakan untuk penyediaan bibit petani/peternak serta pusat pelatihan terhadap petani/peternak
Kecamatan Gresik	Pemasaran, Pengumpul dan Pusat Industri	Menjadi tempat pasar besar dimana hasil olahan maupun barang mentah dijual serta Pengolahan untuk industri

Zonasi kawasan agropolitan merupakan blok-blok peruntukan untuk arahan pengembangan penggunaan lahan yang berdasarkan pada fungsi kegiatan dan ditinjau dari ketersediaan lahan, kecenderungan persebaran wilayah komoditas, industri pengolahan, dan sarana penunjang pertanian. Komoditas agropolitan unggulan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gresik adalah komoditas Padi Sawah dan Komoditas Itik. Berikut akan dicantumkan lokasi untuk pengembangan komoditas unggulan Kabupaten Gresik.

Tabel 2.2
Lokasi Pengembangan Berdasarkan Masing-masing Komoditas di Kabupaten Gresik

Jenis Komoditas Unggulan	Pembudidayaan	Pengolahan Hasil Komoditas
Padi Sawah	Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Sidayu	Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Benjeng
Itik	Kecamatan Bungah	Kecamatan Ujung pangkah

Kecamatan Bungah dipilih sebagai zona pembudidayaan komoditas itik dikarenakan kecamatan Bungah merupakan produsen itik terbanyak di

Kabupaten Gresik, sementara Kecamatan Benjeng dipilih sebagai zona pengolahan hasil komoditas padi sawah karena Kecamatan Benjeng memiliki industri pengolahan tepung terigu.

Sesuai dengan kebijakan yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik telah dicantumkan bahwasannya kawasan minapolitan direncanakan pada Kecamatan Bungah, Sidayu dan Dukun serta kawasan hinterlannya. Dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan secara terintegrasi maka pengembangan yang direncanakan adalah :

1. Penetapan pusat minapolitan yang berfungsi sebagai :
 - Pusat perdagangan dan transportasi perikanan (*aquacultural trade/transport center*).
 - Penyedia jasa pendukung perikanan (*aquacultural support services*).
 - Pasar konsumen produk non-perikanan (*non aquacultural consumers market*).
 - Pusat industri perikanan (*aqua based industry*).
 - Penyedia pekerjaan non perikanan (*non-aquacultural employment*).
 - Pusat minapolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/Kabupaten).

Pusat minapolitan/minapolis ini diarahkan di ibukota Kecamatan Sidayu. Hal ini karena lokasi Kota Sidayu yang strategis dan kelengkapan fasilitas pendukung perkotaan yang lebih memadai,

2. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai :
 - Pusat produksi perikanan (*aquacultural production*).
 - Intensifikasi perikanan (*aquacultural intensification*).
 - Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang- barang dan jasa non-perikanan (*rural income and demand for non-aquacultural goods and services*).
 - Produksi ikan siap jual dan diversifikasi perikanan (*cash fish production and aquacultural diversification*).

Kawasan ini diarahkan pada kawasan hinterland seperti kecamatan Dukun, Bungah, Ujungpangkah dan Panceng. Disetiap kecamatan juga direncanakan penyediaan pangkalan pendaratan ikan budidaya maupun tangkap.

2.1.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2017 sebanyak 1.313.826 jiwa yang terdiri dari 661.145 laki-laki dan 652.681 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2017 sebesar 1.103 jiwa/Km2. Sedangkan angka rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2017 sebesar 1:1,01. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik
Tahun 2016-2017

No	Kecamatan	2016			2017		
		L	P	Total	L	P	Total
1	DUKUN	34.181	33.563	67.744	33.884	33.480	67.364
2	BALONGPANGGANG	29.050	29.193	58.243	29.281	29.397	58.678
3	PANCENG	26.495	26.024	52.519	26.330	26.062	52.392
4	BENJENG	33.207	33.059	66.266	33.515	33.271	66.786
5	DUDUKSAMPEYAN	25.440	25.419	50.859	25.118	25.114	50.232
6	WRINGINANOM	36.674	36.170	72.844	36.690	36.204	72.894
7	UJUNGPAKKAH	25.771	25.465	51.236	25.808	25.550	51.358
8	KEDAMEAN	31.698	31.332	63.030	31.823	31.426	63.249
9	SIDAYU	22.074	21.773	43.847	22.021	21.761	43.782
10	MANYAR	57.314	55.548	112.862	57.660	56.008	113.608
11	CERME	39.263	39.070	78.333	39.468	39.256	78.724
12	BUNGAH	33.877	33.299	67.176	34.139	33.581	67.720
13	MENGANTI	61.749	60.499	122.248	62.746	61.386	124.132
14	KEBOMAS	53.316	52.340	105.656	54.299	53.306	107.605
15	DRIYOREJO	52.403	51.492	103.895	53.118	52.182	105.300
16	GRESIK	43.068	43.349	86.417	41.276	41.664	82.940
17	SANGKAPURA	34.817	34.464	69.281	34.501	34.003	68.504
18	TAMBAK	19.181	18.802	37.983	19.368	18.930	38.298
JUMLAH		659.578	650.861	1.310.439	661.045	652.581	1.313.626

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2018

Jumlah penduduk Gresik tahun 2017 mengalami kenaikan 0,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Laju kenaikan penduduk ini kecil selain dipengaruhi fluktuaktif mortalitas. fertilitas. dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2017 sebanyak 383.463 keluarga. Dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat

sebanyak 376.023 keluarga maka terjadi kenaikan jumlah keluarga sebanyak 7.440 Keluarga atau 1.98%. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH KK	
			2016	2017
1	DUKUN	26	19.209	19.653
2	BALONGPANGGANG	25	17.667	18.054
3	PANCENG	14	14.583	14.906
4	BENJENG	23	19.681	20.078
5	DUDUKSAMPEYAN	23	14.306	14.454
6	WRINGINANOM	16	22.944	23.299
7	UJUNGPANGKAH	13	14.526	14.798
8	KEDAMEAN	15	19.493	19.751
9	SIDAYU	21	11.816	12.030
10	MANYAR	23	31.374	32.195
11	CERME	25	21.882	22.364
12	BUNGAH	22	18.819	19.234
13	MENGANTI	22	35.891	36.878
14	KEBOMAS	21	30.020	31.127
15	DRIYOREJO	16	30.583	31.316
16	GRESIK	21	25.006	24.750
17	SANGKAPURA	17	18.408	18.525
18	TAMBAK	13	9.815	10.051
JUMLAH		356	376.023	383.463

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2018

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya. berikut digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut:



Berdasarkan diagram di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2017. jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 36.878 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 124.132 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 10.051 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 38.298 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 0-14

tahun mendominasi piramida penduduk dengan persentase 9.24% kemudian kelompok umur 35-39 tahun mencapai 8.64% dan selanjutnya kelompok umur 30-34 tahun mencapai 8.61%. Adapun rincian kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2017

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE
0-4	62.724	58.655	121.379	9.24%
5-9	52.373	48.892	101.265	7.71%
10-14	53.625	50.454	104.079	7.92%
15-19	52.653	50.148	102.801	7.83%
20-24	50.652	48.976	99.628	7.58%
25-29	47.355	46.528	93.883	7.15%
30-34	56.527	56.558	113.085	8.61%
35-39	56.910	56.601	113.511	8.64%
40-44	54.208	53.450	107.658	8.20%
45-49	47.471	47.133	94.604	7.20%
50-54	39.410	39.548	78.958	6.01%
55-59	32.462	32.944	65.406	4.98%
60-64	23.311	20.572	43.883	3.34%
65-69	12.864	14.909	27.773	2.11%
70-74	8.398	10.818	19.216	1.46%
75 th ke atas	10.152	16.345	26.497	2.02%
JUMLAH	661.095	652.531	1.313.626	100%

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2018

Berdasarkan data kelompok umur pada tabel diatas dapat diinterpretasikan bahwa kelompok usia produktif umur 15-64 tahun mencapai 69.54%. sedangkan Kelompok usia non produktif usia 0-14 dan 65 tahun keatas mencapai 30.46%. Hal ini menunjukkan ketergantungan penduduk Kabupaten Gresik rendah dengan rasio 1:2.28 atau dimaknai 2 orang usia produktif menanggung 1 orang usia non produktif. dan selanjutnya jumlah penduduk berdasarkan pendidikan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tidak tamat SD	Org	-	369.493	375.290	361.831	370.206
2	Tamat SD	Org	187.441	398.531	378.505	369.598	362.074
3	Tamat SMP	Org	442.947	212.660	211.146	218.040	218.026
4	Tamat SMA	Org	255.166	267.646	270.896	288.962	290.252

5	Diploma	Org	186.671	11.057	11.251	12.099	12.375
6	Sarjana S1	Org	17.546	53.949	63.814	56.775	57.686
7	Sarjana S2	Org	21.414	2.746	2.804	3.058	3.128
8	Sarjana S3	Org	1.008	58	67	76	79

Dari tabel tersebut menunjukkan perkembangan penduduk yang sadar akan pendidikan. Pendidikan Strata 1 misalnya pada tahun 2013 menunjukkan 17.546 Orang dan tumbuh hingga 57.686 Orang pada tahun 2017.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat pada RKPD Tahun 2019 mengacu pada Dokumen Jangka Menengah Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8
Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Nilai Peduli HAM	90* regulasi baru	89
2	Indeks Reformasi Birokrasi	62.71 B	BB (71.09)
3	Pertumbuhan Ekonomi	5.92	5.83
4	Laju Inflasi	3.01	2,83
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58.30	61.36
6	Tingkat Kemiskinan	13.19%	12.80
7	Indeks Pembangunan Manusia	74.46* metode baru	74.46
8	Indeks Pembangunan Gender	89.31	89.31

Apresiasi kepedulian Hak Asasi Manusia Tahun 2017 diukur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusaia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia hak meliputi :

1. Hak Atas Kesehatan
2. Hak Atas Pendidikan
3. Hak Atas Perempuan dan Anak
4. Hak Atas Kependudukan
5. Hak atas Pekerjaan
6. Hak atas Perumahan

7. Hak atas Lingkungan yang Berkelanjutan

Berdasarkan perhitungan terhadap seluruh aspek hak asasi manusia yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan HaK Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa Nilai Peduli HAM Kabupaten Gresik menunjukkan pencapaian yang signifikan sejak diukur pada Tahun 2015 dengan nilai 75,29 meningkat dramatis menjadi 90 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 meskipun terdapat perubahan kriteria, **nilai Peduli HAM** mampu mencapai **89** atau tetap mempertahankan predikat Gresik sebagai Kabupaten Peduli HAM selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki tahun ke 4 (empat) dan sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi periode atau tahun berikutnya. Pada tahun 2012, Kementerian PAN dan RB telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (*self-assessment*).

Berdasarkan penilaian terhadap reformasi birokrasi dengan metodologi penilaian pada komponen secara mandiri melalui teknik "*criteria referenced test*" maka diperoleh **nilai Indeks Reformasi Birokrasi** Kabupaten Gresik Tahun 2017 adalah **71,9**.

Pertumbuhan ekonomi nasional dipublikasikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap kuartal sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dipublikasi setiap 1 (satu) tahun. Berdasarkan publikasi BPS, secara keseluruhan, hingga kuartal ke-IV, pertumbuhan ekonomi nasional membaik secara *year on year* mencapai 5.15%, provinsi Jawa timur mencapai 5,07, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik

tumbuh di atas rata-rata nasional mencapai 5,92% pada tahun 2017 dengan tingkat inflasi tahun 2016 sebesar 3.01.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah (1) Indeks Kualitas/Pencemaran Air (2) Indeks Kualitas/Pencemaran Udara, (3) Indeks Tutupan Hutan/Lahan. Perhitungan IKLH adalah 100 % dengan pembagian. Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30 % dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40 % dengan parameter sebagai berikut :

1. Parameter Indeks Pencemaran Air, Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu TSS,DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.
2. Parameter Indeks Pencemaran Udara. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas udara yaitu SO_x dan NO_x.
3. Parameter Indeks Tutupan Hutan, Parameter yang dinilai dalam indikator tutupan hutan yaitu Luas Tutupan berhutan dan Luas Wilayah.

Standar dan peraturan yang digunakan dalam menghitung IKLH adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Indeks Udara Model EU, Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan standar yang dirumuskan, **IKLH Kabupaten Gresik tahun 2017** mencapai **61,36** meningkat 3,06 basis point dibanding tahun 2016 sebesar **58,30**.

Kondisi **tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik** pada Tahun 2017 berdasarkan publikasi BPS mencapai **12,80%** atau turun signifikan sebesar 0,83% dibanding Tahun 2016 sebesar 13,63%. Penurunan angka kemiskinan diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan namun dipengaruhi oleh pelbagai faktor penting seperti resesi ekonomi secara global, laju inflasi yang menyebabkan harga barang atau jasa meningkat, serta faktor lain seperti dinamika pertumbuhan penduduk menyebabkan garis kemiskinan (taraf hidup pengeluaran seorang individu atau rumah tangga) meningkat lebih tinggi dibandingkan akselerasi peningkatan kesejahteraan. **Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik** terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru yaitu sebesar **74,46** meningkat dibandingkan

tahun sebelumnya sebesar 73,57 serta Indeks Pembangunan Gender sebesar 89.31 pada tahun 2016.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum masyarakat pada RKPD Tahun 2019 mengacu pada Dokumen Jangka Menengah Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut :

2.1.3.1 Aspek Layanan urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD) mencapai 75,53% dengan Jumlah Siswa Pendidikan Usia Dini (PAUD) mencapai 57.966 siwa dari Jumlah kelompok usia 4-6 tahun sebanyak 76.750 jiwa. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat mencapai 98,76% dengan Jumlah Siswa SD dan Sederajat mencapai 119.344 siswa dibanding Jumlah kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 120.848 jiwa. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat sebesar 82,43% dengan Jumlah Siswa SMP sederajat mencapai 52.528 siswa dibanding Jumlah kelompok usia 13-15 tahun mencapai 63.725 jiwa. Adapun Angka Rata rata lama sekolah mencapai 9,31 Tahun.

Tabel 2.9
Urusan Pendidikan

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	APM SD dan Sederajat	98.62%	98.76%
2	APM SMP sederajat;	86.04%	82.43%
3	Angka Harapan Rata rata lama sekolah	9.2	9.31%

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

2. Urusan Kesehatan

Pada Tahun 2017 Urusan Kesehatan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA. Aspek Pelayanan umum pada urusan kesehatan digambarkan dengan Angka harapan hidup yang mencapai 72,33 pada tahun 2017.

Tabel 2.10
Urusan Kesehatan

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Angka Usia Harapan Hidup	72 ahun	

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kemantapan Infrastruktur Jalan dijelaskan bahwa dari 512,16 km jalan kabupaten, sepanjang 369,68 km dalam kondisi mantap atau 72,18%. Kemantapan Saluran Pengendalian dijelaskan bahwa dari 350 km saluran pengendalian banjir di Kabupaten Gresik, tercatat 128,19 km dalam kondisi mantap atau mencapai 36,6%. Kemantapan Jaringan Irigasi diperoleh dari 147.356 km jaringan irigasi di Kabupaten Gresik tercatat 32.654,09 km dalam kondisi baik atau mencapai 22,16%. Akses Air Bersih/Minum mencapai 68,87% meningkat 7.02 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 61,85%. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW pada tahun 2017 tercatat dari 189 ijin pemanfatan ruang yang diterbitkan di Kabupaten Gresik, seluruhnya sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau 100%.

Tabel 2.11
 Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	83,31%	72.18%
2	Persentase Akses Air Bersih/Minum	61,95%	68.87%
3	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penurunan **luas kawasan kumuh** pada Tahun 2017 seluas 19.93 Ha atau sebesar 10,96% dari keseluruhan luas 181,92 ha. Selama tahun 2016-2017 kawasan kumuh yang berhasil dientaskan secara akumulatif mencapai 32,08 ha atau 17,63%. Sedangkan Rumah Layak Huni mencapai 239.294 unit sebesar 86,95% dari total 275.209 rumah.

Tabel 2.12
 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	12,15 ha Dari 181.92 ha menjadi 169.42 ha 93%	19.31 ha
2	Persentase Rumah Layak Huni	85,94	86.95%

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum ,& Pelindungan Masyarakat

Penanganan Konflik sosial yang terjadi pada Tahun 2017 dijelaskan bahwa sebanyak 797 konflik seluruh dapat diselesaikan dengan rincian sebagai berikut :

1. Konflik bernuansa SARA sebanyak 5 konflik
2. Pelanggaran K3 sebanyak 781 pelanggaran
3. Konflik Nelayan sebanyak 2 konflik
4. Konflik sengketa tanah sebanyak 8 konflik
5. Konflik galian pipa sebanyak 1 konflik

Dalam penanggulangan bencana, telah berhasil diinisiasi 38 Desa Tangguh Bencana atau sebesar 57,58% dari 66 Desa yang teridentifikasi Desa Rawan Bencana.

Tabel 2.13
Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100%	100%
2	Persentase Penanganan Bencana	Tahun 2016 sebanyak 99 Bencana	57.58%

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

6. Urusan Sosial

Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas mencapai 4,98% dicapai melalui penanganan PMKS sebanyak 6.738 orang dari total keseluruhan PMKS yang teridentifikasi mencapai 135.177 orang.

Tabel 2.14
Urusan Sosial

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
----	---------------------------------	----------------	------

1	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	5.44%	4.98%
---	--	-------	-------

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Penduduk angkatan kerja Kabupaten Gresik Tahun 2017 sebesar 662.618 jiwa, sedangkan jumlah penduduk berdasarkan usia kerja sebanyak 973.800 jiwa. Dengan demikian **Tingkat Partisipasi Kerja** Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 mencapai 68,04%, mengalami peningkatan sebesar 2,29 % dibandingkan tahun 2016 yang mencapai angka 66,04%. Dalam hal tingkat pengangguran dipersentasekan pada tahun 2017 sebesar 5.50%.

Tabel 2.15
 Urusan Tenaga Kerja

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,81%	4,54%

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak selama tahun 2017 mencapai 123 korban dibanding 136 korban kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan atau mencapai 90,44%. Sedangkan indeks pemberdayaan gender mencapai 62,79. IDG merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan kebijakan.

Tabel 2.16
 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,79	62,79
2	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	100%	90,44%

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

3. **Urusan Pangan**

Rasio ketersediaan pangan utama dihitung dari Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun dibagi Jumlah penduduk. Pada tahun 2017 Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun Kabupaten Gresik sebesar 394.450,09 kg. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.313.626 jiwa, maka Rasio ketersediaan pangan utama penduduk 300,28 Kg/Kpt/Thn meningkat dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 202,21 Kg/Kpt/Thn. Sasaran pada urusan pangan ini dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pertanian.

Tabel 2.17
Urusan Pangan

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	202.21 Kg/Kpt/Thn	300,28 Kg/Kpt/Thn

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

4. **Urusan Keluarga Berencana**

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 sebesar 0,24% dengan jumlah penduduk sebanyak 1.313.626 Orang, mengalami peningkatan sebanyak 3.187 Jiwa dibanding jumlah penduduk Tahun 2016 sebanyak 1.310.439 Orang. Sedangkan Prevalensi peserta KB Aktif Kabupaten Gresik Tahun mencapai 81,5% dengan jumlah pasangan usia subur 237.249 pasangan berbanding pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif mencapai 193.335 pasangan.

Tabel 2.18
Urusan Keluarga Berencana

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Angka laju pertumbuhan penduduk	1.18	0,24

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

5. **Urusan Lingkungan Hidup**

Capaian terhadap uji Kualitas Air Sungai dengan konsentrasi TSS, DO, BOD, COD Fecal Coli, dan Total Coliform mencapai 53,64 mengalami kenaikan sebesar 4,65 poin dibanding tahun sebelumnya sebesar 49,01 sedangkan terhadap uji Kualitas Udara dengan rerata

S02 dan NO2 mencapai 70 mengalami kenaikan sebesar 2 poin dibanding tahun 2016 sebesar 68.

Tabel 2.19
Urusan Lingkungan Hidup

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Indeks Kualitas Air Sungai	49.01	53,64
2	Indeks Kualitas Udara	68	70

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

6. Urusan kependudukan dan Catatan Sipil, Kearsipan dan Kecamatan

Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat ini didasarkan pada UU Pelayanan Publik yakni persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran serta masukan. Berdasarkan survey terhadap 48 perangkat daerah penyelenggaran pelayanan diperoleh bahwa Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat per unit layanan mencapai 77,08 dengan kategori baik

Tabel 2.20
Urusan kependudukan dan Catatan Sipil, Kearsipan dan Kecamatan

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	76.90 Baik	77.08 Baik

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam potret nasional, rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 pada 73.709 Desa berdasar data Podes menghasilkan data sebagai berikut: Desa Sangat Tertinggal : 13.453 Desa atau 18,25 %; Desa Tertinggal : 33.592 Desa atau 45,57 %; Desa Berkembang : 22.882 Desa atau 31,04 %; Desa Maju : 3.608 Desa atau 4,89 %; dan Desa Mandiri : 174 Desa atau 0,24%. Sedangkan klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

- 1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
- 2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
- 3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707

- 4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
- 5. Desa Mandiri : > 0,815

Berdasarkan perhitungan terhadap faktor komposit, **Indeks Desa membangun** Kabupaten Gresik mencapai 0,6208 di atas rerata nasional dengan kategori Desa Berkembang. Hasil ini merupakan kompositb dari Indeks Ketahanan Sosial 0,6275 Indeks Ketahanan Ekonomi 0,5251 dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa 0,7099.

Tabel 2.21
 Urusan Pemberdayaan Masyarakat

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Indeks Desa Membangun	0,6208	0,6208

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

8. **Urusan Perhubungan**

Angka Kecelakaan Angkutan Umum pada Tahun 2016 sebesar 787 Kecelakaan dari total 526.093 Angkutan yang ada di kabupaten Gresik.

Tabel 2.22
 Urusan Perhubungan

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Angka Kecelakan Angkutan Umum	787 kecelakaan 526.093 angkutan 0.15%	13%

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

9. **Komunikasi dan Informatika dan Statistik**

Angka pertumbuhan kumulatif pengakses Website Resmi Pemda mencapai 5,60% sebesar 17.965 pengunjung dengan jumlah pengunjung Tahun 2017 mencapai 338.557 dibanding tahun sebelumnya mencapai 320.592 Pengunjung.

Tabel 2.23
 Urusan Komunikasi dan Informatika dan Statistik

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	2017
1	Pertumbuhan kumulatif pengakses Website Resmi Pemda	5,60
2	Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online)	100%

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

10. **Urusan Koperasi dan Usaha Mikro**

Angka pertumbuhan usaha mikro dan kecil pada tahun 2017 mencapai 0,27%. Jumlah usaha mikro dan kecil pada tahun 2017 mencapai 192.611 usaha atau meningkat 520 usaha dibandingkan tahun 2016 sebanyak 192.091 usaha serta meningkat 4.077 usaha dibandingkan tahun 2015 sebanyak 188.534 usaha. Maka pertumbuhan Komulatif usaha mikro dan kecil mencapai 2,16%. Sedangkan pertumbuhan koperasi sehat di Kabupaten Gresik mencapai 29,19% dengan jumlah koperasi sehat pada tahun 2017 sebanyak 385 meningkat 81 dari tahun dasar 2015 sebanyak 304 koperasi sehat.

Tabel 2.24
Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Pertumbuhan Komulatif Usaha Mikro	1,89% (192.091)	2,16%
2	Pertumbuhan Koperasi sehat	298	26,64%

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

11. **Urusan Penanaman Modal dan Pertanahan**

Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara signifikan pada Tahun 2017 dengan total realisasi investasi mencapai 10.394.867,6 (juta rupiah) atau 10,39T dengan komposisi 4.449.254,7 (juta rupiah) Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan 5.945.612,94 (juta rupiah) berasal dari Penanaman Modal Asing. Dalam periode 2015-2016, komulatif realisasi investasi mencapai 31.95 T maka komulatif realisasi Investasi sampai dengan 2017 mencapai 42,34 T. Dengan demikian pertumbuhan realisasi investasi Kabupaten Gresik sejak tahun dasar (2015) meningkat dari 23,45 Triliun menjadi 42,34 Triliun atau mencapai 80,55%.

Tabel 2.25
Urusan Penanaman modal dan Pertanahan

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	36% (31.95 T)	80,55% Rp 42,34 T

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

12. **Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Selama tahun 2017, jumlah Pemuda yang dibina mencapai 1.356 orang dengan jumlah **Pemuda Pelopor dan berprestasi** mencapai 644 atau 47% dengan rincian 567 berprestasi dalam bidang olahraga dan 77 paskibraka.

Tabel 2.26
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	90,5 % Dari 768 pemuda yang dibina,695 pemuda meraih prestasi	47%

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

13. **Urusan Kebudayaan**

Pada tahun 2017 dari 24 **cagar budaya** yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2011 tentang cagar budaya, seluruhnya dilestarikan dengan baik, sehingga capaian indikator kinerja ini tercapai 100%.

Tabel 2.27
Urusan Kebudayaan

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Persentase Cagar Budaya yang dilaestarkan	100%18 Cagar Budaya yang dilestarikan	

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

2.1.3.3 **Fokus Layanan Urusan Pilihan**

1. **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Kontibusi data **PDRB Subsektor Perikanan** berdasarkan data termutakhir mencapai 4,91% mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,78%. Sedangkan total PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran mencapai Rp107. 881.973.03(Juta Rupiah).

Tabel 2.28

Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	2017
1	Presentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	4,91%

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

2. **Urusan Pariwisata**

Persentase apresiasi wisata diukur melalui jumlah kunjungan wisata. Pada tahun 2015, kunjungan wisata mencapai sebanyak 3.107.278 jiwa meningkat menjadi 3.258.126 jiwa pada tahun 2016 dan sebanyak 3.549.217 jiwa pada tahun 2017 atau meningkat rata-rata 6,89% per tahun. Sedangkan peningkatan jumlah wisatawan dari tahun 2016 ke 2017 mencapai 291.091 pengunjung atau mencapai 8,9%.

Tabel 2.29
Urusan Pariwisata

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	2017
1	Persentase Apresiasi Wisata	8,9%

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

3. **Urusan Pertanian**

Indikator kinerja urusan pertanian terintegrasi dengan urusan pangan dengan sasaran "Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan".

4. **Urusan Perdagangan**

Nilai Ekspor Barang/Komoditi tumbuh sebesar 15,94% dengan nilai Ekspor Barang/Komoditi Tahun 2017 mencapai US\$1.727.915.828,35 meningkat US\$237.615.811,82 dibandingkan Tahun 2016 sebesar US\$1.490.300.016,53. Sedangkan pertumbuhan komulatif jumlah industri kecil dari tahun 2017 dibandingkan tahun dasar mencapai 1,42%. Adapun jumlah IKM Tahun 2017 sebanyak 7.136 IKM meningkat 50 IKM dibandingkan Tahun 2016 sebesar 7.086 IKM dan meningkat 100 IKM dibandingkan tahun dasar 2015 sebesar 7036 IKM.

Tabel 2.30
 Urusan Perdagangan

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	12,97% 170.910.371 (US \$)	15,94%

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

5. **Urusan Perindustrian**

Jumlah Komulatif Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2017 mencapai 7092 IKM atau meningkat 106 IKM dari Tahun sebelumnya.

Tabel 2.31
 Urusan Perindustrian

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Jumlah Komulatif Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	7086 IKM (0.71%)	7192

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

2.1.3.4 **Fokus Layanan Urusan Penunjang**

1. **Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Peraihan **nilai pangripta** B berdasarkan assessment terhadap keselarasan perencanaan pembangunan diperoleh perubahan RPJMD 2016-2021 serta dokumen perencanaan tahunan atau RKPD tahun 2016 yang telah selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Selain itu, dalam tataran perencanaan operasional telah dilaksanakan fasilitasi penyusunan renstra kepada seluruh perangkat daerah secara tepat waktu melalui pembentukan *planning clinic* didukung sistem informasi *e-planning*.

Tabel 2.32
 Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Nilai Pangripta	B	B

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

2. **Urusan Pengawasan**

Pada Tahun 2017 temuan audit internal Inspektorat Kabupaten Gresik sebanyak 488 temuan. Dari temuan tersebut seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Jumlah temuan hasil audit eksternal yang dilakukan oleh BPK Tahun 2017 sebanyak 222 temuan. Dari 222 temuan tersebut terdapat 525 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Rekomendasi yang berhasil ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebanyak 401 rekomendasi atau sebesar 76,38%, sedangkan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui Inspektorat Kabupaten Gresik sebanyak 97 aduan seluruhnya dapat ditindaklanjuti.

Tabel 2.33
Urusan Pengawasan

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Opini BPK	WTP	WTP

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

3. **Urusan Sekretariat Daerah**

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2017 oleh Kementerian PAN RB, Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh nilai 71,68 atau predikat “BB” (sangat baik). Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah baik. Adapun standarisasi pelayanan publik, 37 perangkat daerah atau sebesar 77% telah melaksanakan standarisasi pelayanan dengan penyusunan SOP.

Tabel 2.34
Urusan Sekretariat Daerah

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
----	---------------------------------	----------------	------

1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	CC	BB
---	--	----	----

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

4. **Urusan Kepegawaian**

Indeks eks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2017 sebesar 71,43 atau sebesar 71,43 % dari skor maksimum (100). Pencapaian ini ditunjang oleh beberapa hal meliputi Hasil Rekapitulasi Absensi Elektronik terhadap 69 Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik per Desember 2017 diperoleh data Indeks Kedisiplinan Pegawai sebagai berikut :

- a. Indeks Kedisiplinan Baik (80 – 100) : 54 Satker (78,26%)
- b. Indeks Kedisiplinan Cukup (60 – 79) : 9 Satker (13,04%)
- c. Indeks Kedisiplinan Kurang (di bawah 60) : 6 Satker (8,7%)

Dari 2679 pegawai yang mengumpulkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik, sebesar 98,66% (2643 pegawai) nilai SKP nya masuk kategori baik. Sedangkan dari 5934 Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik seluruhnya sudah ditempatkan sesuai dengan syarat jabatan dan kompetensinya

Tabel 2.35
Urusan Kepegawaian

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Indeks Profesionalitas ASN	75,8	71.43%

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

5. **Urusan Keuangan**

Pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2017 mencapai Rp872,252,632,858.20meningkat Rp156.771.694.667,04 atau sebesar 21,91% dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp715.480.938.191,00.

Tabel 2.36
Urusan Keuangan

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1	Rasio Kemandirian Fiskal	Pendapatan Asli Daerah 715,5 M disbanding Dana Perimbangan 1,33 Trilyun 53,5%	21,91%

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik maupun internasional. Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Gresik dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Adapun Aspek daya Saing Daerah Kabupaten Gresik disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.37
Aspek Daya Saing Daerah

No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017
1.	Nilai Peduli HAM	90* regulasi baru	89
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	62.71 B	71.09
3.	Pertumbuhan Ekonomi	5.92	5.92
4.	Laju Inflasi	3.01	3.01
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58.30	61.36
6.	Tingkat Kemiskinan	13.19%	12.80
7.	Indeks Pembangunan Manusia	74.46* metode baru	74.46
8.	Indeks Pembangunan Gender	89.31	89.31
9.	Pertumbuhan Realisasi Investasi	36% (31.95 T)	
10.	Rasio Kemandirian Fiskal	Pendapatan Asli Daerah 715,5 M disbanding Dana Perimbangan 1,33 Trilyun 53,5%	55%
11.	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	12,97% 170.910.371 (US \$)	15,94%
12.	Indeks e-Governement	Tahun 2015 2.87	2.87
13.	Indeks Desa Membangun	0,6208	87,56
14.	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	Dari 512,16 km jalan kabupaten, 426,68 km dalam kondisi mantap (83,31%)	72.18%
15.	Persentase Akses Air Bersih/Minum	61,95%	68.87%
16.	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%
17.	Pertumbuhan Komulatif IKM	7086 IKM (0.71%)	7.42%

18.	Pertumbuhan Komulatif Usaha Mikro	1,89% (192.091)	172.260
19.	Pertumbuhan Koperasi sehat	298	0.70%
20.	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Peningkatan wisatawan meliputi 4.974 Wisatawan Mancanegaradan 3.258.126 Wisatawan Dalam Negeri 5,01%	8.9%

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017

2.3. Evaluasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2017

Berdasarkan uraian tujuan dan pembangunan, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gresik memiliki 9 (Sembilan) tujuan pembangunan yang diukur melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja utama pembangunan Kabupaten Gresik. Adapun Capaian Indikator tujuan Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2017

No	Indikator Tujuan	2017			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Nilai Peduli Hak Asasi Manusia	78	89	114%	Sangat Tinggi
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	Baik (77,78)	100%	Sangat Tinggi
3	Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB (71,09)	100%	Sangat Tinggi
	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi
4	Angka Pertumbuhan Ekonomi	6.30-6.85	5.92	94%	Sangat Tinggi
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59.5-66	61,36	100%	Sangat Tinggi
6	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5.50-5.20%	5.50%	100%	Sangat Tinggi
7	Persentase Tingkat Kemiskinan	12.75 - 11.75%	12,80	100%	Sangat Tinggi
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Metode lama 77.05-77.95	74,46	100%	Sangat Tinggi

		Metode baru 74.05-74.95			
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.3-89.9	89,31	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan capaian terhadap 10 indikator kinerja tujuan pada Tahun 2017, keseluruhannya berpredikat sangat baik sebagaimana ditunjukkan grafik berikut:



Gambar 2.7 Rekapitulasi Predikat Capaian Indikator Tujuan

Berdasarkan uraian tujuan dan pembangunan diatas perlu didukung dengan indikator dibawahnya yang dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah sebagai leading sektor. Tabel berikut ini menjelaskan uraian capaian sasaran Pembangunan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pada tahun 2017.

Tabel 2.39

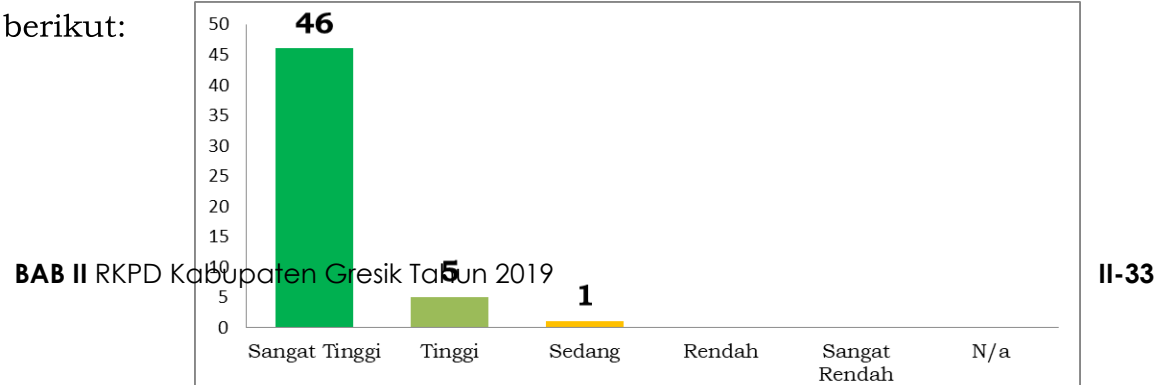
Capaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2017

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2017			
1	Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);	84,00%	75,53%	89,91%	Tinggi
2	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat	98,96%	98,76%	99,79%	Sangat Tinggi
3	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat;	86,80%	82,43%	94,96%	Sangat Tinggi
4	Angka Rata rata lama sekolah	9.05-9.13	9,31	>100%	Sangat Tinggi
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup;	110	95,91	>100%	Sangat Tinggi
6	Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup;	4.12	5,5	66,5	Sedang
7	Angka Usia Harapan Hidup	71.70-71.80	72,33	>100%	Sangat Tinggi
8	Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD	76%	77,29%	>100%	Sangat Tinggi
9	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	84,81%	72,18%	85,10%	Tinggi

10	Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir	37,00%	36,60%	98,90%	Sangat Tinggi
11	Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi	25,23%	22,16%	87,80%	Tinggi
12	Persentase Akses Air Bersih/Minum	75.95%	68,87%	90,60%	Sangat Tinggi
13	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
14	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	10 ha	19.93 ha	>100%	Sangat Tinggi
15	Persentase Rumah Layak Huni	85,75%	86,95%	>100%	Sangat Tinggi
16	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
17	Persentase Desa Tangguh Bencana	60,60%	57,58%	95,00%	Sangat Tinggi
18	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	4,5-5%	4,98%	100%	Sangat Tinggi
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67.90%	68,04%	>100%	Sangat Tinggi
20	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	89%	93,07%	>100%	Sangat Tinggi
21	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan & Anak	100%	90,44%	90,44%	Sangat Tinggi
22	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62.75-63.25	62,79	100%	Sangat Tinggi
23	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	194 Kg/Kpt/Thn	300,28 Kg/Kpt/Thn	>100%	Sangat Tinggi
24	Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
25	Indeks Kualitas Air Sungai	51.5-55.75	53,64	100%	Sangat Tinggi
26	Indeks Kualitas Udara	75-79	70	93%	Sangat Tinggi
27	Persentase Ketunggalan Identitas Berbasis e-KTP	73,87%	82,44%	>100%	Sangat Tinggi
28	Indeks Pembangunan Desa	70,90%	0,6208	87,56	Tinggi
	Indeks Desa Membangun	Rasionalisasi target 0,7090			
29	Angka laju pertumbuhan penduduk	0.6-1.4	0,24	>100%	Sangat Tinggi
30	Prevalensi peserta KB Aktif;	88%	81,50%	92,60%	Sangat Tinggi
31	Rasio Konektivitas Transportasi	0.28	0.289	>100%	Sangat Tinggi
32	Pertumbuhan kumulatif pengakses Website Resmi Pemda	2,7-3,7%	5,6	>100%	Sangat Tinggi
33	Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
34	Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro dan kecil	0,66%	2,16%	>100%	Sangat Tinggi

35	Angka Pertumbuhan Koperasi sehat	3,62%	26,64%	735,90%	Sangat Tinggi
36	Pertumbuhan Realisasi Investasi	34,12% (Rp.31,45 T)	80,55% Rp 42,34 T	>100%	Sangat Tinggi
37	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	45-55%	47%	100%	Sangat Tinggi
38	Persentase Kelestarian Budaya	100%	100%	100	Sangat Tinggi
39	Indeks Minat Baca Daerah	01:06,6	01:06,5	98%	Sangat Tinggi
40	Persentase Capaian Alih Media Arsip	80%	61,05%	76,3%%	Tinggi
41	Presentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	4,25-4,45%	4,91%	100%	Sangat Tinggi
42	Persentase Apresiasi Wisata	0,18%	8,90%	>100%	Sangat Tinggi
43	Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	5%	15,94%	>100%	Sangat Tinggi
44	Angka Pertumbuhan Kumulatif Industri Kecil Menengah (IKM)	1,42%	1,42%	91,75%	Sangat Tinggi
45	Persentase standardisasi pelayanan publik	60%	77%	>100%	Sangat Tinggi
46	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	B	BB	100%	Sangat Tinggi
47	Persentase Peningkatan Produktivitas Perda Inisiatif DPRD	12%	230%	>100%	Sangat Tinggi
48	Nilai Pangripta	B	B	100%	Sangat Tinggi
49	Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah;	13-25%	156.771.6 94.667,04 (21,91%)	100%	Sangat tinggi
50	Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat	Audit Internal 100%	100 %,	100%	Sangat tinggi
		Audit Ekternal 70%,	76.38%	>100%	
		Aduan Masyarakat 100%	100%	100%	
51	Indeks Profesionalitas ASN	72%	71.43%	98,8	Sangat Tinggi
52	Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	65-75%	76,96%	> 100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan rekapitulasi capaian sasaran pembangunan tersebut dijelaskan bahwa dari 52 indikator sasaran 46 bernilai sangat tinggi, 5 bernilai tinggi, dan 1 bernilai sedang sebagaimana ditunjukkan gambar berikut:



Gambar 2.8 Rekapitulasi Predikat Capaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2017

2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD.

Evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan Telaahan hasil evaluasi RKPD mencakup:

3. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tahun 2017
4. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan Tahun 2017
5. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan Tahun 2017
6. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan Tahun 2017
7. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
8. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah disajikan pada Tabel Berikut :

Tabel 2.40
Evaluasi Hasil Program Perencanaan Daerah

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017			NILAI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100%	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100%	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100%	ST
4	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	Satpol PP/10.000 Penduduk	2 per 10.000 penduduk	2 per 10.000 penduduk	100%	ST
5	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan) dalam rangka penegakan perda	%	100	100	100%	ST
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rasio Linmas Per RT	Linmas/Per RT	1 Linmas Per RT	1 Linmas Per RT	100%	ST
7	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Persentase Penurunan Kebakaran	Kejadian Kebakaran	10-35% (18-13)	1-20	100%	ST
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST

3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
4	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	ST
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	ST
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
5	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengurus Desa Tangguh dan Relawan Bencana	%	50-60	57,57%	115,14%	ST
6	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Kedaruratan dan Penyaluran Logistik (Terhadap jumlah bencana yang terjadi pada tahun ke -n)	%	100	100	100	ST
7	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Kemiskinan (Terhadap jumlah bencana yang terjadi pada tahun ke -n)	%	100	100	100	ST
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100%	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100%	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100%	ST

4	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	Persentase fasilitasi terhadap UPT	%	100	100	100%	ST
5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif;	Organisasi	26	29	112%	ST
6	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kepemudaan;	Wirausahaan Muda	120	83	69%	S
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN, PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	Persentase Fasilitasi terhadap Cabang Olahraga Berprestasi	%	15-25%	70%	467%	ST
PARIWISATA							
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100%	100%	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100%	100%	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100%	100%	ST
4	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT	%	100	100%	100%	ST
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	3.117.278,00	3.549.217	106%	ST
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Fasilitasi terhadap Obyek dan Potensi Destinasi Wisata	Destinasi wisata	7	9	129%	ST
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Ketersediaan Ruang Ekonomi Kreatif;	Ruang Ekonomi Kreatif	25	30	120%	ST
KEBUDAYAAN							

8	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	%	100% (19)	100%	100%	ST
9	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Persentase fasilitasi terhadap Cagar Budaya	%	100% (5)	100%	100%	ST
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
4	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase kepemilikan KTP-el	%	73,87	82,44	102.58	ST
		Prosentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	22,22%	14,67%	66,03%	S
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0 - 18 th.	%	86,92	88,38	101.68	ST
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN INOVASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase arsip Akte Kelahiran yang dialih media	%	34,34	32,24	94%	ST
		Persentase Validasi Data Ganda dan Anomali	%	35	70,13	113.11	ST
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	83,5	72,50	86.83	T
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100%	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100%	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100%	ST
4	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	Persentase fasilitasi terhadap UPT	%	100	100	100%	ST

5	PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT	Jumlah Ketersediaan Jaringan WAN dan Fiber Optik Pemkab.Gresik	SKPD DAN UPTD	58 SKPD 30 UPTD	58 SKPD 30 UPTD	100%	ST
		Kecepatan Akses Internet untuk Perkantoran Pemerintahan;	Mbps	200	200	100%	ST
6	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	Cakupan Informasi Official Website Pemerintah Daerah yang terpublish;	Jumlah Informasi/ Tahun	781 Informasi	781 Informasi	100%	ST
STATISTIK							
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Presentase Ketersediaan Data Report Based dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100%	ST
PERSANDIAN							
8	PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH	Persentase Cakupan Pengamanan Informasi yang Dikecualikan milik Pemerintah Daerah.	%	100	100	100%	ST
PERPUSTAKAAN							
PERANGKAT DAERAH PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100%	100%	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100%	100%	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100%	100%	ST
		Rasio Koleksi Buku dan Jumlah Pemustaka	Judul buku/Oran g	0.08 -0.16	0,12	100%	ST
4		Jumlah Pemustaka atau Pengunjung Perpustakaan (RBBA)	Orang	20.000	137.319	686,60%	ST
		Jumlah Anggota Perpustakaan	Orang	750	3.982	530,93%	ST
		Jumlah Perpustakaan yang Dibina	Perpus takaan	186	90	100,00%	ST

KEARSIPAN							
5	PROGRAM PELAYANAN KEARSIPAN DAERAH	Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	100	100%	100%	ST
PERENCANAAN							
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100,00%	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100,00%	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100,00%	ST
4	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD sesuai Petunjuk Teknis	%	100	100	100,00%	ST
		Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD	%	75	79%	105,33%	ST
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan ekonomi	%	100	100	100,00%	ST
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	%	100	100	100,00%	ST

7	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Praswil SDA & LH	%	100	100	100,00%	ST
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
8	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00%	ST
9	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100,00%	ST
INSPEKTORAT							
INSPEKTORAT DAERAH							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100	100	100	ST
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
5	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Persentase SAKIP SKPD yang mematuhi peraturan	%	100	100	100	ST
6	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase temuan audit yang bersifat material nihil	%	100	100	100	ST
7	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase kegiatan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang terlaksana dengan baik	%	100	100	100	ST

8	PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN DAERAH	Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SPIP SKPD	N/A	100	100	100	ST
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap peningkatan disiplin Aparatur	%	100	100	100	ST
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	%	66	66	101	ST
		Persentase Pejabat Struktural yang telah memiliki sertifikat diklat PIM sesuai dengan jenjangnya	%	79	77	97	ST
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase jumlah ASN yang disiplin	%	100	100	100	ST
7	PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan analisa Jabatan	%	100	100	100	ST
		Rasio Jabatan struktural yang terisi	%	100	91,79	91,79	ST
8	PROGRAM DATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase tingkat validitas data aparatur sipil negara	%	100	100	100	ST
		Persentase Jumlah ASN dengan kebutuhan	%	69	55	79	T
SEKRETARIAT DAERAH							
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM						

	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum	%	100	100	100%	ST
	BAGIAN HUKUM						
	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	ProduktivitasPengesahan dan penetapan Produk Hukum Daerah	Perda	15 Perda	100%	100%	ST
	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	%	100	100	100	ST
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL						
	PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN DAERAH	PersentasePembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;	%	100	100	100	ST
	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI	Jumlah Sosialisasi Penggunaan Produk Berpita Cukai melalui Media Cetak Dan Elektronik	Kali	12	12	100	ST
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	%	100	100	100	ST
	BAGIAN PEREKONOMIAN						
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEREKONOMIAN DAERAH	Persentase Fasilitasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah	%	100	100	100%	ST
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Fasilitasi dan Koorinasi Kebijakan Strategis SDA LH	%	100	100	100%	ST
	BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA						
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Nilai Kualitas Pelayanan Publik (Kategori sangat baik)	%	40	77,78	194%	ST

	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA LAKSANA DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB dengan nilai B ke atas);	N/A	B	BB	100	ST
		Predikat Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	-	B	BB	100	ST
	BAGIAN UMUM						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase fasilitasi peningkatan disiplin Aparatur	%	100	100	100	ST
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET, DAN BARANG DAERAH	Persentase Fasilitasi i dan Koordinasi Kebijakan Strategis engelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah	%	100	100	100	ST
	BAGIAN UNIT LAYANAN DAN PENGADAAN						
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis engelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah	%	100	100	100	ST
	BAGIAN KEUANGAN						
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelayanan administrasi keuangan	%	100	100	100	ST
SEKRETARIAT DPRD							
SEKRETARIAT DPRD							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	85	100%	ST

2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100	92,90	93%	ST
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100%	ST
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Produktivitas Perda Inisiatif DPRD	Perda	10 Perda	10 Perda	100%	ST
6	PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	%	100	89	89%	T
	KECAMATAN						
	KECAMATAN GRESIK						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	93%	93%	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	91%	91%	ST
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap Peningkatan Kapasitas Aparatur	%	100	100%	100%	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	97%	97%	ST
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	100%	123,46	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	96%	118,52	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	100%	125	ST
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	100%	125	ST

	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	96%	120	ST
	KECAMATAN KEBOMAS						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100%	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100%	ST
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100%	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100%	ST
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	81	100%	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	81	100%	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	80	100%	ST
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	80	100%	ST
	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	80	100%	ST
	KECAMATAN MANYAR						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100%	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100%	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100%	ST

	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	81%	100%	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	81%	100%	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	80%	100%	ST
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	80%	100%	ST
	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	80%	100%	ST
	KECAMATAN CERME						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100%	100%	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100%	100%	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100%	100%	ST
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	81%	100%	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	84.05%	103%	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	80%	100%	ST
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	80%	100%	ST

	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	85%	106%	ST
	KECAMATAN BENJENG						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100,00	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100,00	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	81%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	75,12%	92,74	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	80%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	80%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	80%	100,00	ST
	KECAMATAN BALONG PANGGANG						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100,00	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100,00	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100,00	ST

	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	81%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	81%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	80%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	80%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	80%	100,00	ST
	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100,00	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100,00	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	81%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	81%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	80%	100,00	ST

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	80%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	80%	100,00	ST
	KECAMATAN DRIYOREJO						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100,00	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100,00	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	81%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	81%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	80%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	80%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	80%	100,00	ST
	KECAMATAN WRINGINANOM						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100,00	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100,00	ST

	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	81%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	81%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	80%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	80%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	80%	100,00	ST
	KECAMATAN KEDAMEAN						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100,00	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100,00	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	81%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	81%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	80%	100,00	ST

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	80%	100,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	80%	100,00	ST
	KECAMATAN MENGANTI						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	94,31	94,31	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	93,09	93,09	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	84,09	84,09	T
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	100	123	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	100	123	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	100	125	ST
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	100	125	ST
	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	100	125	ST
	KECAMATAN SIDAYU						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST

	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	81%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	81%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	80%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	80%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	80%	100	ST
	KECAMATAN UJUNG PANGKAH						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100%	100%	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100%	100%	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100%	100%	ST
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	85%	85%	T

	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	85%	85%	T
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	85%	85%	T
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	80%	80%	T
	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	80%	80%	T
	KECAMATAN PANCENG						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	81%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	81%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	80%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	80%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	80%	100	ST
	KECAMATAN BUNGAH						

	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	81%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	73,81%	98	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	52,43%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	80%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	66,7%	100	ST
	KECAMATAN DUKUN						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	81%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	79,34%	98	ST

	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	80%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	80%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	80%	100	ST
	KECAMATAN SANGKAPURA						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	81%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	81%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	80%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	80%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	80%	100	ST
	KECAMATAN TAMBAK						
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST

	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	%	81%	81%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	81%	81%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	%	80%	80%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	%	80%	80%	100	ST
	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	%	80%	80%	100	ST
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	PERANGKAT DAERAH PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100%	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100%	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100%	ST
4	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	Persentase fasilitasi terhadap UPTD	%	100	100	100%	ST
5	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Rasio Kemantapan Jalan dibanding Luas Wilayah	Km/Km ²	0,365	0,430	118%	ST
			Luas Jalan	434,36	512,16	118%	ST

			Luas Jalan	1191,25	1.191,25	100%	ST
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Persentase Ketersediaan lampu PJU	%	62	48,14	78%	T
7	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	%	84,81% Jalan dan 95,88% Jembatan	72,18 % jalan dan 67,82 %	80% 70%	Jalan : T Jemb atan :S
8	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Persentase PJU yang Menyala	%	80	89,98	112%	ST
9	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir Perdesaan	%	37,45	36,63	98%	ST
10	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG	Persentase Kondisi Baik Saluran Drainase Perkotaan	%	66,49	52,21	79%	T
11	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi	%	25,23	22,16	88%	T
12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU	Persentase Kapasitas tampungan air waduk	%	63,87	63,95	100%	ST
13	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM	Persentase Akses Air Bersih	%	75,95	60,93	80%	T
14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH STRATEGIS	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Strategis	Lokasi	15	23	153%	ST
15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA	Persentase Gedung Negara yang Ber IMB	%	10	n/a	n/a	n/a
16	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	JUMLAH RDTR yang disusun	Dokumen	1	1	100%	ST
17	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Persentase Implementasi Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	%	35	52,94	151%	ST

18	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Persentase Kesesuaian Ijin Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	%	100	100	100%	ST
19	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang Tertib	%	80	100	125%	ST
		Jumlah Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung yang diterbitkan	Sertifikat	40	32	80%	T
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	PERANGKAT DAERAH PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100%	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100%	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100%	ST
4	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN	Luas Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	163,92	158,77	97%	ST
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN						
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RUMAH UMUM						
8	PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA	Persentase Rumah Layak Huni	%	85,75	86,95	101%	ST
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR LIMBAH	Jumlah Rumah Tangga Pengakses Fasilitas Air Limbah Komunal	RUMAH TANGGA	5500	4840	88%	T
TENAGA KERJA							
DINAS TENAGA KERJA							

1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA	Jumlah Cakupan Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven	Peserta	50	50,00	100	ST
		Jumlah Cakupan Peningkatan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja berbasis Entrepreneurship	Peserta	60	60,00	100,00	ST
5	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,02	68,04	104,64	ST
6	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Persentase Pemberlakuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	%	16,69	16,69	179,66	ST
7	PROGRAM INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS	Rata rata cakupan Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja	64,46	64,46	96,18	ST
TRANSMIGRASI							
8	PROGRAM FASILITASI TRANSMIGRASI	Persentase Fasilitasi Pelayanan Transmigrasi;	%	0,00	0,00	0	N/A
PERTANAHAN							
DINAS PERTANAHAN							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100%	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100%	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100%	ST
4	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase Fasilitasi Pengajuan Pengadaan Tanah	%	100	100	100%	ST

PERTANIAN							
DINAS PERTANIAN							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	ST
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
5	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	Persentase fasilitasi terhadap Pengelalaan UPT	%	100	100	100	ST
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI	Jumlah Fasilitasi Keberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	Gapoktan	228	228	100	ST
7	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN	Jumlah Olahan Produk Unggulan Pertanian	Produk	45	45	100	ST
8	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORIKULTURA	Persentase pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura	%	0,62	0,97	156,45	ST
9	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN DAN HORTIKULTURA	Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Pangan dan Hortikultura	TON	664.963	637,818	95,92	ST
10	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	Jumlah produksi komoditas Unggulan Perkebunan	TON	142.283	157,458	110,67	ST
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN LAPANGAN	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh	Penyuluh	153	153	100	ST
12	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN	Jumlah fasilitasi infrastruktur pendukung pertanian	Kelompok Tani	282	336	119,15	ST

13	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Persentase Penangan Penyakit Ternak;	%	65%	65	100	ST
14	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Peternakan	TON	14.814.335	11.991.571	80,95%	T
15	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	Persentase Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan;	%	5,35	5,35	100	ST
16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU	Cakupan Varietas Bahan Baku nikotin Rendah	Bahan Baku	2	2	100%	ST
	PANGAN						
17	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN	Ketersediaan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kecamatan	4	0	n/a	n/a
		Persentase Stabilitas Harga Pangan Utama	%	86,00%	85,5	99,42	ST
18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar	%	73%	73	100	ST
LINGKUNGAN HIDUP							
DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100%	100%	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100%	100%	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100%	100%	ST
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan cakupan pengangkutan sampah	%	60	41%	68,33	S

5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Uji Kualitas Lingkungan Hidup oleh Laboratorium Lingkungan Hidup	Sampel	510	605	118,63	ST
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Pencemaran Air	%	IPU 75-79 dan IPA 51.5-55.75	IPU = 70 IPA = 53,64	100%	ST
7	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM						
8	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI						
9	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Ratio ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah perkotaan	%	16,35%	19%	113%	ST
10	PROGRAM PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	Persentase Fasilitasi Pelayanan Lanoratorium Lingkungan	%	100	100%	100%	ST
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
4	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;	%	100	100	100	ST
5	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Indeks Pembangunan Desa	%	0,709	0,6208	87,56%	T

6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Ketersediaan Data Potensi Desa	%	55	90	163,6	ST
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes)	%	100	93,3	93,3	ST
PERHUBUNGAN							
DINAS PERHUBUNGAN							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100%	100%	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100%	100%	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap peningkatan disiplin Aparatur	%	100	100%	100%	ST
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	%	100	100%	100%	ST
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100%	100%	ST
6	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT	%	100	100%	100%	ST
7	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Angka Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Angkutan Umum) (Unit)	%	0,13%	13%	100%	ST
8	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Persentase Jumlah ruas Jalan yang terlayani angkutan dibanding ruas jalan	UNIT	100	100%	100%	ST
		Ketersediaan Angkutan Massal	ANGKUTAN MASSAL	0	0	100%	ST
		Persentase Cakupan Angkutan Penyeberangan	%	66,82%	68,26%	102,16%	ST
10	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Persentase Ketersediaan Rencana Induk dan Rencana Umum Perhubungan	Dokumen	100% (9)	9	100%	ST

		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Halte Angkutan)	Halte	10	10	100%	ST
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Terminal Angkutan)	Terminal	3	2	66,67%	S
11	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Jumlah Capaian Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian kendaraan bermotor yang terlayani 100%	100%	100%	100%	ST
12	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Ketersediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten; .					
		Rambu Lalin (unit)	UNIT	1504	1504	100%	ST
		Marka Jalan (m2)	M2	900	1445	160,56%	ST
		APILL (unit)	UNIT	95	95	100%	ST
		Jumlah Penerapan Area Traffic Control System (ATCS) dalam Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	LOKASI	5	4	80%	T
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah Komulatif Pertumbuhan usaha mikro dan kecil	UKM	189.780	172.260	90,77	T
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Jumlah Komulatif Pertumbuhan Anggota Koperasi	Koperasi	140750	138.143	98,15	ST
PERDAGANGAN							

6	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Jumlah Pengawasan alat ukur dan tata niaga perdagangan	Timbangan dan SPBU	450 timbangan & SPBU	737	100	ST
7	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	(US \$)	800.000	1.727.915.828	100	ST
8	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Jumlah pameran antar wilayah dalam maupun luar daerah	Pameran	2 Pameran	3	100	ST
9	PROGRAM PENINGKATAN PASAR	Jumlah Fasilitas Pasar	Pasar	7 Pasar	7	100	ST
PERINDUSTRIAN							
10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	Jumlah Kumulatif IKM yang dibina	IKM	370	370	100	ST
11	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Jumlah Kumulatif Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	IKM	7116	7.136	100	ST
12	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	Jumlah Kumulatif Sentra IKM	SENTRA IKM	106	106	100	ST
PENANAMAN MODAL							
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	98,15%	98,15%	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100,00%	100,00%	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	83,62%	83,62%	T
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100,00%	100,00%	ST

5	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah paket promosi, kebijakan dan informasi penanaman modal	paket	3 Paket	3 Paket	100,00%	ST
6	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang terverifikasi izinnya	%	75	75,00%	100,00%	ST
7	PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU	Persentase Penyelesaian Izin Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu dan Non Perizinan	%	75	78,09%	104,12%	ST
8	PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase Penyelesaian Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	%	75	96,33%	128,44%	ST
KELAUTAN DAN PERIKANAN							
DINAS PERIKANAN							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	ST
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
5	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIK SKPD	Persentase fasilitasi terhadap Pengelolaan UPT	%	100	100	100	ST
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produktivitas perikanan budidaya (ton)					
		Produktivitas lahan tambak, air payau, dan air tawar (ton)					
		a. Air Payau	TON	292	310,61	106	ST
		b. Air Tawar	TON	339	515,26	152	ST
		c. Produktivitas Garam	TON	5512	4716	86	T
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton)	TON	20.009,87	19.501	97	ST

8	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan; Konsumsi Hasil Olahan Perikanan oleh Penduduk (kg/kapita/th)	Kg/Kapita/ Thn	32,24	41,59	129	ST
9	PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (WP3K)	Persentase Kemantapan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan					
		a. Saluran tambak	%	48	53,91	112	ST
		b. Tempat Pendaratan Ikan	%	30	30	100	ST
		c. Tambatan perahu	%	30	100	333	ST
KEUANGAN							
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100%	100%	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100%	100%	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap Peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur	%	100	97%	97%	ST
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100%	100%	ST
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENGANGGARAN	Persentase Penyusunan APBD	%	100	100%	100%	ST
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	%	100	100%	100%	ST
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Persentase Cakupan Pendapatan Pajak Daerah	%	70-80	80%	99,40%	ST
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN PBB DAN BPHTB	Meningkatnya Pendapatan PBB dan BPHTB	%	5-15%	25%	168,40%	ST

9	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN INTENSIFIKASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah	%	15-20%	21%	103%	ST
10	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET DAN BARANG DAERAH	Persentase Akurasi data barang milik daerah	%	80	100%	100%	ST
SOSIAL							
DINAS SOSIAL							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100%	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100%	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100%	ST
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNIKASI ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	Rasio penanganan terhadap jumlah PMKS	%	4,73	4,17	88%	T
5	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase peningkatan pelayanan dan pelatihan bagi PMKS	%	0,24	0,34	142%	ST
6	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	Rasio penanganan penyandang disabilitas	%	2,24	3.16	141.07	ST
7	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO	Persentase Panti Asuhan yang difasilitasi	%	58,82	41,18	70%	S
8	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	Rasio penanganan eks Penyandang Penyakit Sosial	%	40	80	200%	ST
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Penanganan WRSE	%	2,58	1.86	72	S
		Jumlah Keluarga rentan yang ditangani	Orang	225	200	89	T
		Persentase data PMKS yang difasilitasi	%	100	70	70	S

10	PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	Persentase Fasilitas Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100%	ST
PENDIDIKAN							
DINAS PENDIDIKAN							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100%	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitas terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100%	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase fasilitas terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100%	ST
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitas terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100%	ST
5	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIK SKPD	Persentase fasilitas terhadap pengelolaan UPT	%	100	100	100%	ST
6	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase Jumlah lembaga kursus yang dibina	%	60-70	75	107%	ST
7	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persentase PAUD yang tersertifikasi	%	60-70	78	111%	ST
8	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat	%	98,96	98,76%	100%	ST
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;	%	108,60%	104,8%	96%	ST
		Angka Kelulusan (AL) SD dan Sederajat;	%	100%	100,0%	100%	ST
		Angka Putus Sekolah (APtS) SD dan Sederajat;	%	0,0240%	0,0174%	137%	ST
		Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;	%	97,25%	95%	98%	ST
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat ;	%	86,80%	82,43%	95%	ST
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat;	%	98,95%	93,61%	95%	ST
		Angka Kelulusan (AL) SMP sederajat;	%	100%	100,00%	100%	ST
		Angka Putus Sekolah (APtS) SMP sederajat;	%	0,11%	0,07%	157%	ST
		Angka keberlanjutan dari SMP dan sederajat ke SMA/SMK dan Sederajat	%	101,10%	106%	105%	ST

		Jumlah Produktifitas Karya Tulis Siswa;	%	2	2	100%	ST
9	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Rasio Rombongan belajar SD dan Sederajat sesuai SPM;	%	72%	73%	102%	ST
		Rasio Rombongan belajar SMP dan Sederajat sesuai SPM;	%	36%	82%	228%	ST
		Persentase Kunjungan Pengawas;	%	57%	90%	158%	ST
		Persentase Rumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);	%	46	46	100%	ST
10	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi sertifikasi;	%	91	52,83	58%	R
KESEHATAN							
DINAS KESEHATAN							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	100	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	ST
4	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	Persentase fasilitasi terhadap Pengelolaan UPT	%	100	100	100	ST
5	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu, dan Ponkesdes	%	84% Puskesmas yang dibangun, 77,9% Pustu yang dibangun, 24 % Ponkesdes yang dibangun	59,38% Puskesmas yang dibangun, 60,81% Pustu yang dibangun	70,69 % untuk capaian pembangunan puskesmas dan 78,06 % untuk capaian pembangunan	T

						puskes mas pembant u	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Keperawatan	%	100	73,02	73,02	S
7	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Cakupan pelayanan nifas	%	92%	89,14	96,89	ST
		Cakupan peyanan KN lengkap	%	95%	93,59	98,52	ST
		Persentase balita gizi kurang	%	8	4,91	61%	R
		Cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak dan remaja	%	72%	72,00	100	ST
		Cakupan Pelayanan kesehatan lansia	%	40%	65,50	164%	ST
8	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT	Persentase rumah tangga ber PHBS	%	72%	62,9	87,36	T
9	PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN OLAH RAGA	Persentase keluarga yang ber STBM	%	6%	7,02	117	ST
		Persentase puskesmas yang melakukan kesehatan kerja	%	7%	50	714,29	ST
		Persentase puskesmas yang melakukan kesehatan olahraga	%	7%	50	714,29	ST
		Persentase TTU yang bersanitasi dasar	%	50%	77	154	ST
10	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	%	92%	103,4	112,39	ST
		Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	%	82%	100	121,95	ST
		Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	%	6%	10,88	130,17	ST
		Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)		per 100.000 Jumlah Penduduk	141	157,59	111,76 ST

		Insiden / Angka kesakitan DBD	per 100.000 Jumlah Penduduk	52	16,5	168,27	ST
		Persentase kasus pemasangan yang ditangani	%	0,5	0,16	167,76	ST
11	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	Persentase puskesmas terakreditasi	%	65%	68,75	105,77	ST
		Persentase Pustu sesuai standar	%	47%	46,05	97,98	ST
		Persentase Ponkesdes sesuai standar	%	58%	58,47	100,8	ST
		Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	%	100%	100	100	ST
		Persentase RS yang memiliki ijin operasional	%	100%	100	100	ST
		Persentase penyehat tradisional terdaftar	%	62%	100	161,29	ST
12	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang Berijin	%	100%	100	100	ST
		Persentase sarana kefarmasian sesuai standar	%	70%	100	142,86	ST
		Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat	%	55%	70,48	128,14	ST
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	88%	94,01	106,83	ST
		Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar	%	28%	29,67	105,96	ST
13	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Presentase Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok	%	100	100	142,86	ST
	RSUD IBNU SINA						
1	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	72,59%	63,62%	87,64	T
		Average Lenght Of Stay (LOS)	hari	4,48 hari	4,1 hari	108,48	ST
		Turn Over Internal (TOI)	hari	1,77 hari	2,4 hari	135,59	ST
		Bed Turn Over (BTO)	kali	56,37 kali	54,9 kali	102,61	ST
		Gross Death Rate (GDR)	%	72%	74,70%	96%	ST

		Net Death Rate (NDR)	%	44%	46,78%	94%	ST
		Cost Recovery Rate (CRR)	%	73%	78,47%	108,23	ST
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76%	77,29%	101,70	ST
		Tingkat Kemandirian Keuangan	%	61,5%	65,03%	105,74	ST
2	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL DAMPAK TEMBAKAU	Presentase Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok	%	70-100%	80%	114,29	ST
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100%	100%	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100%	100%	ST
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100%	100%	ST
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100%	100%	ST
5	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB	%	10,35	15,60%	150,72%	ST
6	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;	%	1,05	0,57%	54,28%	ST
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per Desa/Kelurahan;	%	25	17,41%	69,64%	S
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah	%	≥30%	24,66%	82,20%	T
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A);	%	100%	136/136 X 100 = 100%	100%	ST

Tabel 2.41
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Daerah

No Rek	Urusan/OPD/Program/Kegiatan	Keluaran	Target Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan anggaran Renja Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN							155.312.975.690,00		116.585.991.598		964,36		162.555.884.460,00		793,70
1.01.	PENDIDIKAN							155.312.975.690,00		116.585.991.598		964,36		162.555.884.460,00		793,70
1.01.1.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			17.164.177.600,00		4.056.712.353,00		5.126.825.600,00		4.056.712.353		79,13		8.113.424.706		47,27
1.01.01.01.02.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan	24	1.484.800.000,00	24	239.111.345,00	24	242.200.000,00	24	239.111.345	100,00	98,72	48,00	478.222.690	200,00	32,21
1.01.01.01.03.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah surat kabar	5	129.948.000,00	5	14.368.000,00	5	14.448.000,00	5	14.368.000	100,00	99,45	10,00	28.736.000	200,00	22,11
1.01.01.01.05.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Tersedianya Konsumsi Makanan dan Minuman Harian Rapat dan Tamu	44	1.210.569.000,00	44	198.632.060,00	44	199.805.000,00	44	198.632.060	100,00	99,41	88,00	397.264.120	200,00	32,82

1.01. 1.01. 01.0 1.06.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Terfasilitasi nya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	305	2.039.000.600,00	305	290.773.958,00	305	325.000.600,00	305	290.773.958	100,00	89,47	610,0 0	581.547.916	200,00	28,52
1.01. 1.01. 01.0 1.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	Jasa Tenaga pengelola keuangan	7	6.744.000.000,00	7	2.324.692.000,00	7	3.234.200.000,00	7	2.324.692.000	100,00	71,88	14,00	4.649.384.000	200,00	68,94
1.01. 1.01. 01.0 1.08.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	Jasa telepon, Listr ik dan Air terpenuhi di Dinas Kesehatan, dan Terpenuhi ya Tambah Daya Listrik di Puskesmas	6	5.555.860.000,00	6	989.134.990,00	6	1.111.172.000,00	6	989.134.990	100,00	89,02	12,00	1.978.269.980	200,00	35,61
1.01 .1.0 1.01 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1.757.672.000,00		1.669.520.530,00		1.757.672.000,00		1.669.520.530		94,98		3.339.041.060		189,97
1.01. 1.01. 01.0 2.03.	PENGADAAN PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Penyediaan Alat Tulis Kantor	54	912.417.000,00	54	876.078.210,00	54	912.417.000,00	54	876.078.210	100,00	96,02	108,0 0	1.752.156.420	200,00	192,03
1.01. 1.01. 01.0 2.05.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUN G/RUMAH TANGGA	Terpelihara nya gedung	100	195.100.000,00	100	194.579.900,00	100	195.100.000,00	100	194.579.900	100,00	99,73	200,0 0	389.159.800	200,00	199,47
1.01. 1.01. 01.0 2.06.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS /OPERASIONAL	Terpelihara nya Kantor	100	425.000.000,00	100	375.528.380,00	100	425.000.000,00	100	375.528.380	100,00	88,36	200,0 0	751.056.760	200,00	176,72
1.01. 1.01. 01.0 2.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Kendaraan dinas yang siap menunjang kelancaran kerja	100	225.155.000,00	100	223.334.040,00	100	225.155.000,00	100	223.334.040	100,00	99,19	200,0 0	446.668.080	200,00	198,38
1.01 .1.0 1.01 .05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			1.618.862.000,00		79.826.000,00		100.000.000,00	-	79.826.000		79,83				
1.01. 1.01. 01.0 5.04.	MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SKPD	Pelaksanaa n Penilaian Angka Kredit	500	1.618.862.000,00	500	79.826.000,00	500	100.000.000,00	500	79.826.000	100,00	79,83	1000, 00	159.652.000	200,00	9,86

		Secara Periode														
1.01 .1.0 1.01 .06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			540.838.600,00		101.865.200,00		71.000.000,00		101.865.200		143,47		203.730.400		37,67
1.01. 1.01. 01.0 6.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Th.2016, Laporan penyerapan anggaran Dinas Pendidikan Th.2016 dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Th.2016	3	257.703.600,00	3	29.837.600,00	3	30.000.000,00	3	29.837.600	100,00	99,46	6,00	59.675.200	200,00	23,16
1.01. 1.01. 01.0 6.03.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Th.2018 dan tersusunnya Rencana Anggaran (RKA) Th.2018	2	283.135.000,00	2	72.027.600,00	3	72.027.600,00	3	72.027.600	100,00	100,00	5,00	144.055.200	250,00	50,88
1.01 .1.0 1.01 .07.	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD			11.948.903.508,77		1.239.112.516,00		1.310.000.000,00		1.239.112.516		94,59		2.478.225.032		20,74
1.01. 1.01. 01.0 7.01.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GRESIK	Tercukupinya Biaya operasional	100	527.500.000,00	100	54.073.396,00	100	60.000.000,00	100	54.073.396	100,00	90,12	200,00	108.146.792	200,00	20,50
1.01. 1.01. 01.0 7.02.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEBOMAS	Tercukupinya Biaya operasional	100	600.000.000,00	100	56.488.064,00	100	60.000.000,00	100	56.488.064	100,00	94,15	200,00	112.976.128	200,00	18,83

1.01. 1.01. 01.0 7.03.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MANYAR	Tercukupin ya Biaya operasional	100	580.000.000,00	100	59.741.385,00	100	60.000.000,00	100	59.741.385	100,00	99,57	200,0 0	119.482.770	200,00	20,60
1.01. 1.01. 01.0 7.04.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BUNGAH	Tercukupin ya Biaya operasional	100	537.500.000,00	100	57.059.560,00	100	60.000.000,00	100	57.059.560	100,00	95,10	200,0 0	114.119.120	200,00	21,23
1.01. 1.01. 01.0 7.05.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SIDAYU	Tercukupin ya Biaya operasional	100	505.000.000,00	100	58.631.092,00	100	60.000.000,00	100	58.631.092	100,00	97,72	200,0 0	117.262.184	200,00	23,22
1.01. 1.01. 01.0 7.06.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN DUKUN	Tercukupin ya Biaya operasional	100	602.500.000,00	100	59.591.100,00	100	60.000.000,00	100	59.591.100	100,00	99,32	200,0 0	119.182.200	200,00	19,78
1.01. 1.01. 01.0 7.07.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN UJUNG PANGKAH	Tercukupin ya Biaya operasional 100%	100	537.500.000,00	100	58.915.437,00	100	60.000.000,00	100	58.915.437	100,00	98,19	200,0 0	117.830.874	200,00	21,92
1.01. 1.01. 01.0 7.08.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PANCENG	Tercukupin ya Biaya operasional	100	557.500.000,00	100	58.376.606,00	100	60.000.000,00	100	58.376.606	100,00	97,29	200,0 0	116.753.212	200,00	20,94
1.01. 1.01. 01.0 7.09.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN CERME	Tercukupin ya Biaya operasional	100	655.000.000,00	100	58.787.420,00	100	60.000.000,00	100	58.787.420	100,00	97,98	200,0 0	117.574.840	200,00	17,95
1.01. 1.01. 01.0 7.10.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	Tercukupin ya Biaya operasional	100	525.000.000,00	100	54.233.910,00	100	60.000.000,00	100	54.233.910	100,00	90,39	200,0 0	108.467.820	200,00	20,66
1.01. 1.01. 01.0 7.11.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BENJENG	Tercukupin ya Biaya operasional	100	622.500.000,00	100	59.861.296,00	100	60.000.000,00	100	59.861.296	100,00	99,77	200,0 0	119.722.592	200,00	19,23
1.01. 1.01. 01.0 7.12.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BALONGPANGGA NG	Tercukupin ya Biaya operasional	100	607.500.000,00	100	59.533.346,00	100	60.000.000,00	100	59.533.346	100,00	99,22	200,0 0	119.066.692	200,00	19,60
1.01. 1.01. 01.0 7.13.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MENGANTI	Tercukupin ya Biaya operasional	100	730.000.000,00	100	54.021.356,00	100	60.000.000,00	100	54.021.356	100,00	90,04	200,0 0	108.042.712	200,00	14,80

1.01. 1.01. 01.0 7.14.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEDAMEAN	Tercukupin ya biaya operasional	100	515.000.000,00	100	57.941.830,00	100	60.000.000,00	100	57.941.830	100,00	96,57	200,0 0	115.883.660	200,00	22,50
1.01. 1.01. 01.0 7.15.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN DRIYOREJO	Tercukupin ya biaya operasional	100	767.500.000,00	100	58.238.454,00	100	60.000.000,00	100	58.238.454	100,00	97,06	200,0 0	116.476.908	200,00	15,18
1.01. 1.01. 01.0 7.16.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN WRINGINANOM	Tercukupin ya biaya operasional	100	552.500.000,00	100	59.473.630,00	100	60.000.000,00	100	59.473.630	100,00	99,12	200,0 0	118.947.260	200,00	21,53
1.01. 1.01. 01.0 7.17.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SANGKAPURA	Meningkatn ya pelayanan adminstras i	100	662.500.000,00	100	58.746.735,00	100	70.000.000,00	100	58.746.735	100,00	83,92	200,0 0	117.493.470	200,00	17,73
1.01. 1.01. 01.0 7.18.	PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TAMBAK	Tercukupin ya Biaya operasional	100	575.000.000,00	100	60.518.260,00	100	70.000.000,00	100	60.518.260	100,00	86,45	200,0 0	121.036.520	200,00	21,05
1.01. 1.01. 01.0 7.19.	PENGELOLAAN SKB	Tercukupin ya biaya operasional	100	640.000.000,00	100	98.703.608,00	100	100.000.000,00	100	98.703.608	100,00	98,70	200,0 0	197.407.216	200,00	30,84
1.01. 1.01. 01.0 7.20.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RECOURCE CENTER	Tercukupin ya Biaya operasional	100	648.903.508,77	100	96.176.031,00	100	110.000.000,00	100	96.176.031	100,00	87,43	200,0 0	192.352.062	200,00	29,64
1.01 .1.0 1.01 .15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI			4.214.487.900,00		480.261.895,00		512.506.000,00		480.261.895		93,71		960.523.790		22,79
1.01. 1.01. 01.1 5.01.	PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Terlatihnya Tenaga Pendidik PAUD Secara Maksimal	640	514.320.300,00	640	49.820.345,00	640	50.000.000,00	640	49.820.345	100,00	99,64	1280, 00	99.640.690	200,00	19,37
1.01. 1.01. 01.1 5.02.	HARI ANAK NASIONAL	Terselengga ranya Pelaksanaa n Hari Anak Nasional dengan Lancar	100	1.790.971.000,00	100	99.943.300,00	100	100.000.000,00	100	99.943.300	100,00	99,94	200,0 0	199.886.600	200,00	11,16

1.01. 1.01. 01.1 5.03.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BOP TK, RA DAN KOBAR	Sosialisasi Pembinaan, Pendamping an Proses Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Kepala Sekolah	1525	623.980.000,00	1525	77.284.500,00	152 5	81.105.000,00	1.52 5	77.284.500	100,00	95,29	3050, 00	154.569.000	200,00	24,77
1.01. 1.01. 01.1 5.07.	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI RENCANA KERJA PAUD	1. Penyusunan dokumen Rencana Kerja PAUD 2. Peserta Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi PAUD	96	247.358.600,00	96	64.693.000,00	96	64.693.000,00	96	64.693.000	100,00	100,00	192,0 0	129.386.000	200,00	52,31
1.01. 1.01. 01.1 5.08.	PENGEMBANGAN DAN PENATAAN SISTEM PENDATAAN PAUD	Adanya Sistem Aplikasi, dokumen dan Kegiatan yang mendukung kelengkap an data PAUD	1	798.299.000,00	1	74.421.300,00	1	102.149.000,00	1	74.421.300	100,00	72,86	2,00	148.842.600	200,00	18,64

1.01. 1.01. 01.1 5.09.	PENINGKATAN PENDIDIKAN PAUD BERBASIS LINGKUNGAN	1. Peserta mampu melaksanak an pembalajara n bagi Anak PAUD berbasis lingkungan 2. Peserta mampu membuat APE alternatif dan merancang permainan tradisional menggunak an media dan bahan dari lingkungan alam sekitar.	480	239.559.000,00	480	114.099.450,00	480	114.559.000,00	-	114.099.450	0,00	99,60	480,0 0	228.198.900	100,00	95,26
1.01 .1.0 1.01 .16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN			41.717.071.740,00		38.502.246.368,0 0		41.717.071.740,00		38.502.246.368		92,29		77.004.492.736		184,59
1.01. 1.01. 01.1 6.01.	PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)	Terlaksanan ya PMT-AS	30	500.000.000,00	30	0,00	30	500.000.000,00	-	-	0,00	-	30,00	-	100,00	-
1.01. 1.01. 01.1 6.02.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM INDONESIA PINTAR	Kepala Sekolah dan Petugas Program Indonesia Pintar	220	63.650.000,00	220	56.700.950,00	220	63.650.000,00	220	56.700.950	100,00	89,08	440,0 0	113.401.900	200,00	178,16
1.01. 1.01. 01.1 6.03.	PELATIHAN PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	Terlaksanan ya secara maksimal pendidikan anak berkebutuh an khusus	200	58.000.000,00	200	0,00	200	58.000.000,00	-	-	0,00	-	200,0 0	-	100,00	-
1.01. 1.01. 01.1 6.04.	OPERASI SAYANG SISWA	Terlaksanan ya Operasi Sayang Siswa	8	28.000.000,00	8	27.965.350,00	8	28.000.000,00	8	27.965.350	100,00	99,88	16,00	55.930.700	200,00	199,75

1.01. 1.01. 01.1 6.05.	PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI	Terlaksanan ya Pelatihan Siswa Sd/Mi, SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA	578	250.000.000,00	578	228.490.100,00	578	250.000.000,00	578	228.490.100	100,00	91,40	1156, 00	456.980.200	200,00	182,79
1.01. 1.01. 01.1 6.07.	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMPTN	Terlaksanan ya penyaluran dana BOS	425	35.851.577.500,00	425	34.538.470.500,00	425	35.851.577.500,00	425	34.538.470.500	100,00	96,34	850,0 0	69.076.941.000	200,00	192,67
1.01. 1.01. 01.1 6.08.	LOMBA BINA KREATIFITAS ANAK SD/SDLB	Terlaksanan ya Penilaian Lomba Bina Kreatifitas Siswa Se- Kabupaten	250	50.000.000,00	250	47.566.570,00	250	50.000.000,00	250	47.566.570	100,00	95,13	500,0 0	95.133.140	200,00	190,27
1.01. 1.01. 01.1 6.09.	PEKAN OLAHRAGA SD/MI	Atlit Siswa/Peser ta berprestasi	150	280.000.000,00	150	278.043.613,00	150	280.000.000,00	-	278.043.613	0,00	99,30	150,0 0	556.087.226	100,00	198,60
1.01. 1.01. 01.1 6.10.	SOSIALISASI DAN PENYELENGGAR AAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDART NASIONAL (UASBN)	Peserta Sosialisasi dapat memahami Penyelengga raan Ujian Sekolah SD/MI agar berjalan dengan lancar aman dan tertib	2050 0	789.535.000,00	2050 0	768.604.810,00	205 00	789.535.000,00	20.5 00	768.604.810	100,00	97,35	41000 ,00	1.537.209.620	200,00	194,70
1.01. 1.01. 01.1 6.11.	PELATIHAN INOVASI PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Inovasi Pembelajara n Mata Pelajaran	300	45.000.000,00	300	44.429.250,00	300	45.000.000,00	300	44.429.250	100,00	98,73	600,0 0	88.858.500	200,00	197,46
1.01. 1.01. 01.1 6.12.	SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN MANAJEMEN GUGUS	Terlaksanan ya Pembinaan Gugus di Kecamatan	53	73.000.000,00	53	65.180.100,00	53	73.000.000,00	-	65.180.100	0,00	89,29	53,00	130.360.200	100,00	178,58
1.01. 1.01. 01.1 6.13.	PENGLOLAAN DAN ANALISIS BANTUAN BEA SISWA MISKIN	Petugas Pengelolaan dan Analisis Data Bantuan Miskin (BSM SD)	440	168.370.000,00	440	133.698.200,00	440	168.370.000,00	440	133.698.200	100,00	79,41	880,0 0	267.396.400	200,00	158,81

1.01. 1.01. 01.1 6.15.	PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)	Terlaksanan ya PPDB dengan baik dan lancar	1120 0	488.791.000,00	1120 0	451.002.900,00	112 00	488.791.000,00	11.2 00	451.002.900	100,00	92,27	22400 ,00	902.005.800	200,00	184,54
1.01. 1.01. 01.1 6.17.	PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH	Terlaksanan ya secara maksimal pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah	100	150.000.000,00	100	135.388.000,00	100	150.000.000,00	100	135.388.000	100,00	90,26	200,0 0	270.776.000	200,00	180,52
1.01. 1.01. 01.1 6.18.	PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTS NEGERI/SWASTA	Terlaksanan ya ujian nasional SMP/MTs Negeri/Swa sta dengan baik dan lancar	9400	271.956.000,00	9400	105.457.075,00	940 0	271.956.000,00	9.40 0	105.457.075	100,00	38,78	18800 ,00	210.914.150	200,00	77,55
1.01. 1.01. 01.1 6.19.	PENYELENGGAR AAN KOMPETISI OLAH RAGA BAGI PELAJAR	Terlaksanan ya Kompetisi Atlit Siswa/Pelaj ar Berprestasi	100	200.000.000,00	100	148.406.645,00	100	200.000.000,00	100	148.406.645	100,00	74,20	200,0 0	296.813.290	200,00	148,41
1.01. 1.01. 01.1 6.23.	LOMBA MATA PELAJARAN SEKOLAH LUAR BIASA (LMP SLB)	Terlaksanan ya Lomba OSN dan Jambore Bagi Siswa SLB	100	150.000.000,00	100	0,00	100	150.000.000,00	-	-	0,00	-	100,0 0	-	100,00	-
1.01. 1.01. 01.1 6.24.	PEKAN SENI PELAJAR	Terlaksanan ya Kegiatan FLS2N dan Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi	130	100.000.000,00	130	98.923.315,00	130	100.000.000,00	130	98.923.315	100,00	98,92	260,0 0	197.846.630	200,00	197,85
1.01. 1.01. 01.1 6.25.	PEKAN OLAH RAGA PELAJAR	Atlit Siswa/Peser ta Berprestasi dan Terlaksanan ya Bola Volly Piala Gubernur	9	90.000.000,00	9	0,00	9	90.000.000,00	-	-	0,00	-	9,00	-	100,00	-

1.01. 1.01. 01.1 6.26.	PEMBINAAN LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) DAN LOMBA KREATIFITAS SISWA	Terpilihnya Siswa Calon Peserta Lomba Tk. Propinsi dan Nasional masing - masing mata pelajaran/ bidang LKS Jawara	900	1.275.712.240,00	900	682.433.680,00	900	1.275.712.240,00	900	682.433.680	100,00	53,49	1800, 00	1.364.867.360	200,00	106,99
1.01. 1.01. 01.1 6.27.	LOMBA SISWA BERPRESTASI	Terlaksanan ya Lomba Siswa Berprestasi SD/MI, SMP-SMA, Penulisan Naskah dan Fragmen Budi Pekerti, Debat Bhs. Inggris dan Debat Bhs. Indonesia	578	250.000.000,00	578	199.302.250,00	578	250.000.000,00	578	199.302.250	100,00	79,72	1156, 00	398.604.500	200,00	159,44
1.01. 1.01. 01.1 6.28.	PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BOS (BOS APBD)	Dana BOS digunakan sesuai aturan yang ada	1065	174.480.000,00	1065	152.216.375,00	106 5	174.480.000,00	1.06 5	152.216.375	100,00	87,24	2130, 00	304.432.750	200,00	174,48
1.01. 1.01. 01.1 6.29.	PENYUSUNAN FORMAT RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH	Terlaksanan ya Kegiatan Penyusunan dan Verifikasi RAPBS	430	159.000.000,00	430	155.655.600,00	430	159.000.000,00	430	155.655.600	100,00	97,90	860,0 0	311.311.200	200,00	195,79
1.01. 1.01. 01.1 6.30.	LOMBA KARYA CIPTA DAN PENELITIAN ILMIAH PELAJAR	Terwadahi dan berkembang nya Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa Sesuai Kemampua n dan Bidang yang diminati	100	250.000.000,00	100	184.311.085,00	100	250.000.000,00	100	184.311.085	100,00	73,72	200,0 0	368.622.170	200,00	147,45
1.01 .1.0 1.01 .17.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL			455.798.850,00		0,00		487.124.550,00		452.308.050		92,85		452.308.050		99,23

1.01. 1.01. 01.1 7.02.	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN	Terbinanya Pengelola Kursus dan Lembaga dengan baik	35	81.647.700,00	35	0,00	35	77.666.400,00	-	77.666.400	0,00	100,00	35,00	77.666.400	100,00	95,12
1.01. 1.01. 01.1 7.03.	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	Peserta Pembinaan dalam Kegiatan Hari Aksara Internasion al	160	35.307.000,00	160	0,00	160	70.614.000,00	160	70.614.000	100,00	100,00	320,0 0	70.614.000	200,00	200,00
1.01. 1.01. 01.1 7.04.	PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL	Penyebaran Informasi Pendidikan melalui Siaran Radio	53	72.755.000,00	53	0,00	53	72.755.000,00	53	44.705.000	100,00	61,45	106,0 0	44.705.000	200,00	61,45
1.01. 1.01. 01.1 7.05.	PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C	Tercapainya Angka Partisipasi Kelulusan Wajar 12 tahun	821	50.000.000,00	821	0,00	821	50.000.000,00	821	49.322.000	100,00	98,64	1642, 00	49.322.000	200,00	98,64
1.01. 1.01. 01.1 7.06.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPA/TPQ/MADIN	Dana BOP dapat dimanfaatk an sesuai dengan Petunjuk Teknis	1780	84.874.000,00	1780	0,00	178 0	84.874.000,00	1.78 0	82.333.900	100,00	97,01	3560, 00	82.333.900	200,00	97,01
1.01. 1.01. 01.1 7.07.	JAMBORE PTK PAUDNI	Peserta Lomba Karya Nyta dan Karya Tulis	60	31.215.150,00	60	0,00	60	31.215.150,00	60	31.215.150	100,00	100,00	120,0 0	31.215.150	200,00	100,00
1.01. 1.01. 01.1 7.09.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL MADARASAH DINIYAH	Pembinaan dan Pengendalia n Madin dan Guru Swasta	1092	100.000.000,00	1092	0,00	109 2	100.000.000,00	1.09 2	96.451.600	100,00	96,45	2184, 00	96.451.600	200,00	96,45
1.01 .1.0 1.01 .18.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN			68.691.423.600,00		0,00		103.214.321.200,00		68.713.889.831		66,57		68.713.889.831		100,03

1.01. 1.01. 01.1 8.03.	PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN	Pendayagun aan petugas dalam mengoperas ikan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	602	246.000.000,00	602	0,00	602	246.000.000,00	602	220.266.360	100,00	89,54	1204, 00	220.266.360	200,00	89,54
1.01. 1.01. 01.1 8.04.	PEMBUATAN PROFIL PENDIDIKAN	Pendayagun aan petugas dalam rangka penyusunan Buku Profil Pendidikan & Buku Pintar	110	50.000.000,00	110	0,00	110	50.000.000,00	110	43.679.300	100,00	87,36	220,0 0	43.679.300	200,00	87,36
1.01. 1.01. 01.1 8.05.	PENGEMBANGAN STANDART MANAJEMEN DINAS PENDIDIKAN	Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008	28	51.500.000,00	28	0,00	28	51.500.000,00	28	51.425.000	100,00	99,85	56,00	51.425.000	200,00	99,85
1.01. 1.01. 01.1 8.06.	PENGEMBANGAN JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL	Pemeliharaa an BTS Jardiknas dan jaringan di lingkungan Dinas Pendidikan	100	177.700.000,00	100	0,00	100	177.700.000,00	100	166.827.203	100,00	93,88	200,0 0	166.827.203	200,00	93,88
1.01. 1.01. 01.1 8.08.	OPERASIONAL HIBAH UNTUK PENDIDIKAN USIA DINI, PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Monitoring dan evaluasi penerima dana hibah daerah untuk lembaga pendidikan swasta, Sosialisasi pelaksanaa n dana hibah daerah untuk lembaga pendidikan swasta dan Monitoring dan evaluasi awal lembaga calon penerima untuk lembaga	100	111.500.000,00	100	0,00	100	111.500.000,00	100	77.905.900	100,00	69,87	200,0 0	77.905.900	200,00	69,87

		pendidikan swasta														
1.01. 1.01. 01.1 8.09.	PENGEMBANGAN SISTEM PENDATAAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		1175	303.844.200,00	1175	0,00	1175	303.844.200,00	1.175	270.590.275	100,00	89,06	2350,00	270.590.275	200,00	89,06
1.01. 1.01. 01.1 8.10.	OLIMPIADE TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	Terlaksananya Olimpiade Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan bagi Siswa dan Guru	150	103.000.000,00	150	0,00	150	103.000.000,00	-	-	0,00	-	150,00	-	100,00	-
1.01. 1.01. 01.1 8.11.	PEMBINAAN DESA BERWAWASAN PENDIDIKAN	Pembinaan Desa Berwawasan Pendidikan	16	124.000.000,00	16	0,00	16	124.000.000,00	-	80.812.480	0,00	65,17	16,00	80.812.480	100,00	65,17
1.01. 1.01. 01.1 8.12.	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan	390	10.152.657.000,00	390	0,00	390	10.153.000.000,00	-	3.008.732.325	0,00	29,63	390,00	3.008.732.325	100,00	29,63
1.01. 1.01. 01.1 8.13.	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan	20	4.495.073.000,00	20	0,00	20	4.495.000.000,00	-	1.337.995.713	0,00	29,77	20,00	1.337.995.713	100,00	29,77
1.01. 1.01. 01.1 8.15.	PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH BIDANG PENDIDIKAN	Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan dan Pengadaan Sarpras, dan Peningkatan Mutu Pendidikan	105	35.785.225.000,00	105		105	35.785.225.000,00	70	35.259.310.925	66,72	98,53	175,06	35.259.310.925	166,72	98,53
1.01. 1.01. 01.1 8.16.	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	Tersedianya Meubelair Sekolah	8	1.262.597.400,00	8	0,00	16	35.785.225.000,00	16	12.499.880.800	100,00	34,93	24,00	12.499.880.800	300,00	990,01
1.01. 1.01.	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	Media Pembelajaran	89	1.262.597.400,00	89	0,00	89	1.262.597.400,00	89	1.254.855.000	100,00	99,39	178,00	1.254.855.000	200,00	99,39

01.1 8.17.																
1.01. 1.01. 01.1 8.18.	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	Rehabilitasi Gedung dan sarana peningkatan Mutu Pendidikan	105	14.565.729.600,00	105	0,00	105	14.565.729.600,00	105	14.441.608.550	100,00	99,15	210,0 0	14.441.608.550	200,00	99,15
1.01 .1.0 1.01 .19.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			1.411.573.400		-		1.016.454.600		1.290.248.855		126,94		1.290.248.855		91,41
1.01. 1.01. 01.1 9.01.	PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU	Telaksanan ya Pembinaan Guru Pasca Uji Kompetensi Guru (UKG)	750	500.000.000,00	750	0,00	750	500.000.000,00	-	361.610.425	0,00	72,32	750,0 0	361.610.425	100,00	72,32
1.01. 1.01. 01.1 9.02.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Validasi Data Kepegawaia n	1	55.315.800,00	1	0,00	1	55.315.800,00	1	47.526.400	100,00	85,92	2,00	47.526.400	200,00	85,92
1.01. 1.01. 01.1 9.03.	JURNAL PENDIDIKAN	Pengemban gan keprofesian berkelanjut an	4	26.720.600,00	4	0,00	4	26.720.600,00	4	26.657.000	100,00	99,76	8,00	26.657.000	200,00	99,76
1.01. 1.01. 01.1 9.04.	PEMBINAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS	Guru yang profesional	80	74.585.800,00	80	0,00	80	74.585.800,00	80	74.223.700	100,00	99,51	160,0 0	74.223.700	200,00	99,51
1.01. 1.01. 01.1 9.05.	PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEUNGULAN LOKAL	Sekolah berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan keunggulan lokal	18	109.832.400,00	18	0,00	18	109.832.400,00	18	109.482.650	100,00	99,68	36,00	109.482.650	200,00	99,68

1.01. 1.01. 01.1 9.06.	LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, pembinaan, seleksi Guru Prestasi, OSN Guru, FIG, Best Practice KKG/MGMP , PTK	245	250.000.000,00	245	0,00	245	250.000.000,00	245	134.949.200	100,00	53,98	490,0 0	134.949.200	200,00	53,98
	Pengembangan Kapasitas Penerapan Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Pkpspm Diknas)	Terkaksana kannya Pengemban gan Kapasitas Penerapan Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Pkpspm Diknas)	100	375.118.800,00	100	0,00	100		100	267.899.740	100,00	-	200,0 0	267.899.740	200,00	71,42
	Pelaksanaan Hari Guru	Terlaksana nya Peringatan Hari Guru	100	20.000.000,00	100	0,00	100		-	267.899.740	0,00	-	100,0 0	267.899.740	100,00	1.339,5 0
1.02 .01.	DINAS KESEHATAN							135.808.864.700,00		30.610.784.301,06		-		61.133.487.713,12		508,85
1.02 .	KESEHATAN							135.808.864.700,00		30.610.784.301,06				61.133.487.713,12		508,85
1.02 .1.0 2.01 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			7.714.988.950		2.946.918.718		7.714.988.950		2.946.918.718		38,20		5.893.837.436		76,39
1.02. 1.02. 01.0 1.02.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAA n	Persentase barang cetakan dan penggandaan	100	187.454.000	100	22.140.600	100	187.454.000,00	100	22.140.600	100,00	11,81	200,0 0	44.281.200	200,00	23,62
1.02. 1.02. 01.0 1.03.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UN DANGAN	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	100	9.500.000	100	2.544.000	100	9.500.000,00	100	2.544.000	100,00	26,78	200,0 0	5.088.000	200,00	53,56
1.02. 1.02. 01.0 1.05.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Persentase penyediaan makanan dan minuman	100	190.000.000	100	79.460.000	100	190.000.000,00	100	79.460.000	100,00	41,82	200,0 0	158.920.000	200,00	83,64

1.02. 1.02. 01.0 1.06.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi	100	247.167.250	100	72.815.973	100	247.167.250,00	100	72.815.973	100,00	29,46	200,0 0	145.631.946	200,00	58,92
1.02. 1.02. 01.0 1.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	Persentase penyediaan jasa administras i perkantoran	100	6.672.937.700	100	2.653.764.480	100	6.672.937.700,00	100	2.653.764.480	100,00	39,77	200,0 0	5.307.528.960	200,00	79,54
1.02. 1.02. 01.0 1.08.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	Persentase jasa operasional perkantoran	100	407.930.000	100	116.193.665	100	407.930.000,00	100	116.193.665	100,00	28,48	200,0 0	232.387.330	200,00	56,97
1.02 .1.0 2.01 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			3.344.070.350		546.561.600		3.344.070.350		546.561.600		16,34		1.093.123.200		32,69
1.02. 1.02. 01.0 2.03.	PENGADAAN PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Persentase pengadaan peralatan/p erlengkapan kantor/rum ah tangga	100	2.167.338.600	100	428.611.300	100	2.167.338.600,00	100	428.611.300	100,00	19,78	200,0 0	857.222.600	200,00	39,55
1.02. 1.02. 01.0 2.06.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS /OPERASIONAL	Persentase pemeliharaa n rutin/berka la kendaraan jabatan/din as/operasio nal	100	332.500.000	100	58.753.000	100	332.500.000,00	100	58.753.000	100,00	17,67	200,0 0	117.506.000	200,00	35,34
1.02. 1.02. 01.0 2.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Persentase pemeliharaa n rutin/berka la kantor/rum ah tangga	100	844.231.750	100	59.197.300	100	844.231.750,00	100	59.197.300	100,00	7,01	200,0 0	118.394.600	200,00	14,02
1.02 .1.0 2.01 .06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			382.665.700		141.254.200		382.665.700		141.254.200		36,91		282.508.400		73,83
1.02. 1.02. 01.0 6.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan	100	28.135.300	100	19.087.200	100	28.135.300,00	100	19.087.200	100,00	67,84	200,0 0	38.174.400	200,00	135,68

1.02. 1.02. 01.0 6.03.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	Persentase dokumen perencanaan	100	92.567.900	100	51.710.000	100	92.567.900,00	100	51.710.000	100,00	55,86	200,0 0	103.420.000	200,00	111,72
1.02. 1.02. 01.0 6.08.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD	Persentase dokumen evaluasi program dan kegiatan	100	77.662.500	100	13.154.000	100	77.662.500,00	100	13.154.000	100,00	16,94	200,0 0	26.308.000	200,00	33,87
1.02. 1.02. 01.0 6.09.	PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR PELAYANAN KESEHATAN	Persentase puskesmas yang menerapkan SIKDA generik	9	184.300.000	9	57.303.000	9	184.300.000,00	9	57.303.000	100,00	31,09	18,00	114.606.000	200,00	62,18
1.02 .1.0 2.01 .07.	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD			3.765.990.000		910.497.197		3.765.990.000		910.497.197		24,18		1.820.994.394		48,35
1.02. 1.02. 01.0 7.21.	PENGELOLAAN PUSKESMAS ALON - ALON	Persentase terpenuhinya operasional puskesmas	100	142.500.000	100	54.360.843	100	142.500.000,00	100	54.360.843	100,00	38,15	200,0 0	108.721.686	200,00	76,30
1.02. 1.02. 01.0 7.22.	PENGELOLAAN PUSKESMAS NELAYAN	Persentase terpenuhinya operasional puskesmas	100	84.787.500	100	33.887.943	100	84.787.500,00	100	33.887.943	100,00	39,97	200,0 0	67.775.886	200,00	79,94
1.02. 1.02. 01.0 7.23.	PENGELOLAAN PUSKESMAS INDUSTRI	Persentase terpenuhinya operasional puskesmas	100	82.650.000	100	24.725.100	100	82.650.000,00	100	24.725.100	100,00	29,92	200,0 0	49.450.200	200,00	59,83
1.02. 1.02. 01.0 7.24.	PENGELOLAAN PUSKESMAS KEBOMAS	Persentase terpenuhinya operasional puskesmas	100	84.217.500	100	30.169.353	100	84.217.500,00	100	30.169.353	100,00	35,82	200,0 0	60.338.706	200,00	71,65
1.02. 1.02. 01.0 7.25.	PENGELOLAAN PUSKESMAS GENDING	Persentase terpenuhinya operasional puskesmas	100	72.532.500	100	14.960.074	100	72.532.500,00	100	14.960.074	100,00	20,63	200,0 0	29.920.148	200,00	41,25
1.02. 1.02. 01.0 7.26.	PENGELOLAAN PUSKESMAS MANYAR	Persentase terpenuhinya operasional puskesmas	100	77.900.000	100	26.973.903	100	77.900.000,00	100	26.973.903	100,00	34,63	200,0 0	53.947.806	200,00	69,25
1.02. 1.02. 01.0 7.27.	PENGELOLAAN PUSKESMAS SEMBAYAT	Persentase terpenuhinya operasional puskesmas	100	59.707.500	100	15.557.997	100	59.707.500,00	100	15.557.997	100,00	26,06	200,0 0	31.115.994	200,00	52,11

1.02. 1.02. 01.0 7.28.	PENGELOLAAN PUSKESMAS SUKOMULYO	Persentase terpenuhiny a operasional puskesmas	100	81.225.000	100	35.233.740	100	81.225.000,00	100	35.233.740	100,00	43,38	200,0 0	70.467.480	200,00	86,76
1.02. 1.02. 01.0 7.29.	PENGELOLAAN PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN	Persentase terpenuhiny a operasional puskesmas	100	101.365.000	100	35.460.627	100	101.365.000,00	100	35.460.627	100,00	34,98	200,0 0	70.921.254	200,00	69,97
1.02. 1.02. 01.0 7.30.	PENGELOLAAN PUSKESMAS CERME	Persentase terpenuhiny a operasional puskesmas	100	104.737.500	100	48.127.037	100	104.737.500,00	100	48.127.037	100,00	45,95	200,0 0	96.254.074	200,00	91,90
1.02. 1.02. 01.0 7.31.	PENGELOLAAN PUSKESMAS DADAP KUNING	Persentase terpenuhiny a operasional puskesmas	100	52.582.500	100	18.661.413	100	52.582.500,00	100	18.661.413	100,00	35,49	200,0 0	37.322.826	200,00	70,98
1.02. 1.02. 01.0 7.32.	PENGELOLAAN PUSKESMAS BALONGPANGGA NG	Persentase terpenuhiny a operasional puskesmas	100	88.492.500	100	28.121.191	100	88.492.500,00	100	28.121.191	100,00	31,78	200,0 0	56.242.382	200,00	63,56
1.02. 1.02. 01.0 7.33.	PENGELOLAAN PUSKESMAS DAPET	Persentase terpenuhiny a operasional puskesmas	100	52.250.000	100	9.681.736	100	52.250.000,00	100	9.681.736	100,00	18,53	200,0 0	19.363.472	200,00	37,06
1.02. 1.02. 01.0 7.34.	PENGELOLAAN PUSKESMAS BENJENG	Persentase terpenuhiny a operasional puskesmas	100	71.725.000	100	33.354.118	100	71.725.000,00	100	33.354.118	100,00	46,50	200,0 0	66.708.236	200,00	93,01
1.02. 1.02. 01.0 7.35.	PENGELOLAAN PUSKESMAS METATU	Persentase terpenuhiny a operasional puskesmas	100	56.240.000	100	20.828.059	100	56.240.000,00	100	20.828.059	100,00	37,03	200,0 0	41.656.118	200,00	74,07
1.02. 1.02. 01.0 7.36.	PENGELOLAAN PUSKESMAS MENGANTI	Persentase terpenuhiny a operasional puskesmas	100	71.250.000	100	18.934.618	100	71.250.000,00	100	18.934.618	100,00	26,57	200,0 0	37.869.236	200,00	53,15
1.02. 1.02. 01.0 7.37.	PENGELOLAAN PUSKESMAS KEPATIHAN	Persentase terpenuhiny a operasional puskesmas	100	51.300.000	100	15.884.390	100	51.300.000,00	100	15.884.390	100,00	30,96	200,0 0	31.768.780	200,00	61,93
1.02. 1.02. 01.0 7.38.	PENGELOLAAN PUSKESMAS KEDAMEAN	Persentase terpenuhiny a operasional puskesmas	100	56.525.000	100	19.481.101	100	56.525.000,00	100	19.481.101	100,00	34,46	200,0 0	38.962.202	200,00	68,93
1.02. 1.02. 01.0 7.39.	PENGELOLAAN PUSKESMAS SLEMPIT	Persentase terpenuhiny a	100	51.775.000	100	21.725.941	100	51.775.000,00	100	21.725.941	100,00	41,96	200,0 0	43.451.882	200,00	83,92

		operasional puskesmas														
1.02. 1.02. 01.0 7.40.	PENGELOLAAN PUSKESMAS DRIYOREJO	Persentase terpenuhi a operasional puskesmas	100	109.440.000	100	20.963.145	100	109.440.000,00	100	20.963.145	100,00	19,15	200,0 0	41.926.290	200,00	38,31
1.02. 1.02. 01.0 7.41.	PENGELOLAAN PUSKESMAS KARANGANDONG	Persentase terpenuhi a operasional puskesmas	100	51.157.500	100	12.977.408	100	51.157.500,00	100	12.977.408	100,00	25,37	200,0 0	25.954.816	200,00	50,74
1.02. 1.02. 01.0 7.42.	PENGELOLAAN PUSKESMAS WRINGINANOM	Persentase terpenuhi a operasional puskesmas	100	87.875.000	100	18.666.271	100	87.875.000,00	100	18.666.271	100,00	21,24	200,0 0	37.332.542	200,00	42,48
1.02. 1.02. 01.0 7.43.	PENGELOLAAN PUSKESMAS KESAMBEN KULON	Persentase terpenuhi a operasional puskesmas	100	76.950.000	100	28.672.864	100	76.950.000,00	100	28.672.864	100,00	37,26	200,0 0	57.345.728	200,00	74,52
1.02. 1.02. 01.0 7.44.	PENGELOLAAN PUSKESMAS BUNGAH	Persentase terpenuhi a operasional puskesmas	100	110.200.000	100	32.388.821	100	110.200.000,00	100	32.388.821	100,00	29,39	200,0 0	64.777.642	200,00	58,78
1.02. 1.02. 01.0 7.45.	PENGELOLAAN PUSKESMAS DUKUN	Persentase terpenuhi a operasional puskesmas	100	65.977.500	100	30.698.000	100	65.977.500,00	100	30.698.000	100,00	46,53	200,0 0	61.396.000	200,00	93,06
1.02. 1.02. 01.0 7.46.	PENGELOLAAN PUSKESMAS MENTARAS	Persentase terpenuhi a operasional puskesmas	100	72.200.000	100	25.767.266	100	72.200.000,00	100	25.767.266	100,00	35,69	200,0 0	51.534.532	200,00	71,38
1.02. 1.02. 01.0 7.47.	PENGELOLAAN PUSKESMAS SIDAYU	Persentase terpenuhi a operasional puskesmas	100	96.900.000	100	47.307.586	100	96.900.000,00	100	47.307.586	100,00	48,82	200,0 0	94.615.172	200,00	97,64
1.02. 1.02. 01.0 7.48.	PENGELOLAAN PUSKESMAS UJUNG PANGKAH	Persentase terpenuhi a operasional puskesmas	100	87.210.000	100	26.502.432	100	87.210.000,00	100	26.502.432	100,00	30,39	200,0 0	53.004.864	200,00	60,78
1.02. 1.02. 01.0 7.49.	PENGELOLAAN PUSKESMAS SEKAPUK	Persentase terpenuhi a operasional puskesmas	100	56.050.000	100	20.335.134	100	56.050.000,00	100	20.335.134	100,00	36,28	200,0 0	40.670.268	200,00	72,56
1.02. 1.02. 01.0 7.50.	PENGELOLAAN PUSKESMAS PANCENG	Persentase terpenuhi a operasional puskesmas	100	87.400.000	100	33.905.715	100	87.400.000,00	100	33.905.715	100,00	38,79	200,0 0	67.811.430	200,00	77,59

1.02. 1.02. 01.0 7.51.	PENGELOLAAN PUSKESMAS SANGKAPURA	Persentase terpenuhiny a operasional puskesmas	100	84.217.500	100	28.205.701	100	84.217.500,00	100	28.205.701	100,00	33,49	200,0 0	56.411.402	200,00	66,98
1.02. 1.02. 01.0 7.52.	PENGELOLAAN PUSKESMAS TAMBAK	Persentase terpenuhiny a operasional puskesmas	100	77.900.000	100	29.035.170	100	77.900.000,00	100	29.035.170	100,00	37,27	200,0 0	58.070.340	200,00	74,54
1.02. 1.02. 01.0 7.53.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RS. BAWEAN	Persentase terpenuhiny a operasional RS Bawean	100	1.258.750.000	100	48.942.500	100	1.258.750.000,00	100	48.942.500	100,00	3,89	200,0 0	97.885.000	200,00	7,78
1.02 .1.0 2.01 .15.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PU SKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA			16.867.800.000		21.530.000		16.867.800.000		21.530.000		0,13		43.060.000		0,26
1.02. 1.02. 01.1 5.01.	PEMBANGUNAN PUSKESMAS	Persentase pembangun an Puskesmas	62,5 0%	10.000.000.000	62,5 0%	0	62,5 0%	10.000.000.000,00	-	-	0,00	-	0,63	-	100,00	-
1.02. 1.02. 01.1 5.02.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS	Persentase pemeliharaa n rutin/berka la sarana dan prasarana Puskesmas	100	250.000.000	100	0	100	250.000.000,00	-	-	0,00	-	100,0 0	-	100,00	-
1.02. 1.02. 01.1 5.04.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100	2.022.800.000	100	21.530.000	100	2.022.800.000,00	100	21.530.000	100,00	1,06	200,0 0	43.060.000	200,00	2,13
1.02. 1.02. 01.1 5.05.	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PELAYANAN DASAR	Persentase pengelolaan dana alokasi khusus bidang pelayanan dasar	100	4.595.000.000	100	0	100	4.595.000.000,00	-	-	0,00	-	100,0 0	-	100,00	-
1.02 .1.0 2.01 .16.	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENDIDIKAN TINGGI			2.687.989.850		288.729.360		2.687.989.850		288.729.360		10,74		577.458.720		21,48

1.02. 1.02. 01.1 6.01.	PROSES BELAJAR MENGAJAR	Jumlah lulusan Akper	116	980.537.750	116	0	116	980.537.750,00	-	-	0,00	-	116,0 0	-	100,00	-
1.02. 1.02. 01.1 6.02.	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Buku literatur yang tersedia	4860	39.064.000	4860	0	486 0	39.064.000,00	-	-	0,00	-	4860, 00	-	100,00	-
1.02. 1.02. 01.1 6.03.	PEMBANGUNAN/ PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Jumlah sarana penunjang proses belajar mengajar	3	494.950.000	3	13.105.400	3	494.950.000,00	3	13.105.400	100,00	2,65	6,00	26.210.800	200,00	5,30
1.02. 1.02. 01.1 6.04.	PENGEMBANGAN SDM	Jumlah kegiatan pengemban gan SDM	7	150.513.250	7	6.750.000	7	150.513.250,00	7	6.750.000	100,00	4,48	14,00	13.500.000	200,00	8,97
1.02. 1.02. 01.1 6.05.	PENGELOLAAN AKPER	Persentase pengeloan Akper	100	1.022.924.850	100	268.873.960	100	1.022.924.850,00	100	268.873.960	100,00	26,28	200,0 0	537.747.920	200,00	52,57
1.02 .1.0 2.01 .17.	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT			20.811.554.550		3.637.362.513		20.811.554.550		3.637.362.513		17,48		7.274.725.026		34,96
1.02. 1.02. 01.1 7.01.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	90	579.500.000	90	147.550.550	90	579.500.000,00	90	147.550.550	100,00	25,46	180,0 0	295.101.100	200,00	50,92
1.02. 1.02. 01.1 7.02.	PENGELOLAAN DAK JAMPERSAL (DAK)	Persentase Terlaksanan ya Program Jampersal di Kabupaten Gresik	100	4.171.289.000	100	6.768.000	100	4.171.289.000,00	100	6.768.000	100,00	0,16	200,0 0	13.536.000	200,00	0,32
1.02. 1.02. 01.1 7.03.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS ALON - ALON	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Alon-Alon	100	562.000.000	100	56.589.000	100	562.000.000,00	100	56.589.000	100,00	10,07	200,0 0	113.178.000	200,00	20,14
1.02. 1.02. 01.1 7.04.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS NELAYAN	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Nelayan	100	403.417.000	100	83.591.000	100	403.417.000,00	100	83.591.000	100,00	20,72	200,0 0	167.182.000	200,00	41,44
1.02. 1.02. 01.1 7.05.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS INDUSTRI	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Industri	100	528.932.000	100	79.835.300	100	528.932.000,00	100	79.835.300	100,00	15,09	200,0 0	159.670.600	200,00	30,19

1.02. 1.02. 01.1 7.06.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS KEBOMAS	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kebomas	100	450.000.000	100	53.676.000	100	450.000.000,00	100	53.676.000	100,00	11,93	200,0 0	107.352.000	200,00	23,86
1.02. 1.02. 01.1 7.07.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (bok) PUSKESMAS GENDING	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Gending	100	541.450.000	100	109.354.000	100	541.450.000,00	100	109.354.000	100,00	20,20	200,0 0	218.708.000	200,00	40,39
1.02. 1.02. 01.1 7.08.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS MANYAR	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Manyar	100	330.000.000	100	66.931.000	100	330.000.000,00	100	66.931.000	100,00	20,28	200,0 0	133.862.000	200,00	40,56
1.02. 1.02. 01.1 7.09.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS SEMBAYAT	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sembayat	100	360.000.000	100	71.844.000	100	360.000.000,00	100	71.844.000	100,00	19,96	200,0 0	143.688.000	200,00	39,91
1.02. 1.02. 01.1 7.10.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS SUKOMULYO	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sukomulyo	100	588.825.000	100	132.992.000	100	588.825.000,00	100	132.992.000	100,00	22,59	200,0 0	265.984.000	200,00	45,17
1.02. 1.02. 01.1 7.11.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Duduk Sampeyan	100	606.000.000	100	113.793.000	100	606.000.000,00	100	113.793.000	100,00	18,78	200,0 0	227.586.000	200,00	37,56
1.02. 1.02. 01.1 7.12.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS CERME	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Cerme	100	747.500.000	100	125.951.000	100	747.500.000,00	100	125.951.000	100,00	16,85	200,0 0	251.902.000	200,00	33,70
1.02. 1.02. 01.1 7.13.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS DADAP KUNING	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Dadap Kuning	100	270.000.000	100	55.932.400	100	270.000.000,00	100	55.932.400	100,00	20,72	200,0 0	111.864.800	200,00	41,43

1.02. 1.02. 01.1 7.14.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS BALONGPANGGA NG	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Balong Panggang	100	534.948.000	100	109.234.000	100	534.948.000,00	100	109.234.000	100,00	20,42	200,0 0	218.468.000	200,00	40,84
1.02. 1.02. 01.1 7.15.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS DAPET	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Dapet	100	253.000.000	100	52.094.000	100	253.000.000,00	100	52.094.000	100,00	20,59	200,0 0	104.188.000	200,00	41,18
1.02. 1.02. 01.1 7.16.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS BENJENG	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Benjeng	100	502.000.000	100	114.382.200	100	502.000.000,00	100	114.382.200	100,00	22,79	200,0 0	228.764.400	200,00	45,57
1.02. 1.02. 01.1 7.17.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS METATU	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Metatu	100	271.300.000	100	67.829.200	100	271.300.000,00	100	67.829.200	100,00	25,00	200,0 0	135.658.400	200,00	50,00
1.02. 1.02. 01.1 7.18.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS MENGANTI	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Menganti	100	400.000.000	100	82.081.000	100	400.000.000,00	100	82.081.000	100,00	20,52	200,0 0	164.162.000	200,00	41,04
1.02. 1.02. 01.1 7.19.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS KEPATIHAN	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kepatihan	100	397.500.000	100	81.546.000	100	397.500.000,00	100	81.546.000	100,00	20,51	200,0 0	163.092.000	200,00	41,03
1.02. 1.02. 01.1 7.20.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS KEDAMEAN	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kedamean	100	272.500.000	100	55.214.000	100	272.500.000,00	100	55.214.000	100,00	20,26	200,0 0	110.428.000	200,00	40,52
1.02. 1.02. 01.1 7.21.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS SLEMPIT	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Slempit	100	265.000.000	100	55.735.000	100	265.000.000,00	100	55.735.000	100,00	21,03	200,0 0	111.470.000	200,00	42,06
1.02. 1.02. 01.1 7.22.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS DRIYOREJO	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Driyorejo	100	500.000.000	100	109.335.000	100	500.000.000,00	100	109.335.000	100,00	21,87	200,0 0	218.670.000	200,00	43,73

1.02. 1.02. 01.1 7.23.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS KARANGANDONG	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Karang Andong	100	287.500.000	100	57.786.500	100	287.500.000,00	100	57.786.500	100,00	20,10	200,0 0	115.573.000	200,00	40,20
1.02. 1.02. 01.1 7.24.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS WRINGINANOM	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Wringinano m	100	300.000.000	100	69.453.000	100	300.000.000,00	100	69.453.000	100,00	23,15	200,0 0	138.906.000	200,00	46,30
1.02. 1.02. 01.1 7.25.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS KESAMBEN KULON	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kesamben Kulon	100	418.000.000	100	45.186.000	100	418.000.000,00	100	45.186.000	100,00	10,81	200,0 0	90.372.000	200,00	21,62
1.02. 1.02. 01.1 7.26.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS BUNGAH	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bungah	100	662.500.000	100	118.684.590	100	662.500.000,00	100	118.684.590	100,00	17,91	200,0 0	237.369.180	200,00	35,83
1.02. 1.02. 01.1 7.27.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS DUKUN	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Dukun	100	345.000.000	100	86.562.500	100	345.000.000,00	100	86.562.500	100,00	25,09	200,0 0	173.125.000	200,00	50,18
1.02. 1.02. 01.1 7.28.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS MENTARAS	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Mentaras	100	287.500.000	100	76.823.600	100	287.500.000,00	100	76.823.600	100,00	26,72	200,0 0	153.647.200	200,00	53,44
1.02. 1.02. 01.1 7.29.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS SIDAYU	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sidayu	100	640.050.000	100	110.466.000	100	640.050.000,00	100	110.466.000	100,00	17,26	200,0 0	220.932.000	200,00	34,52
1.02. 1.02. 01.1 7.30.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS UJUNG PANGKAH	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Ujung Pangkah	100	347.500.000	100	70.189.800	100	347.500.000,00	100	70.189.800	100,00	20,20	200,0 0	140.379.600	200,00	40,40

1.02. 1.02. 01.1 7.31.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS SEKAPUK	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sekapuk	100	262.540.000	100	63.573.773	100	262.540.000,00	100	63.573.773	100,00	24,21	200,00	127.147.546	200,00	48,43
1.02. 1.02. 01.1 7.32.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS PANCENG	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Panceng	100	310.000.000	100	64.400.000	100	310.000.000,00	100	64.400.000	100,00	20,77	200,00	128.800.000	200,00	41,55
1.02. 1.02. 01.1 7.33.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS SANGKAPURA	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sangkapura	100	402.500.000	100	81.246.000	100	402.500.000,00	100	81.246.000	100,00	20,19	200,00	162.492.000	200,00	40,37
1.02. 1.02. 01.1 7.34.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS TAMBAK	Persentase Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Tambak	100	234.769.000	100	58.579.800	100	234.769.000,00	100	58.579.800	100,00	24,95	200,00	117.159.600	200,00	49,90
1.02. 1.02. 01.1 7.35.	MANAJEMEN BOK DI KABUPATEN	Persentase pengelolaan manajemen BOK	100	1.578.049.000	100	158.350.750	100	1.578.049.000,00	100	158.350.750	100,00	10,03	200,00	316.701.500	200,00	20,07
1.02. 1.02. 01.1 7.36.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA DAN USILA	Pemeriksaan berkala pada anak sekolah	15	454.555.050	15	92.053.500	15	454.555.050,00	15	92.053.500	100,00	20,25	30,00	184.107.000	200,00	40,50
1.02. 1.02. 01.1 7.37.	PENANGGULANGAN MASALAH GIZI MASYARAKAT	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	44	745.930.500	44	651.749.050	44	745.930.500,00	44	651.749.050	100,00	87,37	88,00	1.303.498.100	200,00	174,75
1.02 .1.0 2.01 .18.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			10.933.230.000		2.758.670.300		10.933.230.000		2.758.670.300		25,23	0,00	5.517.340.600		50,46
1.02. 1.02. 01.1 8.01.	PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan Jumlah Posyandu PURI	91	3.666.857.000	91	1.141.920.300	91	3.666.857.000,00	91	1.141.920.300	100,00	31,14	182,00	2.283.840.600	200,00	62,28

1.02. 1.02. 01.1 8.02.	PENETAPAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN PENGADAAN TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (DBHCHT)	Persentase sosialisasi Perda dan Perbub KTR dan KTBR, Penyusunan Perubahan Perda Retribusi Jasa Umum.	100	500.000.000	100	0	100	500.000.000,00	-	-	0,00	-	100,00	-	100,00	-
1.02. 1.02. 01.1 8.03.	PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BIDANG KESEHATAN	Persentase Pengelolaan dana Bantuan Keuangan dar Provinsi Bidang Kesehatan	100	6.766.373.000	100	1.616.750.000	100	6.766.373.000,00	100	1.616.750.000	100,00	23,89	200,00	3.233.500.000	200,00	47,79
1.02 .1.0 2.01 .19.	PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN OLAH RAGA			467.500.000		117.447.400		467.500.000		117.447.400		25,12		234.894.800		50,24
1.02. 1.02. 01.1 9.01.	PENYELENGGAR AAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Persentase Peningkatan desa/Kelurahan ODF	60	447.500.000	60	105.972.400	60	447.500.000,00	60	105.972.400	100,00	23,68	120,00	211.944.800	200,00	47,36
1.02. 1.02. 01.1 9.02.	PENYELENGGAR AAN KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja	25	20.000.000	25	11.475.000	25	20.000.000,00	25	11.475.000	100,00	57,38	50,00	22.950.000	200,00	114,75
1.02 .1.0 2.01 .20.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT			1.355.701.250		447.810.300		1.355.701.250		447.810.300		33,03		895.620.600	#DIV/0!	66,06
1.02. 1.02. 01.2 0.01.	PEMBINAAN SURVEILLANS, IMUNISASI DAN KESEHATAN MATRA	Persentase penanggulangan KLB < 24 jam	82	305.701.250	82	90.958.350	82	305.701.250,00	82	90.958.350	100,00	29,75	164,00	181.916.700	200,00	59,51
1.02. 1.02. 01.2 0.02.	PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	Proporsi perempuan usia 30 -50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	6	100.000.000	6	18.923.550	6	100.000.000,00	6	18.923.550	100,00	18,92	12,00	37.847.100	200,00	37,85

1.02. 1.02. 01.2 0.03.	PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	Persentase ODHA yang mendapat ARV	35	950.000.000	35	337.928.400	35	950.000.000,00	35	337.928.400	100,00	35,57	70,00	675.856.800	200,00	71,14
1.02 .1.0 2.01 .21.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL			64.774.863.000		17.769.763.953		64.774.863.000		17.769.763.953		27,43		35.539.527.906		54,87
1.02. 1.02. 01.2 1.01.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN FKTP	Puskesmas dengan penilaian kinerja baik	50	2.764.150.000	50	320.725.750	50	2.764.150.000,00	50	320.725.750	100,00	11,60	100,0 0	641.451.500	200,00	23,21
1.02. 1.02. 01.2 1.02.	STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase pelatihan akreditasi puskesmas	100	1.682.000.000	100	346.470.000	100	1.682.000.000,00	100	346.470.000	100,00	20,60	200,0 0	692.940.000	200,00	41,20
1.02. 1.02. 01.2 1.03.	KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	68	13.586.800.000	68	4.586.218.957	68	13.586.800.000,00	68	4.586.218.957	100,00	33,75	136,0 0	9.172.437.914	200,00	67,51
1.02. 1.02. 01.2 1.04.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS ALON - ALON	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.863.000.000	100	462.831.615	100	1.863.000.000,00	100	462.831.615	100,00	24,84	200,0 0	925.663.230	200,00	49,69
1.02. 1.02. 01.2 1.05.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS NELAYAN	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	519.210.000	100	39.091.464	100	519.210.000,00	100	39.091.464	100,00	7,53	200,0 0	78.182.928	200,00	15,06
1.02. 1.02. 01.2 1.06.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS INDUSTRI	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	720.720.000	100	193.615.310	100	720.720.000,00	100	193.615.310	100,00	26,86	200,0 0	387.230.620	200,00	53,73
1.02. 1.02. 01.2 1.07.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEBOMAS	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.338.492.000	100	483.975.348	100	1.338.492.000,00	100	483.975.348	100,00	36,16	200,0 0	967.950.696	200,00	72,32

1.02. 1.02. 01.2 1.08.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS GENDING	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	909.792.000	100	311.937.660	100	909.792.000,00	100	311.937.660	100,00	34,29	200,0 0	623.875.320	200,00	68,57
1.02. 1.02. 01.2 1.09.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MANYAR	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.494.000.000	100	455.791.782	100	1.494.000.000,00	100	455.791.782	100,00	30,51	200,0 0	911.583.564	200,00	61,02
1.02. 1.02. 01.2 1.10.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEMBAYAT	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.010.525.000	100	342.561.000	100	1.010.525.000,00	100	342.561.000	100,00	33,90	200,0 0	685.122.000	200,00	67,80
1.02. 1.02. 01.2 1.11.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SUKOMULYO	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.119.000.000	100	473.763.121	100	1.119.000.000,00	100	473.763.121	100,00	42,34	200,0 0	947.526.242	200,00	84,68
1.02. 1.02. 01.2 1.12.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.969.356.000	100	585.580.380	100	1.969.356.000,00	100	585.580.380	100,00	29,73	200,0 0	1.171.160.760	200,00	59,47
1.02. 1.02. 01.2 1.13.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS CERME	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	2.592.000.000	100	752.306.242	100	2.592.000.000,00	100	752.306.242	100,00	29,02	200,0 0	1.504.612.484	200,00	58,05
1.02. 1.02. 01.2 1.14.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DADAP KUNING	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	752.118.000	100	173.817.776	100	752.118.000,00	100	173.817.776	100,00	23,11	200,0 0	347.635.552	200,00	46,22
1.02. 1.02. 01.2 1.15.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BALONGPANGGA NG	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.413.504.000	100	436.163.855	100	1.413.504.000,00	100	436.163.855	100,00	30,86	200,0 0	872.327.710	200,00	61,71

1.02. 1.02. 01.2 1.16.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DAPET	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	539.682.000	100	134.681.880	100	539.682.000,00	100	134.681.880	100,00	24,96	200,0 0	269.363.760	200,00	49,91
1.02. 1.02. 01.2 1.17.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BENJENG	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.542.456.000	100	291.128.827	100	1.542.456.000,00	100	291.128.827	100,00	18,87	200,0 0	582.257.654	200,00	37,75
1.02. 1.02. 01.2 1.18.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS METATU	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	965.850.000	100	334.429.900	100	965.850.000,00	100	334.429.900	100,00	34,63	200,0 0	668.859.800	200,00	69,25
1.02. 1.02. 01.2 1.19.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENGANTI	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	2.069.880.000	100	156.471.660	100	2.069.880.000,00	100	156.471.660	100,00	7,56	200,0 0	312.943.320	200,00	15,12
1.02. 1.02. 01.2 1.20.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEPATIHAN	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.084.608.000	100	365.806.320	100	1.084.608.000,00	100	365.806.320	100,00	33,73	200,0 0	731.612.640	200,00	67,45
1.02. 1.02. 01.2 1.21.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEDAMEAN	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.201.320.000	100	283.605.773	100	1.201.320.000,00	100	283.605.773	100,00	23,61	200,0 0	567.211.546	200,00	47,22
1.02. 1.02. 01.2 1.22.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SLEMPIT	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	802.800.000	100	246.310.244	100	802.800.000,00	100	246.310.244	100,00	30,68	200,0 0	492.620.488	200,00	61,36
1.02. 1.02. 01.2 1.23.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DRIYOREJO	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	3.215.428.000	100	655.068.948	100	3.215.428.000,00	100	655.068.948	100,00	20,37	200,0 0	1.310.137.896	200,00	40,75

1.02. 1.02. 01.2 1.24.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KARANGANDONG	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.256.544.000	100	382.658.560	100	1.256.544.000,00	100	382.658.560	100,00	30,45	200,0 0	765.317.120	200,00	60,91
1.02. 1.02. 01.2 1.25.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS WRINGINANOM	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.616.616.000	100	473.242.230	100	1.616.616.000,00	100	473.242.230	100,00	29,27	200,0 0	946.484.460	200,00	58,55
1.02. 1.02. 01.2 1.26.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KESAMBEN KULON	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.045.296.000	100	291.752.800	100	1.045.296.000,00	100	291.752.800	100,00	27,91	200,0 0	583.505.600	200,00	55,82
1.02. 1.02. 01.2 1.27.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BUNGAH	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	2.674.944.000	100	872.183.163	100	2.674.944.000,00	100	872.183.163	100,00	32,61	200,0 0	1.744.366.326	200,00	65,21
1.02. 1.02. 01.2 1.28.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUKUN	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.515.672.000	100	462.038.895	100	1.515.672.000,00	100	462.038.895	100,00	30,48	200,0 0	924.077.790	200,00	60,97
1.02. 1.02. 01.2 1.29.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENTARAS	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	948.744.000	100	258.581.550	100	948.744.000,00	100	258.581.550	100,00	27,26	200,0 0	517.163.100	200,00	54,51
1.02. 1.02. 01.2 1.30.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SIDAYU	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	2.203.560.000	100	562.233.875	100	2.203.560.000,00	100	562.233.875	100,00	25,51	200,0 0	1.124.467.750	200,00	51,03
1.02. 1.02. 01.2 1.31.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS UJUNG PANGKAH	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.542.672.000	100	489.137.342	100	1.542.672.000,00	100	489.137.342	100,00	31,71	200,0 0	978.274.684	200,00	63,41

1.02. 1.02. 01.2 1.32.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEKAPUK	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	361.950.000	100	97.339.110	100	361.950.000,00	100	97.339.110	100,00	26,89	200,0 0	194.678.220	200,00	53,79
1.02. 1.02. 01.2 1.33.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS PANCENG	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.899.000.000	100	578.387.423	100	1.899.000.000,00	100	578.387.423	100,00	30,46	200,0 0	1.156.774.846	200,00	60,91
1.02. 1.02. 01.2 1.34.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SANGKAPURA	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	1.793.952.000	100	515.769.915	100	1.793.952.000,00	100	515.769.915	100,00	28,75	200,0 0	1.031.539.830	200,00	57,50
1.02. 1.02. 01.2 1.35.	PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS TAMBAK	Persentase Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional	100	990.792.000	100	285.715.778	100	990.792.000,00	100	285.715.778	100,00	28,84	200,0 0	571.431.556	200,00	57,67
1.02. 1.02. 01.2 1.36.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Pembinaan dan pengawasan RS	100	40.000.000	100	12.457.400	100	40.000.000,00	100	12.457.400	100,00	31,14	200,0 0	24.914.800	200,00	62,29
1.02. 1.02. 01.2 1.37.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	Pembinaan penyehat tradisional	65	30.000.000	65	23.912.100	65	30.000.000,00	65	23.912.100	100,00	79,71	130,0 0	47.824.200	200,00	159,41
1.02. 1.02. 01.2 1.38.	AKREDITASI PUSKESMAS (DAK)	Persentase Dana Alokasi Khusus Akreditasi Puskesmas	100	1.698.430.000	100	32.000.000	100	1.698.430.000,00	100	32.000.000	100,00	1,88	200,0 0	64.000.000	200,00	3,77
1.02 .1.0 2.01 .22.	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN			10.382.500.000		3.883.076.589		10.417.500.000		3.971.157.478		38,12		7.854.234.067		75,65
1.02. 1.02. 01.2 2.01.	PENINGKATAN KUALITAS SDM	Penerbitan SIP dan SIK tenaga kesehatan	100	142.500.000	100	0	100	142.500.000,00	-	-	0,00	-	100,0 0	-	100,00	-
1.02. 1.02. 01.2 2.02.	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI	Visitasi perijinan sarana pelayanan kefarmasian	100	0	100	10.130.000	100	35.000.000,00	100	10.130.000	100,00	28,94	200,0 0	20.260.000	200,00	0

1.02. 1.02. 01.2 2.03.	PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase sarana pengelolaan makanan jajanan memenuhi syarat kesehatan	50	90.000.000	50	28.298.500	50	90.000.000,00	50	28.298.500	100,00	31,44	100,0 0	56.597.000	200,00	62,89
1.02. 1.02. 01.2 2.04.	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	Alkes di Puskesmas yang sesuai standar	32	2.800.000.000	32	22.044.000	32	2.800.000.000,00	32	22.044.000	100,00	0,79	64,00	44.088.000	200,00	1,57
1.02. 1.02. 01.2 2.05.	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEFARMASIAN	Persentase Dana Alokasi Khusus Bidang Kefarmasia n	100	7.027.000.000	100	3.802.304.089	100	7.027.000.000,00	100	3.802.304.089	100,00	54,11	200,0 0	7.604.608.178	200,00	108,22
1.02. 1.02. 01.2 2.06.	PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase tingkat kecukupan obat dan perbekalan kesehatan	88	38.000.000	88	20.300.000	88	38.000.000,00	88	20.300.000	100,00	53,42	176,0 0	40.600.000	200,00	106,84
1.02. 1.02. 01.2 2.07.	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG	Persentase sampel yang memenuhi syarat	28	285.000.000	28	0	28	285.000.000,00	28	88.080.889	100,00	30,91	56,00	88.080.889	200,00	30,91
1.02. .02.	RSUD IBNU SINA							199.467.000.000,00		83.803.639.311,56						
1.02 .	KESEHATAN							199.467.000.000,00		83.803.639.311,56				242.691.907.587,53		
1.02 .1.0 2.02 .22.	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN			44.666.793.019		17.855.134.533		44.467.000.000		8.365.505.000		18,81		26.220.639.533		58,70
1.02. 1.02. 02.2 2.70.	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG KESEHATAN (RS RUJUKAN PRATAMA (DAK)	Jumlah Alat Kesehatan yang dibeli	9	44.666.793.019,00	9	17.855.134.533,41	9	44.467.000.000,00	9	8.365.505.000	100,00	18,81	18,00	26.220.639.533	200,00	58,70
1.02 .1.0 2.02 .24.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD			280.000.000.000		132.756.298.497		145.000.000.000	-	72.932.269.281		50,30		205.688.567.778		73,46

1.02. 1.02. 02.2 4.01.	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN RSUD	Prosentase Tingkat Hunian : Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur (BOR)	72,5 9	280.000.000.000,00	72,5 9	132.756.298.496,9 0	72,5 9	145.000.000.000,00	73	72.932.269.281	100,00	50,30	145,1 8	205.688.567.778	200,00	73,46
1.02 .1.0 2.02 .25.	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL DAMPAK TEBKAU			18.365.000.000		8.276.835.246		10.000.000.000		2.505.865.031		25,06		10.782.700.276		58,71
1.02. 1.02. 02.2 5.01.	PENYEDIAAN/PE MELIHARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA PENYAKIT AKIBAT DAMPAK KONSUMSI ROKOK DAN PENYAKIT LAINNYA	Jumlah Alat Kesehatan yang dibeli	6	18.365.000.000,00	6	8.276.835.245,66	6	10.000.000.000,00	6	2.505.865.031	100,00	25,06	12,00	10.782.700.276	200,00	58,71
1.04 .01.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							38.491.597.889,00		22.365.191.955,00				22.658.426.426,00		
1.04 .	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							38.491.597.889,00		22.365.191.955,00				22.658.426.426,00		
1.04 .1.0 4.01 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			260.000.000		32.035.000		293.748.909		215.842.293		73,48		247.877.293		95,34
1.04. 1.04. 01.0 1.01.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Jasa Administrat or Perkantoran	3	6.000.000	3	5.951.000	3	6.000.000	3	5.951.000	100,00	99,18	6,00	11.902.000	200,00	198,37
1.04. 1.04. 01.0 1.02.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	Jumlah Barang dan Jenis Barang Cetak dan Penggaandaan	2	20.000.000	2	3.760.000	2	20.000.000	2	19.236.170	100,00	96,18	4,00	22.996.170	200,00	114,98
1.04. 1.04. 01.0 1.03.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UN DANGAN	Jumlah dan Jenis penyediaan bahan bacaan	5	5.000.000	5	-	5	5.000.000	5	5.000.000	100,00	100,00	10,00	5.000.000	200,00	100,00

1.04. 1.04. 01.0 1.05.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah Fasilitas Penyediaan Makanan Minuman	3	10.000.000	3	-	3	10.587.400	3	10.587.400	100,00	100,00	6,00	10.587.400	200,00	105,87
1.04. 1.04. 01.0 1.06.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Jumlah Fasilitas Rapat dan Konsultasi Luar Daerag	100	80.000.000	100	5.234.000	100	80.000.000	100	21.791.529	100,00	27,24	200,0 0	27.025.529	200,00	33,78
1.04. 1.04. 01.0 1.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	Jumlah Administrat or Kantor	4	124.000.000	4	11.090.000	4	124.000.000	4	96.106.278	100,00	77,51	8,00	107.196.278	200,00	86,45
1.04. 1.04. 01.0 1.08.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	Jumlah Jasa Operasional Kantor	14	15.000.000	14	6.000.000	14	48.161.509	14	48.161.509	100,00	100,00	28,00	54.161.509	200,00	361,08
1.04 .1.0 4.01 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			415.000.000		-		430.815.400		412.977.400		95,86		412.977.400		99,51
1.04. 1.04. 01.0 2.03.	PENGADAAN PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Jumlah Penyedian peralatan/ Perlengkap an	2	143.000.000	2	-	2	156.856.400,00	2	156.856.400	100,00	100,00	4,00	156.856.400	200,00	109,69
1.04. 1.04. 01.0 2.05.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUN G/RUMAH TANGGA	jumlah fasilitas pemeliharaa n kantor	4	200.000.000	4	-	4	200.000.000,00	4	194.210.000	100,00	97,11	8,00	194.210.000	200,00	97,11
1.04. 1.04. 01.0 2.06.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS /OPERASIONAL	jumlah fasilitas pemeliharaa n kendaraan	2	60.000.000	2	-	2	60.000.000,00	2	47.952.000	100,00	79,92	4,00	47.952.000	200,00	79,92
1.04. 1.04. 01.0 2.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	jumlah fasilitas pemeliharaa n	2	12.000.000	2	-	2	13.959.000,00	2	13.959.000	100,00	100,00	4,00	13.959.000	200,00	116,33
1.04 .1.0 4.01 .06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			40.000.000		6.000.000		40.000.000		30.846.500		77,12		36.846.500		92,12

1.04. 1.04. 01.0 6.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Terwujudny a Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	4	20.000.000	4	4.500.000	4	20.000.000,00	4	13.478.000	100,00	67,39	8,00	17.978.000	200,00	89,89
1.04. 1.04. 01.0 6.03.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	Penyusunan dokumen rencana kerja (dokumen)	50	20.000.000	50	1.500.000	50	20.000.000,00	50	17.368.500	100,00	86,84	100,0 0	18.868.500	200,00	94,34
1.04 .1.0 4.01 .15.	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN			19.258.841.775		18.969.000		19.438.423.580		12.558.489.053		64,61		12.577.458.053		65,31
1.04. 1.04. 01.1 5.01.	PEMBANGUNAN /REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	Jumlah Lokasi Kelurahan yang dilaksana n pembangun an Rehab Jalan Lingkungan	13	5.108.585.580	13	8.904.000	13	5.108.585.580	13	4.356.522.823	100,00	85,28	26,00	4.365.426.823	200,00	85,45
1.04. 1.04. 01.1 5.02.	PEMBANGUNAN/ REHABILITASI SALURAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	Jumlah Lokasi Kelurahan yang dilaksana n pembangun an Rehab Saluran Lingkungan	139. 222	13.955.325.395	139. 222	10.065.000	139. 222	13.955.325.395	139. 222	7.827.453.625	100,00	56,09	27844 4,00	7.837.518.625	200,00	56,16
1.04. 1.04. 01.1 5.03.	BOP PENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN	Jumlah Lokasi Yang Dilaksana an Pembangun an/Rehabili tasi Prasarana dan Sarana Umum Lingkungan Perdesaan	18	194.930.800	18		18	374.512.605	18	374.512.605	100,00	100,00	36,00	374.512.605	200,00	192,13
1.04 .1.0 4.01 .16.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			7.097.107.800		27.991.631		7.097.107.800		1.876.368.468		26,44		1.904.360.099		26,83

1.04. 1.04. 01.1 6.03.	PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN	Jumlah pembangun an penerangan jalan umum dan sarana lainnya di lingkungan permukima n semakin bertambah	13	1.495.832.800	13	21.159.531	13	1.495.832.800	13	1.450.653.497	100,00	96,98	26,00	1.471.813.028	200,00	98,39
1.04. 1.04. 01.1 6.04.	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Optimalisas i Peningkatan Kwalitas bagi Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasi lan Rendah	1	5.431.275.000	1	882.100	1	5.431.275.000	1	257.617.471	100,00	4,74	2,00	258.499.571	200,00	4,76
1.04. 1.04. 01.1 6.05.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN	Jumlah Lokasi Yang Dibangun Pada Areal Pemakaman	1	170.000.000	1	5.950.000	1	170.000.000	1	168.097.500	100,00	98,88	2,00	174.047.500	200,00	102,38
1.04 .1.0 4.01 .17.	PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA			3.568.532.000		18.128.300		3.568.532.000		510.492.098		14,31		528.620.398		14,81
1.04. 1.04. 01.1 7.01.	BOP PENGELUARAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU	Optimalisas i Biaya Operasional sebagai penunjang pada lokasi pemugaran /Rehab RTLH	18	3.286.008.000	18	-	18	3.286.008.000	18	237.211.430	100,00	7,22	36,00	237.211.430	200,00	7,22
1.04. 1.04. 01.1 7.02.	PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA	Laporan Pemantaua n dan Pengendalia n Rumah Swadaya	1	136.100.000	1	11.297.200	1	136.100.000	1	128.714.873	100,00	94,57	2,00	140.012.073	200,00	102,87
1.04. 1.04. 01.1 7.03.	PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH SWADAYA	Laporan Pendataan Rumah Swadaya	1	146.424.000	1	6.831.100	1	146.424.000	1	144.565.795	100,00	98,73	2,00	151.396.895	200,00	103,40
1.04 .1.0 4.01 .19.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR LIMBAH			3.437.554.000		7.217.500		3.437.554.000		3.139.439.406		91,33		3.146.656.906		91,54

1.04. 1.04. 01.1 9.01.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH	Pembangun an infrastrukturu r pengolahan limbah	2	1.990.250.000	2	7.217.500	2	1.990.250.000,00	2	1.692.138.589	100,00	85,02	4,00	1.699.356.089	200,00	85,38
1.04. 1.04. 01.1 9.07.	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SANITASI	Pembangun an infrastrukturu r pengolahan air limbah domestik DAK sanitasi penugasan	4	1.447.304.000	4		4	1.447.304.000,00	4	1.447.300.817	100,00	100,00	8,00	1.447.300.817	200,00	100,00
1.04 .1.0 4.01 .20.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN			938.999.200		4.510.000		938.999.200		589.710.974		62,80		594.220.974		63,28
1.04. 1.04. 01.2 0.01.	PENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatk an mutu kehidupan dan terwujudny a lingkungan permukima n yang layak huni	139. 222	888.999.200	139. 222		139. 222	888.999.200	139. 222	540.042.074	100,00	60,75	27844 4,00	540.042.074	200,00	60,75
1.04. 1.04. 01.2 0.02.	BOP PENUNJANG KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN BERBASIS KOMUNITAS	Jumlah Kegiatan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas	4	25.000.000	4	2.855.000	4	25.000.000	4	24.768.900	100,00	99,08	8,00	27.623.900	200,00	110,50
1.04. 1.04. 01.2 0.03.	BOP PENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Jumlah KegiatanPe mbangunan Infrastrukturu r Perdesaan	157	25.000.000	157	1.655.000	157	25.000.000	157	24.900.000	100,00	99,60	314,0 0	26.555.000	200,00	106,22
1.04 .1.0 4.01 .21.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RUMAH UMUM			3.246.417.000		178.383.040		3.246.417.000		3.031.025.763		93,37		3.209.408.803		98,86
1.04. 1.04. 01.2 1.01.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT (RUSUNAWA)	jumlah rumah sederhana sehat (Rusunawa) yang dibangun sarana dan prasarananya	4	1.170.768.000	4	2.665.600	4	1.170.768.000	4	1.153.894.216	100,00	98,56	8,00	1.156.559.816	200,00	98,79

1.04. 1.04. 01.2 1.02.	PENGELOLAAN RUSUNAWA	jumlah kawasan perumahan yang dikendalika n	5	1.787.565.000	5	167.109.890	5	1.787.565.000	5	1.608.261.217	100,00	89,97	10,00	1.775.371.107	200,00	99,32
1.04. 1.04. 01.2 1.03.	PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH UMUM	jumlah kawasan perumahan yang didata dan direncanaka n	1	141.660.000	1	5.170.550	1	141.660.000	1	127.990.291	100,00	90,35	2,00	133.160.841	200,00	94,00
1.04. 1.04. 01.2 1.04.	PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH UMUM	jumlah Rumah Umum, Rum ah Khusus dan Rumah Negara yang dibangun	1	146.424.000	1	3.437.000	1	146.424.000	1	140.880.039	100,00	96,21	2,00	144.317.039	200,00	98,56
1.05 .02.	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH							4.069.727.495,00		3.560.503.970,00				4.077.473.070,00		
1.05 .	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							4.069.727.495,00		3.560.503.970,00				4.077.473.070,00		
1.05 .1.0 5.02 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			712.595.000		124.503.600		825.360.583		507.665.444		61,51		632.169.044		88,71
1.05. 1.05. 02.0 1.02.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	15	31.182.000	15	8.922.200	45	37.040.400,00	45	37.040.400	100,00	100,00	60,00	45.962.600	400,00	147,40
1.05. 1.05. 02.0 1.03.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UN DANGAN	tersedianya bahan bacaan & buku peraturan	6	13.200.000	6	1.730.000	18	11.684.800,00	18	11.684.800	100,00	100,00	24,00	13.414.800	400,00	101,63
1.05. 1.05. 02.0 1.05.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	tersedianya makan & minum	5	45.000.000	5	6.261.500	15	32.028.000,00	15	32.028.000	100,00	100,00	20,00	38.289.500	400,00	85,09
1.05. 1.05. 02.0 1.06.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Terlaksanan ya koordinasi dan konsultasi	107	250.000.000	107	56.477.000	321	246.651.230,00	321	246.651.230	100,00	100,00	428,00	303.128.230	400,00	121,25
1.05. 1.05. 02.0 1.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	Tersedianya jasa administrasi di kantor	12	373.213.000	12	51.112.900	36	290.672.450,00	36	290.672.450	100,00	100,00	48,00	341.785.350	400,00	91,58

1.05. 1.05. 02.0 1.08.	Penyediaan jasa operasional kantor	Tersedianya Kebutuhan Operasional Kantor ; 5 Rekening	12	290.000.000,00	12	50.984.751	48	207.283.703,00	48	207.283.703	100,00	100,00	60,00	258.268.454	500,00	89,06
1.05 .1.0 5.02 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1.577.836.000		79.711.100		1.358.332.512		1.352.039.626		99,54		1.431.750.726		90,74
1.05. 1.05. 02.0 2.01.	PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR	Pembangun an gudang lanjutan	1	500.000.000	1	-	3	450.000.000,00	3	445.856.214	100,00	99,08	4,00	445.856.214	400,00	89,17
1.05. 1.05. 02.0 2.03.	PENGADAAN PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	kendaraan dinas operasional keadaan baik	12	427.836.000	12	5.819.000	36	395.067.120,00	36	395.067.120	100,00	100,00	48,00	400.886.120	400,00	93,70
1.05. 1.05. 02.0 2.05.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	Terpelihara nya gedung kantor	1	300.000.000	1	-	1	150.000.000,00	1	147.850.900	100,00	98,57	2,00	147.850.900	200,00	49,28
1.05. 1.05. 02.0 2.06.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS /OPERASIONAL	terpeliharaan ya peralatan gedung kantor	6	300.000.000	6	71.452.100	18	335.559.392,00	18	335.559.392	100,00	100,00	24,00	407.011.492	400,00	135,67
1.05. 1.05. 02.0 2.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	terpeliharaan ya peralatan gedung kantor	4	50.000.000	4	2.440.000	12	27.706.000,00	12	27.706.000	100,00	100,00	16,00	30.146.000	400,00	60,29
1.05 .1.0 5.02 .05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			109.866.000		-		100.000.000		35.343.000		35,34		35.343.000		32,17
1.05. 1.05. 02.0 5.01.	PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD	Meningkatk an SDM Aparatur yang memadai	100	109.866.000	100	-	100	100.000.000	100	35.343.000	100,00	35,34	200,00	35.343.000	200,00	32,17
1.05 .1.0 5.02 .06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			109.866.000		21.039.600		113.487.600		96.872.600		85,36		117.912.200		107,32

1.05. 1.05. 02.0 6.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunnya laporan pencapaian kinerja keuangan	75	34.866.000	75	4.044.800	75	19.029.800,00	75	19.029.800	100,00	100,00	150,00	23.074.600	200,00	66,18
1.05. 1.05. 02.0 6.03.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	Tersusunnya rencana kerja tahun 2015	65	25.000.000	65	16.994.800	65	39.457.800,00	65	39.457.800	100,00	100,00	130,00	56.452.600	200,00	225,81
1.05. 1.05. 02.0 6.05.	PENYUSUNAN PROFIL SKPD	Jumlah profil SKPD	1	15.000.000	1	-	10	20.000.000,00	10	14.993.000	100,00	74,97	11,00	14.993.000	1100,00	99,95
1.05. 1.05. 02.0 6.06.	PENYUSUNAN SOP SKPD	Jumlah SOP SKPD	1	35.000.000	1	-	10	35.000.000,00	10	23.392.000	100,00	66,83	11,00	23.392.000	1100,00	66,83
1.05 .1.0 5.02 .21.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANG AN BENCANA			629.922.000		-		514.594.400		426.004.900		82,78		426.004.900		67,63
1.05. 1.05. 02.2 1.01.	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASA N INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM	Penyebarluasan informasi potensi bencana	2.000	50.000.000	2.000	-	2.000	32.353.000,00	2.000	29.987.000	100,00	92,69	4000,00	29.987.000	200,00	59,97
1.05. 1.05. 02.2 1.02.	PELATIHAN MITIGASI BENCANA	Peningkatan pengetahuan pengurus Rt/Rw di sebagian wilayah terdampak	200	157.182.000	200	-	200	117.396.400,00	200	114.621.000	100,00	97,64	400,00	114.621.000	200,00	72,92
1.05. 1.05. 02.2 1.03.	PELATIHAN PENGURUS DESA TANGGUH	Meningkatkan kemampuan pengurus desa tangguh	3	65.017.000	3	-	3	65.017.000,00	3	63.475.400	100,00	97,63	6,00	63.475.400	200,00	97,63
1.05. 1.05. 02.2 1.04.	POS KOMANDO (POSKO) SIAGA BANJIR DAN TANAH LONGSOR	Terselenggaranya posko siaga banjir dan tanah longsor	6	76.482.000	6	-	6	76.482.000,00	6	43.533.000	100,00	56,92	12,00	43.533.000	200,00	56,92
1.05. 1.05. 02.2 1.05.	SOSIALISASI PENANGGULANG AN BENCANA	Meningkatkan pengetahuan siswa sekolah tentang	50	44.789.000	50	-	50	44.789.000,00	50	44.185.000	100,00	98,65	100,00	44.185.000	200,00	98,65

		kebencanaa n														
1.05. 1.05. 02.2 1.06.	GELAR RELAWAN TANGGUH BENCANA	Terselengga ranya gelar aksi kesiapsiaga an dalam penanggula ngan bencana	100	100.000.000	100	-	100	84.078.000,00	-	81.638.000	0,00	97,10	100,0 0	81.638.000	100,00	81,64
1.05. 1.05. 02.2 1.07.	FORUM KOORDINASI PENANGGULANG AN BENCANA	Terselengga ranya koordinasi lintas sektor dalam penanggula ngan bencana	5	86.452.000	5	-	5	53.246.000,00	-	48.565.500	0,00	91,21	5,00	48.565.500	100,00	56,18
1.05. 1.05. 02.2 1.08.	PENGADAAN RAMBU-RAMBU KEBENCANAAN	Jumlah rambu-ram bu kebencanaa n	8	50.000.000	8	-	8	41.233.000,00	-	-	0,00	-	8,00	-	100,00	-
1.05 .1.0 5.02 .22.	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANG AN BENCANA			826.418.000		104.679.400		729.430.000		714.056.000		97,89		818.735.400		99,07
1.05. 1.05. 02.2 2.01.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI PENDUDUK DARI ANCAMAN / KORBAN BENCANA ALAM	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi becanda	3	300.000.000	3	1.628.000	3	190.000.000	3	188.770.000	100,00	99,35	6,00	190.398.000	200,00	63,47
1.05. 1.05. 02.2 2.02.	PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI PENDUDUK DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA	Terpenuhi ya jumlah sembako & air bersih	4.91 0	300.000.000	4.91 0	43.891.400	6.11 0	310.871.000	6.11 0	310.871.000	100,00	100,00	11020 ,00	354.762.400	224,44	118,25
1.05. 1.05. 02.2 2.03.	PEMELIHARAAN ALAT-ALAT INFORMASI	Terwujudny a peralatan logistik	20	16.000.000	20	-	20	12.000.000	20	12.000.000	100,00	100,00	40,00	12.000.000	200,00	75,00
1.05. 1.05. 02.2 2.04.	OPERASIONAL TANGGAP DARURAT KEBENCANAAN	terselenggar anya pelayanan bencana	18	110.418.000	18	14.740.000	18	77.139.000	18	62.995.000	100,00	81,66	36,00	77.735.000	200,00	70,40

1.05. 1.05. 02.2 2.05.	PELATIHAN TIM TANGGAP BENCANA (SAR)	Pelatihan SAR	100	100.000.000	100	44.420.000	100	139.420.000	100	139.420.000	100,00	100,00	200,00	183.840.000	200,00	183,84
1.05 .1.0 5.02 .24.	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANG AN BENCANA			318.916.000		187.035.400		428.522.400		428.522.400		100,00		615.557.800		193,02
1.05. 1.05. 02.2 4.01.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK PENANGGULANG AN PASCA BENCANA	Penanggula ngan bencana alam kebanjiran	13.200	168.916.000	13.200	139.745.000	13.200	281.200.000	13.200	281.200.000	100,00	100,00	26400,00	420.945.000	200,00	249,20
1.05. 1.05. 02.2 4.02.	IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI KONDISI KERUSAKAN DAN KERUGIAN SARANA PRASARANA UMUM, HARTA DAN RUMAH PENDUDUK PASCA BENCANA	Terwujudny a identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	113	50.000.000	113	4.599.900	173	17.369.900	173	17.369.900	100,00	100,00	286,00	21.969.800	253,10	43,94
1.05. 1.05. 02.2 4.03.	PELATIHAN / WORKSHOP MENGUKUR KERUGIAN SARANA PRASARANA PASCA BENCANA	Meningkatn ya kemampua n SDM untuk mengukur kerugian sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk	50	100.000.000	50	42.690.500	50	129.952.500	50	129.952.500	100,00	100,00	100,00	172.643.000	200,00	172,64
1.05 .01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							13.648.712.000,00		11.115.244.755,00				22.296.446.385,00		
1.05 .	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							13.648.712.000,00		11.115.244.755,00				22.296.446.385,00		
1.05 .1.0 5.01 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			27.701.550.193		3.366.961.529		3.159.271.000		2.714.216.683		85,91		6.081.178.212		21,95

1.05. 1.05. 01.0 1.01.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah tersedianya jasa peralatan dan perlengkap an	15	68.850.000	15	64.495.939	16	28.850.000	16	28.567.070	100,00	99,02	31,00	93.063.009	206,67	135,17
1.05. 1.05. 01.0 1.02.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	25	23.340.000	25	6.654.600	35	4.668.000	35	4.668.000	100,00	100,00	60,00	11.322.600	240,00	48,51
1.05. 1.05. 01.0 1.03.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UN DANGAN	Tersedianya Bahan Bacaan	15	55.188.000	15	3.723.000	140	2.628.000	21	2.628.000	15,00	100,00	36,00	6.351.000	240,00	11,51
1.05. 1.05. 01.0 1.05.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Tersedianya Kebutuhan minuman	13.2 00	253.600.000	12.0 00	35.250.000	13.2 00	40.800.000	13.2 00	40.800.000	100,00	100,00	25200 ,00	76.050.000	190,91	29,99
1.05. 1.05. 01.0 1.06.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas	375	704.625.000	375	93.875.000	375	64.625.000	375	51.425.000	100,00	79,57	750,0 0	145.300.000	200,00	20,62
1.05. 1.05. 01.0 1.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	Tersedianya Pengurus barang milik daerah, pejabat pengadaan, PPHP, pegawai yang menangani pengelolaan keuangan	40	171.000.000	40	29.300.000	56	34.200.000	56	24.240.000	100,00	70,88	96,00	53.540.000	240,00	31,31
1.05. 1.05. 01.0 1.08.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	Tersedianya jasa telekomunik asi, sumber daya air dan listrik, jasa kebersihan, jasa pegawai THL untuk tugas pengamanana, jasa perbaikan peralatan kerja	254	26.424.947.193	254	3.133.662.990	508	2.983.500.000	508	2.561.888.613	100,00	85,87	762,0 0	5.695.551.603	300,00	21,55

1.05 .1.0 5.01 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			9.457.921.600		2.670.724.731		3.507.520.000		2.576.416.008		73,45		5.247.140.739		55,48
1.05. 1.05. 01.0 2.01.	PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR	Pembangun an Gedung Kantor Pol PP	1	2.297.850.000	1	1.913.820.465	3	2.297.850.000	3	1.806.624.900	100,00	78,62	4,00	3.720.445.365	400,00	161,91
1.05. 1.05. 01.0 2.02.	PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS /OPERASIONAL	Tersedianya kendaraan dinas operasioana l	8	2.611.500.000	8	-	8	395.250.000	1	17.462.000	12,50	4,42	9,00	17.462.000	112,50	0,67
1.05. 1.05. 01.0 2.03.	PENGADAAN PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Jumlah pengadaan peralatan/p erlengkapan kantor/rum ah tangga	285	946.467.600	285	69.392.241	402	189.000.000	402	167.782.000	100,00	88,77	687,0 0	237.174.241	241,05	25,06
1.05. 1.05. 01.0 2.05.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUN G/RUMAH TANGGA	pemeliharaa n gedung kantor pol pp	4	400.000.000	4	273.493.410	5	100.000.000	5	99.179.900	100,00	99,18	9,00	372.673.310	225,00	93,17
1.05. 1.05. 01.0 2.06.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS /OPERASIONAL	Pemeliharaa n kendaraan dinas/opera sional	65	740.000.000	65	107.674.065	91	87.300.000	91	87.221.358	100,00	99,91	156,0 0	194.895.423	240,00	26,34
1.05. 1.05. 01.0 2.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Jumlah peralatan/p erlengkapan gedung yang diperbaiki	55	195.700.000	55	37.977.750	58	39.140.000	58	27.135.000	100,00	69,33	113,0 0	65.112.750	205,45	33,27
1.05. 1.05. 01.0 2.08.	PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPAN NYA	Terlaksanan ya Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapa nnya	10	2.266.404.000	10	268.366.800	10	398.980.000	2	371.010.850	20,00	92,99	12,00	639.377.650	120,00	28,21
1.05 .1.0 5.01 .06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			64.043.000		24.712.000		9.479.000		9.479.000		100,00		34.191.000		53,39

1.05. 1.05. 01.0 6.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusnya laporan kinerja & ikhtisar realisasi keuangan SKPD	20	17.455.000	20	5.782.000	20	2.891.000	20	2.891.000	100,00	100,00	40,00	8.673.000	200,00	49,69
1.05. 1.05. 01.0 6.03.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	Penyusunan Renja SKPD	35	46.588.000	35	18.930.000	35	6.588.000	35	6.588.000	100,00	100,00	70,00	25.518.000	200,00	54,77
1.05 .1.0 5.01 .15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN			16.603.297.533		4.208.226.870		3.070.478.000		2.969.130.247		96,70		7.177.357.117		43,23
1.05. 1.05. 01.1 5.01.	PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT	Jumlah PAM giat PHBI dan giat masy lainnya	233	380.693.125	233	110.336.400	257	70.050.000	257	68.843.400	100,00	98,28	490,0 0	179.179.800	210,30	47,07
1.05. 1.05. 01.1 5.02.	PENGAMANAN KEGIATAN PEMERINTAHAN	Jml PAM giat PHBN & giat pemerintah lainnya	283	1.531.728.000	283	361.869.000	319	183.440.000	319	157.363.000	100,00	85,78	602,0 0	519.232.000	212,72	33,90
1.05. 1.05. 01.1 5.03.	OPERASI PENERTIBAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Giat Operasi penertiban pelanggaran PERDA	5.41 5	12.116.497.008	5.41 5	3.014.114.050	5.90 5	2.372.780.600	5.90 5	2.363.688.700	100,00	99,62	11320 ,00	5.377.802.750	209,05	44,38
1.05. 1.05. 01.1 5.04.	JAMBORE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Jumlah pegawai yang melakukan giat Jambore	130	162.715.000	130	91.884.273	130	32.543.000	26	32.543.000	20,00	100,00	156,0 0	124.427.273	120,00	76,47
1.05. 1.05. 01.1 5.05.	PEMANTAPAN OPERASIONAL ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Jumlah peserta pemantapa n operasional	743	1.411.664.400	743	197.454.500	743	211.664.400	743	197.454.500	100,00	93,29	1486, 00	394.909.000	200,00	27,97
1.05. 1.05. 01.1 5.06.	PEMBINAAN KESAMAPTAAN JASMANI	Jml peserta kesamaptaa n jasmani	625	1.000.000.000	625	432.568.647	875	200.000.000	875	149.237.647	100,00	74,62	1500, 00	581.806.294	240,00	58,18
1.05 .1.0 5.01 .16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL			852.519.300		88.955.000		117.853.000		111.437.000		94,56		200.392.000		23,51

1.05. 1.05. 01.1 6.01.	PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	Jumlah terlaksanan ya penyidikan dan pelanggaran Perda	100	852.519.300	100	88.955.000	135	117.853.000	135	111.437.000	99,93	94,56	234,9 0	200.392.000	234,90	23,51
1.05 .1.0 5.01 .19.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN			1.373.200.000		289.425.000		376.349.000		221.974.767		58,98		511.399.767		37,24
1.05. 1.05. 01.1 9.01.	PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	jumlah masyarakat yang diberi pembinaan	1.08 6	415.888.000	1.08 6	67.674.000	1.08 6	73.879.000	1.08 6	67.674.000	100,00	91,60	2172, 00	135.348.000	200,00	32,54
1.05. 1.05. 01.1 9.02.	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMSWAKARS A DI DAERAH	Jumlah aparatur keamanan desa yg ikut sarasehan dan jumlah anggota yg mengikuti pelatihan	531	483.282.000	531	151.826.000	531	180.000.000	125	34.625.000	23,54	19,24	656,0 0	186.451.000	123,54	38,58
1.05. 1.05. 01.1 9.03.	KEGIATAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN	Jumlah peserta pembinaan kasi Trantib	32	34.580.000	32	59.065.000	96	34.580.000	96	34.480.000	100,00	99,71	128,0 0	93.545.000	400,00	270,52
1.05. 1.05. 01.1 9.04.	PEMETAAN POTENSI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN GRESIK	Jumlah kecamatan yg dilakukan pemetaan	18	439.450.000	18	10.860.000	19	87.890.000	19	85.195.767	100,00	96,93	37,00	96.055.767	205,56	21,86
1.05 .1.0 5.01 .23.	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN			36.010.650.000		532.196.500		3.407.762.000		2.512.591.050		73,73		3.044.787.550		8,46

1.05. 1.05. 01.2 3.01.	KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Peserta Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	132. 000	1.700.000.000	132. 000	25.600.000	143. 000	100.000.000	143. 000	73.890.000	100,00	73,89	27500 0,00	99.490.000	208,33	5,85
1.05. 1.05. 01.2 3.02.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Peralatan yg lengkap dan baik serta suku cadang yg baik	33	8.269.410.000	33	9.500.000	41	1.213.882.000	41	704.680.250	100,00	58,05	74,00	714.180.250	224,24	8,64
1.05. 1.05. 01.2 3.03.	KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN	Operasional dan pemeliharaa n PMK	357	26.041.240.000	357	497.096.500	455	2.093.880.000	455	1.734.020.800	100,00	82,81	812,0 0	2.231.117.300	227,45	8,57
2.04 .01.	DINAS PERTANAHAN							36.391.760.400,00								
2.04 .	PERTANAHAN			229.556.510.400,00		-		38.155.003.511,00		27.364.766.069,00						
2.04 .2.0 4.01 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2.361.000.000		-		504.259.000		493.546.054		97,88		493.546.054		20,90
2.04. 2.04. 01.0 1.02.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	60	137.000.000	60	0,00	73	71.599.400	73	71.599.400	100,00	100,00	133,0 0	71.599.400	221,67	52,26
2.04. 2.04. 01.0 1.03.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UN DANGAN	Terpenuhi nya kebutuhan bahan bacaan	15	35.000.000	15	0,00	22	10.642.000	22	10.642.000	100,00	100,00	37,00	10.642.000	246,67	30,41
2.04. 2.04. 01.0 1.05.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah makanan dan minuman selama satu tahun	5290	358.000.000	5290	0,00	5.67 0	32.325.000	5.67 0	32.325.000	100,00	100,00	10960 ,00	32.325.000	207,18	9,03
2.04. 2.04. 01.0 1.06.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Terwujudny a koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di Bidang pertanahan	106	600.000.000	106	0,00	128	142.719.600	128	142.719.600	100,00	100,00	234,0 0	142.719.600	220,75	23,79

2.04. 2.04. 01.0 1.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	Jumlah administras i kantor non PNS	64	931.000.000	64	0,00	76	204.973.000	76	204.973.000	100,00	100,00	140,0 0	204.973.000	218,75	22,02
2.04. 2.04. 01.0 1.08.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	Jumlah jasa operasional kantor	15	300.000.000	15	0,00	21	42.000.000	21	31.287.054	100,00	74,49	36,00	31.287.054	240,00	10,43
2.04 .2.0 4.01 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			2.527.000.000		-		1.286.695.086		1.286.695.086		100,00		1.286.695.086		50,92
2.04. 2.04. 01.0 2.03.	PENGADAAN PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Jumlah peralatan Kantor dan kebersihan kantor	222	1.113.000.000	222	0,00	307	1.124.434.855	307	1.124.434.855	100,00	100,00	529,0 0	1.124.434.855	238,29	101,03
2.04. 2.04. 01.0 2.06.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS /OPERASIONAL	Jumlah kendaraan dinas operasional	32	520.000.000	32	0,00	36	147.160.231	36	147.160.231	100,00	100,00	68,00	147.160.231	212,50	28,30
2.04. 2.04. 01.0 2.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Peralatan kerja yang diperbaiki	30	894.000.000	30	0,00	36	15.100.000	36	15.100.000	100,00	100,00	66,00	15.100.000	220,00	1,69
2.04 .2.0 4.01 .06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			455.000.000		-		63.573.950		63.573.950		100,00		63.573.950		13,97
2.04. 2.04. 01.0 6.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunnya dokumen laporan Akuntabilita s kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan	195	215.000.000	195	0,00	230	23.165.750	230	23.165.750	100,00	100,00	425,0 0	23.165.750	217,95	10,77

2.04. 2.04. 01.0 6.03.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	Tersusunnya buku Rencana Kerja, Buku RKA, DPA dan DPPA Dinas Pertanahan	215	240.000.000	215	0,00	250	40.408.200	250	40.408.200	100,00	100,00	465,00	40.408.200	216,28	16,84
2.04 .2.0 4.01 .15.	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH			224.213.510.400		-		36.300.475.475		25.520.950.979		70,30		25.520.950.979		11,38
2.04. 2.04. 01.1 5.01.	SERTIFIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KABUPATEN	Proses Sertifikasi Tanah Aset Pemda	250	1.739.960.000	250	0,00	312	576.358.675	312	576.358.675	100,00	100,00	562,00	576.358.675	224,80	33,12
2.04. 2.04. 01.1 5.02.	PERENCANAAN PENGADAAN TANAH	Terlaksanakannya Inventarisasi data untuk perencanaan pengadaan tanah	31	1.216.820.000	31	0,00	35	200.000.000	35	127.938.154	100,00	63,97	66,00	127.938.154	212,90	10,51
2.04. 2.04. 01.1 5.03.	PERSIAPAN PENGADAAN TANAH	Tersediaanya data pemegang hak tanah dan konsultasi public (diatas 5 Ha)	35	1.890.760.400	35	0,00	36	140.760.400	36	51.346.750	100,00	36,48	71,00	51.346.750	202,86	2,72
2.04. 2.04. 01.1 5.04.	PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH	Pemegang hak atas tanah yang bersedia dibebaskan	30	214.485.000.000	30	0,00	30	34.485.000.000	1	24.341.951.000	3,33	70,59	31,00	24.341.951.000	103,33	11,35

2.04. 2.04. 01.1 5.06.	PENDATAAN ASET DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa yang di Data	235	915.870.000	235	0,00	282	271.185.000	282	271.185.000	100,00	100,00	517,0 0	271.185.000	220,00	29,61
2.04. 2.04. 01.1 5.07.	ONE MAP ONE POLICY	Persentase koordinasi dan fasilitasi secara kooperensif terhadap pelaksanaa n tugas pokok dan fungsi pemetaan dan pendataan tanah	5000	2.900.100.000	5000	0,00	500 0	475.000.000	-	-	0,00	-	5000, 00	-	100,00	-
2.04. 2.04. 01.1 5.08.	FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN	Jumlah konflik yang difasilitasi	175	1.065.000.000	175	0,00	185	152.171.400	185	152.171.400	100,00	100,00	360,0 0	152.171.400	205,71	14,29
2.05 .01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							34.833.880.853,00								
2.05 .	LINGKUNGAN HIDUP							34.833.880.853,00								
2.05 .2.0 5.01 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			748.515.825		242.128.397		655.084.881		529.750.107		80,87		771.878.504		103,12
2.05. 2.05. 01.0 1.02.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAN	buku cetakan	72	27.805.667	72	20.000.000	84	21.386.000	84	21.386.000	100,00	100,00	156,0 0	41.386.000	216,67	148,84
2.05. 2.05. 01.0 1.03.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UN DANGAN	buku	48	9.774.648	48	4.800.000	72	48.000.000	72	8.570.000	100,00	17,85	120,0 0	13.370.000	250,00	136,78
2.05. 2.05. 01.0 1.05.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	makanan minuman	1	32.582.160	1	12.985.500	62	35.678.678	62	35.678.687	100,00	100,00	63,00	48.664.187	6300,0 0	149,36
2.05. 2.05. 01.0 1.06.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	perjalanan dinas	100	182.910.800	100	87.179.930	130	132.123.866	130	132.123.866	100,00	100,00	230,0 0	219.303.796	230,00	119,90
2.05. 2.05. 01.0 1.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	petugas administras i	24	186.860.171	24	36.000.000	60	179.453.798	60	179.453.798	100,00	100,00	84,00	215.453.798	350,00	115,30

2.05. 2.05. 01.0 1.08.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	rekening rutnitas	36	308.582.379	36	81.162.967	86	238.442.539	86	238.442.539	100,00	100,00	122,0 0	319.605.506	338,89	103,57
2.05 .2.0 5.01 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			509.977.311		507.407.904		571.807.346		571.807.346		100,00		1.079.215.250		211,62
2.05. 2.05. 01.0 2.03.	PENGADAAN PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	sarana prsarana perkantoran	85	168.566.991	85	384.927.365	217	203.155.600	217	203.155.600	100,00	100,00	302,0 0	588.082.965	355,29	348,87
2.05. 2.05. 01.0 2.05.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUN G/RUMAH TANGGA	gedung	1	117.369.014	1	20.490.500	3	163.376.000	3	163.376.000	100,00	100,00	4,00	183.866.500	400,00	156,66
2.05. 2.05. 01.0 2.06.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS /OPERASIONAL	kendaraan dinas	12	166.188.494	12	101.990.039	134	154.002.746	134	154.002.746	100,00	100,00	146,0 0	255.992.785	1216,6 7	154,04
2.05. 2.05. 01.0 2.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	sarana prsarana	8	57.852.812	8		16	51.273.000	16	51.273.000	100,00	100,00	24,00	51.273.000	300,00	88,63
2.05 .2.0 5.01 .06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			169.033.920		48.125.990		101.156.830		97.776.690		96,66		145.902.680		86,32
2.05. 2.05. 01.0 6.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	buku	30	40.690.024	30	13.156.760	30	24.999.000	30	24.800.760	100,00	99,21	60,00	37.957.520	200,00	93,28
2.05. 2.05. 01.0 6.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	buku	30	33.127.713	30		30	20.000.000	30	18.914.000	100,00	94,57	60,00	18.914.000	200,00	57,09
2.05. 2.05. 01.0 6.03.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	buku	60	62.088.470	60	19.587.000	90	36.157.830	90	36.157.830	100,00	100,00	150,0 0	55.744.830	250,00	89,78

2.05. 2.05. 01.0 6.08.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD	buku	24	33.127.713	24	15.382.230	30	20.000.000	30	17.904.100	100,00	89,52	54,00	33.286.330	225,00	100,48
2.05 .2.0 5.01 .15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			19.337.645.868		12.021.403.098		19.135.402.155		18.977.774.015		99,18		30.999.177.113		160,30
2.05. 2.05. 01.1 5.01.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	sarana praarana persampaha n	40	1.002.848.728	40	4.611.561.800	55	8.157.353.668	55	8.157.353.668	100,00	100,00	95,00	12.768.915.468	237,50	1.273,2 6
2.05. 2.05. 01.1 5.02.	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	petugas kebersihan dan persampaha n	279	10.268.842.765	279	6.571.549.724	837	9.267.045.287	837	9.267.045.287	100,00	100,00	1116, 00	15.838.595.011	400,00	154,24
2.05. 2.05. 01.1 5.03.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	sosialisasi, pembinaan	30	885.829.250	30	62.593.174	32	363.312.000	32	208.621.100	100,00	57,42	62,00	271.214.274	206,67	30,62
2.05. 2.05. 01.1 5.04.	PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN SARANA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR	lokasi	1	7.064.057.500	1	719.853.400	1	1.279.360.000	1	1.276.422.760	100,00	99,77	2,00	1.996.276.160	200,00	28,26
2.05. 2.05. 01.1 5.05.	OPERASIONAL RETRIBUSI KEBERSIHAN	obyek retribusi	850	116.067.625	850	55.845.000	990	68.331.200	990	68.331.200	100,00	100,00	1840, 00	124.176.200	216,47	106,99
2.05 .2.0 5.01 .16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			850.969.850				977.397.800		977.397.800		100,00		977.397.800		114,86
2.05. 2.05. 01.1 6.02.	PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	jumlah pengawasan	50	176.650.166	50	561.040.446	150	162.110.200	150	162.110.200	100,00	100,00	200,0 0	723.150.646	400,00	409,37

2.05. 2.05. 01.1 6.03.	PENGLOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	jumlah pelaku	60	160.591.078	60	79.027.520	100	57.550.500	100	57.550.500	100,00	100,00	160,0 0	136.578.020	266,67	85,05
2.05. 2.05. 01.1 6.09.	PENINGKATAN PERAN SERTA PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	alat konservasi SDA&LH	30	75.000.000	30	646.942.675	30	87.194.500	30	87.194.500	100,00	100,00	60,00	734.137.175	200,00	978,85
2.05. 2.05. 01.1 6.11.	PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR	jumlah kendaraan	225	79.658.528	225	95.788.000	225	112.721.100	225	112.721.100	100,00	100,00	450,0 0	208.509.100	200,00	261,75
2.05. 2.05. 01.1 6.12.	PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN DAN SENGKETA LINGKUNGAN	kasus lingkungan	10	20.191.078	10	57.394.850	15	33.184.500	15	33.184.500	100,00	100,00	25,00	90.579.350	250,00	448,61
2.05. 2.05. 01.1 6.13.	PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN	pelaku usaha	80	110.000.000	80		220	175.834.700	220	175.834.700	100,00	100,00	300,0 0	175.834.700	375,00	159,85
2.05. 2.05. 01.1 6.14.	PENGAWASAN SUMBER EMISI TIDAK BERGERAK DAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR DI INDUSTRI	jumlah pelaku	35	66.991.000	35		63	168.090.600	63	168.090.600	100,00	100,00	98,00	168.090.600	280,00	250,92
2.05. 2.05. 01.1 6.15.	PENGAWASAN SUMBER PENCEMAR AIR	uji kualitas	50	161.888.000	50		108	180.711.700	108	180.711.700	100,00	100,00	158,0 0	180.711.700	316,00	111,63
2.05 .2.0 5.01 .17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM			273.637.000		143.748.100		290.348.399		290.348.399		100,00		434.096.499		158,64
2.05. 2.05. 01.1 7.04.	PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR DAN SUMBER-SUMBE R AIR	sarana konservasi	180	273.637.000	180	143.748.100	180	290.348.399	#VAL UE!	290.348.399	#VALU E!	100,00	#VAL UE!	434.096.499	#VALU E!	158,64

2.05 .2.0 5.01 .18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP			1.726.692.000		580.624.850		1.424.043.785		1.419.580.821		99,69		2.000.205.671		115,84
2.05. 2.05. 01.1 8.01.	PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	jumlah sekolah & jumlah permukiman	380	349.698.000	380	148.004.000	586	542.092.900	586	542.092.900	100,00	100,00	966,0 0	690.096.900	254,21	197,34
2.05. 2.05. 01.1 8.02.	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN	Sosialisasi	5	248.074.000	5	133.811.700	5	192.704.282	5	192.704.282	100,00	100,00	10,00	326.515.982	200,00	131,62
2.05. 2.05. 01.1 8.03.	PENYUSUNAN DATA SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH) NASIONAL DAN DAERAH	kajian	10	115.000.000	10	97.437.700	10	110.076.900	10	110.076.900	100,00	100,00	20,00	207.514.600	200,00	180,45
2.05. 2.05. 01.1 8.05.	KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA	rapat/sosial isasi	12	509.000.000	12	184.548.214	20	298.313.695	20	298.313.695	100,00	100,00	32,00	482.861.909	266,67	94,86
2.05. 2.05. 01.1 8.06.	PENYUSUNAN KAJIAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	kajian	25	328.154.000	25	4.446.250	25	100.000.000	25	95.537.036	100,00	95,54	50,00	99.983.286	200,00	30,47
2.05. 2.05. 01.1 8.07.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN	dokumen	400	176.766.000	400	12.376.986	400	180.856.008	400	180.856.008	100,00	100,00	800,0 0	193.232.994	200,00	109,32
2.05 .2.0 5.01 .19.	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI			175.000.000		97.934.000		100.000.000		98.071.450		98,07		196.005.450		112,00
2.05. 2.05. 01.1 9.02.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TEMPAT KHUSUS MEROKOK (CUKAI BLOCK GRANT)	tempat khusus merokok	3	175.000.000	3	97.934.000	3	100.000.000	3	98.071.450	100,00	98,07	6,00	196.005.450	200,00	112,00

2.05 .2.0 5.01 .20.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU			12.652.040.562		6.640.416.632		10.243.504.750		9.608.245.050		93,80		16.248.661.682		128,43
2.05. 2.05. 01.2 0.01.	PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN KOTA	taman/rth	12	1.665.451.000	12	823.078.300	16	934.530.550	16	934.530.550	100,00	100,00	28,00	1.757.608.850	233,33	105,53
2.05. 2.05. 01.2 0.02.	PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN KOTA	sarana RTH/TAMA N	100	6.121.540.781	100	2.542.405.232	416	4.981.827.200	416	4.981.827.200	100,00	100,00	516,0 0	7.524.232.432	516,00	122,91
2.05. 2.05. 01.2 0.03.	PEMBANGUNAN/ PENINGKATAN TAMAN	rth/Taman	16	3.357.040.781	16	3.274.933.100	30	3.550.777.000	30	3.187.928.900	100,00	89,78	46,00	6.462.862.000	287,50	192,52
2.05. 2.05. 01.2 0.04.	PEMELIHARAAN LAMPU HIAS/DEKORASI KOTA	rth/Taman	15	1.131.360.000	15		21	399.722.000	21	387.369.800	100,00	96,91	35,50	387.369.800	236,67	34,24
2.05. 2.05. 01.2 0.05.	PENYUSUNAN NORMA STANDAR PEDOMAN DAN MANUAL (NSPM) PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	buku	150	376.648.000	150		150	376.648.000	150	116.588.600	100,00	30,95	300,0 0	116.588.600	200,00	30,95
2.05 .2.0 5.01 .21.	PROGRAM PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN			1.414.951.000		516.347.306		1.335.134.907		1.335.134.907		100,00		1.851.482.213		130,85
2.05. 2.05. 01.2 1.01.	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	alat	8	906.641.000	8	135.728.500	26	932.292.571	26	932.292.571	100,00	100,00	34,00	1.068.021.071	425,00	117,80
2.05. 2.05. 01.2 1.02.	SERTIFIKASI LABORATORIUM LINGKUNGAN	alat	21	174.955.000	21	63.064.626	21	115.871.836	21	115.871.836	100,00	100,00	42,00	178.936.462	200,00	102,28
2.05. 2.05. 01.2 1.03.	OPERASIONAL LABORATORIUM LINGKUNGAN	petugas	10	333.355.000	10	317.554.180	24	286.970.500	24	286.970.500	100,00	100,00	34,00	604.524.680	340,00	181,35
2.06 .01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							10.224.744.600,00								
2.06 .	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.939.902.390,00		7.461.247.592,00				13.820.627.708,00		132,11

2.06 .2.0 6.01 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			9.514.764.000		812.286.185		2.906.076.175		655.542.607		22,56		1.467.828.792		15,43
2.06. 2.06. 01.0 1.02.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAAN	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (24 jenis)	282	1.248.278.000	310	136.568.430	282	1.979.980.575	310	197.980.575	109,93	10,00	620,0 0	334.549.005	219,86	26,80
2.06. 2.06. 01.0 1.03.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UN DANGAN	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan (2 macam koran)	2	19.500.000	2	1.920.000	6	2.500.000	6	1.760.000	100,00	70,40	8,00	3.680.000	400,00	18,87
2.06. 2.06. 01.0 1.05.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Persentase Tersedianya makanan dan minuman dalam 1 tahun	100	1.107.424.000	100	73.240.100	150	110.900.000	150	40.407.200	100,00	36,44	250,0 0	113.647.300	250,00	10,26
2.06. 2.06. 01.0 1.06.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan	100	4.134.674.000	100	315.037.193	150	473.207.600	150	192.948.894	100,00	40,77	250,0 0	507.986.087	250,00	12,29
2.06. 2.06. 01.0 1.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	Tersedianya jasa kantor (12 bl):	100	1.478.104.000	100	177.335.000	300	117.704.000	300	116.706.350	100,00	99,15	400,0 0	294.041.350	400,00	19,89
2.06. 2.06. 01.0 1.08.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	Tersedianya jasa operasional (12 bl)	100	1.526.784.000	100	108.185.462	300	221.784.000	300	105.739.588	100,00	47,68	400,0 0	213.925.050	400,00	14,01
2.06 .2.0 6.01 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			17.674.547.200		1.361.266.108		2.237.741.340		1.990.281.952		88,94		3.351.548.060		18,96
2.06. 2.06. 01.0 2.03.	PENGADAAN PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1	12.282.144.200	1	943.460.560	201	1.762.271.000	201	1.638.577.887	100,00	92,98	202,0 0	2.582.038.447	20200, 00	21,02
2.06. 2.06. 01.0 2.05.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUN G/RUMAH TANGGA	Terpelihara nya gudang arsip & ruangan, dan redesain	6	2.427.523.000	6	244.189.000	6	212.490.340	4	212.490.340	66,67	100,00	10,00	456.679.340	166,67	18,81

		papan nama dinas														
2.06. 2.06. 01.0 2.06.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS /OPERASIONAL	Terpelihara nya 7 unit mobil	1	1.791.780.000	1	123.127.098	201	187.980.000	201	105.915.080	100,00	56,34	202,0 0	229.042.178	20200, 00	12,78
2.06. 2.06. 01.0 2.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Jumlah peralatan & perlengkap an yg terpelihara	350	1.173.100.000	350, 00	50.489.450	400	75.000.000	400	33.298.645	100,00	44,40	750,0 0	83.788.095	214,29	7,14
2.06 .2.0 6.01 .06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			1.053.472.000		80.526.060		126.125.975		97.595.471		77,38		178.121.531		16,91
2.06. 2.06. 01.0 6.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersusunny a LKjIP, LKPJ, LPPD dan Laporan realisasi keg	125	239.810.000	125	31.496.900	125	25.000.000	125	18.599.400	100,00	74,40	250,0 0	50.096.300	200,00	20,89
2.06. 2.06. 01.0 6.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Tersusunny a laporan keuangan Perangkat Daerah	72	198.500.000	72	-	78	39.293.000	78	30.424.997	100,00	77,43	150,0 0	30.424.997	208,33	15,33
2.06. 2.06. 01.0 6.03.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	Tersusunny a dokumen perencanaa n OPD	480	400.662.000	480	36.689.860	530	37.332.975	530	37.332.975	100,00	100,00	1010, 00	74.022.835	210,42	18,48
2.06. 2.06. 01.0 6.07.	PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Tersusunny a laporan hasil monitoring dan evaluasi	24	214.500.000	24	12.339.300	24	24.500.000	2	11.238.099	8,33	45,87	26,00	23.577.399	108,33	10,99
2.06 .2.0 6.01 .15.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK			13.009.794.800		2.033.473.000		1.525.934.800		1.215.070.200		79,63		3.248.543.200		24,97
2.06. 2.06. 01.1 5.01.	PELAKSANAAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)	Terlaksanan ya pelayanan KTP_el	100	4.107.011.800	100	994.041.000	300	227.052.000	300	164.671.000	100,00	72,53	400,0 0	1.158.712.000	400,00	28,21

2.06. 2.06. 01.1 5.02.	PENATAAN ARSIP DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK	Tertatanya arsip pendaftaran penduduk	100	414.400.000	100	-	150	114.400.000	150	97.521.700	100,00	85,25	250,0 0	97.521.700	250,00	23,53
2.06. 2.06. 01.1 5.03.	PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terlaksanan ya pendataan dan pemberian identitas Penduduk rentan	175	294.367.000	175	144.557.000	175	26.866.800	24	5.915.000	13,71	22,02	199,0 0	150.472.000	113,71	51,12
2.06. 2.06. 01.1 5.04.	PELAKSANAAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)	Jumlah KIA tercetak	3000 00	1.242.790.000	3000 00	-	300 000	124.990.000	21.3 43	56.414.500	7,11	45,14	32134 3,00	56.414.500	107,11	4,54
2.06. 2.06. 01.1 5.05.	PELAYANAN MUTASI PENDUDUK	Jumlah penduduk pindah/dat ang	1000 00	684.346.000	1000 00	-	100 000	119.346.000	7.29 3	87.464.000	7,29	73,29	10729 3,00	87.464.000	107,29	12,78
2.06. 2.06. 01.1 5.06.	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah KK yg terbit	100	6.266.880.000	100	894.875.000	300	913.280.000	300	803.084.000	100,00	87,93	400,0 0	1.697.959.000	400,00	27,09
2.06 .2.0 6.01 .16.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL			4.023.127.000		419.820.374		454.492.600		335.404.900		73,80		755.225.274		18,77
2.06. 2.06. 01.1 6.01.	PENJILIDAN DAN PENATAAN ARSIP PENCATAAN SIPIL	Persentase arsip yg terjilid dan tertata	100	599.082.000	100	130.665.000	150	120.600.000	150	103.629.300	100,00	85,93	250,0 0	234.294.300	250,00	39,11
2.06. 2.06. 01.1 6.02.	SIDANG PENCATATAN PERKAWINAN	Jumlah Akta Perkawinan & perceraian yg terbit	480	781.635.000	480	81.393.374	509	81.280.600	509	18.553.600	100,00	22,83	989,0 0	99.946.974	206,04	12,79
2.06. 2.06. 01.1 6.03.	VERIFIKASI KUTIPAN AKTA KELAHIRAN	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran anak 0-18 th	100, 00	2.067.576.000	100, 00	207.762.000	300	224.352.000	300	197.224.000	100,00	87,91	400,0 0	404.986.000	400,00	19,59
2.06. 2.06. 01.1 6.04.	VERIFIKASI KUTIPAN AKTA KEMATIAN	Jumlah Akta Kematian yg terbit	1083 0	574.834.000	1083 0	-	11.3 89	28.260.000	11.3 89	15.998.000	100,00	56,61	22219 ,00	15.998.000	205,16	2,78
2.06 .2.0 6.01 .17.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN INOVASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			6.805.930.300		834.890.158		1.182.335.500		836.568.092		70,76		1.671.458.250		24,56

2.06. 2.06. 01.1 7.01.	PENGEMBANGAN WEBSITE DINAS	Terpelihara nya website Dinas	1	367.000.000	1	-	1	54.480.000	1	42.313.900	100,00	77,67	2,00	42.313.900	200,00	11,53
2.06. 2.06. 01.1 7.02.	SISTEM INFORMASI PENDUKUNG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah sistem informasi yg dibuat	13	1.265.800.000	13	-	13	218.362.500	2	163.210.400	15,38	74,74	15,00	163.210.400	115,38	12,89
2.06. 2.06. 01.1 7.03.	PEMELIHARAAN, PENGAMANAN DAN PENGAWASAN PERANGKAT SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jaringan dan perangkat SIAK yg terpelihara	19	1.372.897.000	19	153.159.258	57	157.499.000	57	110.704.092	100,00	70,29	76,00	263.863.350	400,00	19,22
2.06. 2.06. 01.1 7.04.	SINKRONISASI, KONSOLIDASI DOKUMENTASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN	Jumlah data ganda dan anomali yg tervalidasi	100	1.281.500.000	100	322.870.900	300	195.302.000	300	107.764.000	100,00	55,18	400,00	430.634.900	400,00	33,60
2.06. 2.06. 01.1 7.05.	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Profil Kependudukan yg tersusun	300	594.662.000	300	83.138.000	300	67.152.000	-	65.687.500	0,00	97,82	300,00	148.825.500	100,00	25,03
2.06. 2.06. 01.1 7.06.	PENYUSUNAN PELAPORAN DATA PENDUDUK	Jumlah pelaporan yg tersusun	492	473.176.000	492	-	528	51.768.000	528	49.200.000	100,00	95,04	1020,00	49.200.000	207,32	10,40
2.06. 2.06. 01.1 7.07.	PENGOLAHAN INFORMASI ARSIP DATA KEPENDUDUKAN	Jumlah arsip yg dialihmedia	100	40.758.300	100	275.722.000	300	235.500.000	300	212.738.200	100,00	90,33	400,00	488.460.200	400,00	1.198,43
2.06. 2.06. 01.1 7.08.	DOKUMENTASI DAN PENGEMBANGAN DATA WAREHOUSE KEPENDUDUKAN	Terlaksanan ya pemeliharaa n data warehouse	1	505.350.000	1	-	2	55.504.000	2	52.172.000	100,00	94,00	3,00	52.172.000	300,00	10,32
2.06. 2.06. 01.1 7.09.	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yg memanfaatk an data kependudu kan	9	904.787.000	9	-	14	146.768.000	14	32.778.000	100,00	22,33	23,00	32.778.000	255,56	3,62
2.06 .2.0 6.01 .18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			25.157.768.000		817.118.231		3.507.196.000		2.330.784.370		66,46		3.147.902.601		12,51

2.06. 2.06. 01.1 8.01.	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN	Jumlah aparap yg ikut pelatihan / bintek	1020	1.885.731.000	1020	191.614.000	102 0	213.750.000	170	129.876.000	16,67	60,76	1190, 00	321.490.000	116,67	17,05
2.06. 2.06. 01.1 8.02.	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	Jumlah peserta sosialisasi	356	4.089.088.000	356	424.219.200	721	226.150.000	721	164.086.750	100,00	72,56	1077, 00	588.305.950	302,53	14,39
2.06. 2.06. 01.1 8.03.	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEPENDUDUKAN	Hasil survey SKM	1	1.270.471.000	1	98.007.000	2	109.250.000	2	86.968.000	100,00	79,60	3,00	184.975.000	300,00	14,56
2.06. 2.06. 01.1 8.04.	PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN JEMPUT BOLA	Jumlah tempat pelayanan jemput bola	432	1.447.176.000	432	103.278.031	434	242.744.000	434	48.247.000	100,00	19,88	866,0 0	151.525.031	200,46	10,47
2.06. 2.06. 01.1 8.05.	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terlaksanan ya pelayanan adminstras i kependudu kan	12	16.465.302.000	12	-	50	2.715.302.000	50	1.901.606.620	100,00	70,03	62,00	1.901.606.620	516,67	11,55
2.07 .01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							4.526.361.000,00								
2.07 .	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							4.526.361.000,00								
2.07 .2.0 7.01 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			310.418.000		340.500.000		310.418.000		281.434.651		90,66		621.934.651		200,35
2.07. 2.07. 01.0 1.02.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	tersedianya kertas kop, amplop, surat, lembar disposisi	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	9.700.000	100,00	97,00	200,0 0	19.700.000	200,00	197,00
2.07. 2.07. 01.0 1.03.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UN DANGAN	Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang- undangan	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	4.500.000	100,00	90,00	200,0 0	9.500.000	200,00	190,00
2.07. 2.07. 01.0 1.05.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Air minum dan snack tamu	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	20.200.000	100,00	80,80	200,0 0	45.200.000	200,00	180,80
2.07. 2.07. 01.0 1.06.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Perjalanan dinas pegawai	100	119.918.000	100	150.000.000	100	119.918.000	100	125.506.001	100,00	104,66	200,0 0	275.506.001	200,00	229,75

2.07. 2.07. 01.0 1.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	Honorarium tenaga administras i kantor	100	134.000.000	100	134.000.000	100	134.000.000	100	108.350.000	100,00	80,86	200,0 0	242.350.000	200,00	180,86
2.07. 2.07. 01.0 1.08.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	Alat listrik, alat kebersihan dan tenaga kebersihan kantor	100	16.500.000	100	16.500.000	100	16.500.000	100	13.178.650	100,00	79,87	200,0 0	29.678.650	200,00	179,87
2.07 .2.0 7.01 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			316.600.000		419.545.000		316.600.000		294.788.940		93,11		714.333.940		225,63
2.07. 2.07. 01.0 2.03.	PENGADAAN PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Jumlah peralatan dan perlengkap an kantor yang tersedia	100	201.600.000	100	227.000.000	100	201.600.000	100	198.916.690	100,00	98,67	200,0 0	425.916.690	200,00	211,27
2.07. 2.07. 01.0 2.06.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS /OPERASIONAL	Pemeliharaa n dan perawatan kendaraan dinas	100	100.000.000	100	177.545.000	100	100.000.000	100	86.122.250	100,00	86,12	200,0 0	263.667.250	200,00	263,67
2.07. 2.07. 01.0 2.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Pemeliharaa n dan perawatan peralatan dinas	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	9.750.000	100,00	65,00	200,0 0	24.750.000	200,00	165,00
2.07 .2.0 7.01 .06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		100,00		54.000.000		200,00
2.07. 2.07. 01.0 6.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Tersedianny a laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	34	12.000.000	34	12.000.000	102	12.000.000	102	12.000.000	100,00	100,00	136,0 0	24.000.000	400,00	200,00
2.07. 2.07. 01.0 6.03.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	Jumlah buku laporan Renja	10	15.000.000	10	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	100,00	100,00	40,00	30.000.000	400,00	200,00

2.07. .2.0 7.01 .15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAAN			249.351.000		394.685.250		1.137.937.400		382.312.500		33,60		776.997.750		311,61
2.07. 2.07. 01.1 5.01.	PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN (RT/RW)	Jumlah pengurus lembaga terlatih	320	104.351.000	320	250.000.000	640	104.351.000	640	94.431.000	100,00	90,49	960,0 0	344.431.000	300,00	330,07
2.07. 2.07. 01.1 5.03.	EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	Terlaksanan ya evaluasi lembaga keuangan mikro	18	45.000.000	18	45.000.000	36	45.000.000	36	32.262.500	100,00	71,69	54,00	77.262.500	300,00	171,69
2.07. 2.07. 01.1 5.05.	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK), DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) KABUPATEN DAN ORGANISASI WANITA	0	0	-	-	-	-	888.901.150	-	255.619.000	0,00	28,76	0,00	255.619.000	0,00	-
2.07. 2.07. 01.1 5.06.	PELATIHAN KEPEMIMPINAN WANITA	Pelatihan kader desa	370	100.000.000	370	99.685.250	370	99.685.250	-	-	0,00	-	370,0 0	99.685.250	100,00	99,69
2.07. .2.0 7.01 .16.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA			724.000.000		1.074.000.000		805.581.000		635.947.650		78,94		1.709.947.650		236,18
2.07. 2.07. 01.1 6.02.	EVALUASI DESA/KELURAH AN BERHASIL	Evaluasi desa berhasil	18	250.000.000	18	450.000.000	54	239.000.000	54	225.725.800	100,00	94,45	72,00	675.725.800	400,00	270,29
2.07. 2.07. 01.1 6.03.	BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bulan bhakti gotong royong masyarakat	356	100.000.000	356	250.000.000	356	98.745.200	356	96.464.200	100,00	97,69	712,0 0	346.464.200	200,00	346,46

2.07. 2.07. 01.1 6.06.	PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	Terlaksanan ya pembangun an kawasan pedesaan atas prakarsa masyarakat	1	174.000.000	1	174.000.000	3	174.000.000	3	138.074.650	100,00	79,35	4,00	312.074.650	400,00	179,35
2.07. 2.07. 01.1 6.11.	PENGEMBANGAN LABSITE DAN IMPLEMENTASI SERTA PENDAMPINGAN SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (SMPP)	-	-	-	-	-	-	48.000.000	4	47.240.000	-	-	4	47.240.000	-	-
2.07. 2.07. 01.1 6.12.	TILIK WARGA	Terlaksanan ya peran aktif masyarakat dalam permasalah an di desa	2	200.000.000	2	200.000.000	6	199.553.800	6	125.558.000	100,00	62,92	8,00	325.558.000	400,00	162,78
2.07. 2.07. 01.1 6.15.	OPERASIONAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	-	-	-	-	-	-	46.282.000	-	2.885.000	-	-	-	2.885.000	-	-
2.07 .2.0 7.01 .17.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA			570.000.000		372.730.000		516.150.800		596.101.325		115,49		968.831.325		169,97
2.07. 2.07. 01.1 7.03.	PENYUSUNAN DRAFT RANPERDA BIDANG PEMERINTAH DESA	Tersusunnya a Draft Ranperda bidang Pemerintah Desa	2	237.500.000	6	66.410.000	6	66.410.000	6	15.620.000	100,00	23,52	12,00	82.030.000	600,00	34,54
2.07. 2.07. 01.1 7.04.	FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN RAPAT KOORDINASI BIDANG PEMERINTAH DESA/KELURAH AN	-	-	-	-	-	-	71.420.800	30	64.356.300	-	-	30	64.356.300	-	-
2.07. 2.07. 01.1 7.05.	MONITORING DAN PELANTIKAN KEPALA DESA	Terlaksanan ya Monitoring dan Pelantikan Kepala Desa	20	332.500.000	20	306.320.000	60	306.320.000	60	511.165.025	100,00	166,87	80,00	817.485.025	400,00	245,86

2.07. 2.07. 01.1 7.06.	DESIMINASI DAN PENYUSUNAN REKAPITULASI PROFIL DESA/KELURAH AN	-	-	-	-	-	72.000.000	-	4.960.000	-	-	-	4.960.000	-	-	
2.07 .2.0 7.01 .19.	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA			1.315.000.000		1.294.699.000		1.412.673.800		873.472.220		61,83		2.168.171.220		164,88
2.07. 2.07. 01.1 9.01.	FASILITASI DANA DESA	Terlaksanan ya sosialisasi pemanfaata n fasilitasi dana desa dan Alokasi Dana Desa	330	505.000.000	330	504.713.000	990	504.713.000	990	479.916.080	100,00	95,09	1320, 00	984.629.080	400,00	194,98
2.07. 2.07. 01.1 9.03.	BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Terlaksanan ya bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa	370	200.000.000	370	197.188.000	111 0	197.188.000	1.11 0	194.336.500	100,00	98,55	1480, 00	391.524.500	400,00	195,76
2.07. 2.07. 01.1 9.04.	PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA (BUMDes, PASAR DESA, LEMBAGA EKONOMI MIKRO)	Terlaksanan ya pelatihan dan pembinaan manajemen lembaga ekonomi desa	100	250.000.000	100	247.000.000	100	247.000.000	100	68.996.600	100,00	27,93	200,0 0	315.996.600	200,00	126,40
2.07. 2.07. 01.1 9.05.	LOMBA BUMDes DAN UPKU	-	-	-	-	-	117.974.800	-	22.401.440	-	-	-	22.401.440	-	-	
2.07. 2.07. 01.1 9.07.	PEMBERDAYAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU)	Terlaksanan ya pembinaan terhadap pengurus Unit pengelola keuangan dan usaha (UPKU)	10	85.000.000	10	80.798.000	10	80.798.000	-	-	0,00	-	10,00	80.798.000	100,00	95,06
2.07. 2.07. 01.1 9.09.	PENDAMPINGAN KEGIATAN JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA (JALIN MATRA)	Terlaksanan ya program jalin matra provinsi jawa timur	660	275.000.000	660	265.000.000	660	265.000.000	630	107.821.600	95,45	40,69	1290, 00	372.821.600	195,45	135,57

2.08.01.	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							7.180.137.450,00		6.554.886.056,00				12.336.116.112,00		
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							7.180.137.450,00		6.554.886.056,00				12.336.116.112,00		
2.08.2.08.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			534.426.000		464.996.256		545.026.000		464.996.256		85,32	0,00	929.992.512		174,02
2.08.2.08.01.01.02.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Tersedianya Jenis barang cetakan dan penggandaan	7	51.000.000,00	7	43.435.140,00	21	51.000.000,00	21	43.435.140	100,00	85,17	28,00	86.870.280	400,00	170,33
2.08.2.08.01.01.03.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Tersedianya biaya untuk membayar surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	4	13.700.000,00	4	11.470.000,00	12	13.700.000,00	12	11.470.000	100,00	83,72	16,00	22.940.000	400,00	167,45
2.08.2.08.01.01.05.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Tersedianya makanan dan minuman Harian, Tamu dan Kegiatan	1	35.000.000,00	1	31.060.000,00	1	35.000.000,00	1	31.060.000	100,00	88,74	2,00	62.120.000	200,00	177,49
2.08.2.08.01.01.06.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Tersedianya Anggaran pelaksanaan kegiatan Rakor dan konsultasi	100	152.240.000,00	100	122.250.821,00	1.142	162.840.000,00	1.142	122.250.821	100,00	75,07	1242,00	244.501.642	1242,00	160,60
2.08.2.08.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	Tersedianya jasa bagi petugas administrasi keuangan dan perkantoran	11	105.096.000,00	11	105.096.000,00	33	105.096.000,00	33	105.096.000	100,00	100,00	44,00	210.192.000	400,00	200,00

2.08. 2.08. 01.0 1.08.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	Tersedianya jasa untuk pelaksanaa n kegiatan operasional perkantoran : Pejabat Pengadaan Belanja telepon Belanja listrik Belanja Jasa kebersihan Belanja Jasa Tenaga Terampil	12	177.390.000,00	12	151.684.295,00	36	177.390.000,00	36	151.684.295	100,00	85,51	48,00	303.368.590	400,00	171,02
2.08 .2.0 8.01 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			741.000.000		1.305.480.250		1.305.480.250		1.305.480.250		100,00		2.610.960.500		352,36
2.08. 2.08. 01.0 2.03.	PENGADAAN PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Tersedianya kebutuhan melalui pembelian peralatan dan perlengkap n kantor / rumah tangga	63	253.000.000	63	494.969.000	126	494.969.000	126	494.969.000	100,00	100,00	189,0 0	989.938.000	300,00	391,28
2.08. 2.08. 01.0 2.05.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUN G/RUMAH TANGGA	Terpelihara nya gedung dan bangunan, renovasi bangunan balai penyuluh	1	279.000.000	1	541.861.250	6	541.861.250	6	541.861.250	100,00	100,00	7,00	1.083.722.500	700,00	388,43
2.08. 2.08. 01.0 2.06.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS /OPERASIONAL	Service kendaraan roda 4, penggantian suku cadang dan bbm roda 4	1	160.000.000	1	210.150.000	2	210.150.000	2	210.150.000	100,00	100,00	3,00	420.300.000	300,00	262,69
2.08. 2.08. 01.0 2.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PER LENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Tersedianya perbaikan peralatan kerja	7	49.000.000	7	58.500.000	14	58.500.000	14	58.500.000	100,00	100,00	21,00	117.000.000	300,00	238,78

2.08 .2.0 8.01 .05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			10.000.000		6.260.000		10.000.000		6.260.000		62,60		12.520.000		125,20
2.08. 2.08. 01.0 5.04.	MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SKPD	Terwujudny a penyusunan angka kredit melalui pertemuan PLKB	70	10.000.000,00	70	6.260.000,00	140	10.000.000,00	140	6.260.000	100,00	62,60	210,0 0	12.520.000	300,00	125,20
2.08 .2.0 8.01 .06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			99.826.000		95.632.600		99.826.000		95.632.600		95,80		191.265.200		191,59 8582
2.08. 2.08. 01.0 6.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Pertemuan Penyusunan LAKIP Pertemuan Penyusunan LKPJ Pertemuan Penatausah aan Keu Pertemuan Evaluasi Anggaran Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, Capaian Kinerja	1	48.125.600,00	1	44.925.600,00	1	48.125.600	1	44.925.600	100,00	93,35	2,00	89.851.200	200,00	186,70

2.08. 2.08. 01.0 6.03.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	Pertemuan Renja/Foru m SKPD Pertemuan Tim Penysn Renja Pertemuan Tim Penysn Renstra Buku Renja, RKA, DPA, Revisi Renstra	1	51.700.400,00	1	50.707.000,00	1	51.700.400	1	50.707.000	100,00	98,08	2,00	101.414.000	200,00	196,16
2.08 .2.0 8.01 .15.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA			1.362.827.700		1.181.542.850		1.375.177.700		1.181.542.850		85,92		2.363.085.700		173,40
2.08. 2.08. 01.1 5.01.	PENYEDIAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN	Jumlah alat kontrasepsi yang dibeli	357	104.500.000,00	357	0,00	357	104.500.000,00	-	-	0,00	-	357,0 0	-	100,00	-
2.08. 2.08. 01.1 5.06.	DUKUNGAN PENGGERAKAN DAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) BAGI MASYARAKAT NON PESERTA BPJS (BADAN PELAYANAN JAMINAN SEHAT)	Jumlah peserta KB MKJP yang dilayani	122	115.662.500,00	122	114.448.000,00	366	115.662.500,00	366	114.448.000	100,00	98,95	488,0 0	228.896.000	400,00	197,90
2.08. 2.08. 01.1 5.07.	PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI SETIAP KECAMATAN	Jumlah peserta kegiatan pembentuk an Kampung KB	45	9.500.000,00	45	9.500.000,00	135	9.500.000,00	135	9.500.000	100,00	100,00	180,0 0	19.000.000	400,00	200,00
2.08. 2.08. 01.1 5.08.	PELATIHAN CONTRACEPTIVE TECHNIQUE UPDATE (CTU) BAGI BIDAN	Jumlah peserta pelatihan CTU	30	47.500.000,00	30	59.850.000,00	90	59.850.000,00	90	59.850.000	100,00	100,00	120,0 0	119.700.000	400,00	252,00

2.08. 2.08. 01.1 5.09.	RAPAT KOORDINASI / PEMBINAAN DENGAN PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB)	Jumlah Peserta yang mengikuti rapat evaluasi kinerja	67	40.707.500,00	67	40.007.500,00	201	40.707.500,00	201	40.007.500	100,00	98,28	268,0 0	80.015.000	400,00	196,56
2.08. 2.08. 01.1 5.10.	MONITORING KELUARGA BERENCANA MELALUI SARANA MOBILITAS TIM KELUARGA BERENCANA KELILING	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan TMKK, Kesatuan Gerak PKK-KB Kes	200	79.767.700,00	200	77.155.700,00	600	79.767.700,00	600	77.155.700	100,00	96,73	800,0 0	154.311.400	400,00	193,45
2.08. 2.08. 01.1 5.11.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Tercukupin ya operasional Balai Penyuluh KB dlm meningkatk an pelayanan program kependudu kan keluarga berencana dan pemberdaya an keluarga di Balai Penyuluh KB	17	965.190.000,00	17	880.581.650,00	51	965.190.000,00	51	880.581.650	100,00	91,23	68,00	1.761.163.300	400,00	182,47
2.08 .2.0 8.01 .16.	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA			2.596.227.500		2.622.518.100		3.737.627.500		3.396.174.100		90,86		6.018.692.200		231,82
2.08. 2.08. 01.1 6.01.	PEMBINAAN KELOMPOK REMAJA PEDULI KELUARGA BERENCANA	terselenggar anya pembinaan kelompok remaja peduli KB	75	16.000.000,00	75	15.856.000,00	150	16.000.000,00	150	15.856.000	100,00	99,10	225,0 0	31.712.000	300,00	198,20
2.08. 2.08. 01.1 6.02.	MONITORING PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA	Data base keluarga sejahtera	32	551.350.000,00	32	549.360.100,00	64	551.350.000,00	64	549.360.100	100,00	99,64	96,00	1.098.720.200	300,00	199,28

2.08. 2.08. 01.1 6.03.	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KELUARGA BERENCANA	Kelompok masyarakat peduli KB yg berdaya dan Peningkatan Partisipasi masyarakat pada program KB	356	1.945.950.000,00	356	1.943.132.000,00	712	1.945.950.000,00	712	1.943.132.000	100,00	99,86	1068, 00	3.886.264.000	300,00	199,71
2.08. 2.08. 01.1 6.04.	PENYULUHAN TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN KEPADA REMAJA	Terlaksanan ya penyuluhan pendewasaa n usia pernikahan	90	31.500.000,00	90	31.500.000,00	180	31.500.000,00	180	31.500.000	100,00	100,00	270,0 0	63.000.000	300,00	200,00
2.08. 2.08. 01.1 6.05.	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) KELUARGA SEJAHTERA	Tersedianya media KIE keluarga sejahtera	64	14.820.000,00	64	0,00	64	14.820.000,00	64	-	100,00	-	128,0 0	-	200,00	-
2.08. 2.08. 01.1 6.07.	FASILITASI FORUM PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) BAGI KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR SEKOLAH	-	-	-	-	-	-	16.762.500	48	13.645.000	-	-	48	13.645.000	-	-
2.08. 2.08. 01.1 6.10.	PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA DI KECAMATAN	terbentukny a kelompok PIK-KRR	48	16.762.500,00	48	63.785.000,00	240	121.900.000	240	63.785.000	100,00	52,33	288,0 0	127.570.000	600,00	761,04
2.08. 2.08. 01.1 6.12.	PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)	Terwujudny a pelatihan tenaga pendamping kelompok UPPKS	48	19.845.000,00	48	18.885.000,00	96	19.845.000,00	96	18.885.000	100,00	95,16	144,0 0	37.770.000	300,00	190,33
2.08. 2.08. 01.1 6.13.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER BIDAN G KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	160	1.019.500.000,00	160	760.011.000	100	75	160	760.011.000	-	-

2.08 .2.0 8.01 .17.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			119.350.000		104.800.000		107.000.000		104.800.000		97,94		209.600.000		175,62
2.08. 2.08. 01.1 7.01.	ADVOKASI PENGENDALIAN PENDUDUK TINGKAT KECAMATAN DAN DESA	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Advokasi	320	50.000.000,00	320	50.000.000,00	640	50.000.000,00	640	50.000.000	100,00	100,00	960,0 0	100.000.000	300,00	200,00
2.08. 2.08. 01.1 7.04.	RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPk)	Jumlah Peserta yang mengikuti RAKERDA	100	38.000.000,00	100	35.800.000,00	300	38.000.000,00	300	35.800.000	100,00	94,21	400,0 0	71.600.000	400,00	188,42
2.08. 2.08. 01.1 7.05.	PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS)	Jumlah Peserta yang mengikuti HARGANAS	390	19.000.000,00	390	19.000.000,00	780	19.000.000,00	780	19.000.000	100,00	100,00	1170, 00	38.000.000	300,00	200,00
2.08. 2.08. 01.1 7.06.	PEMBENTUKAN PEMUDA PEDULI PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pemuda/Pe mudi peduli KB	40	12.350.000,00	40	0,00	0	0,00	-	-	0,00	-	40,00	-	100,00	-

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.5.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Gresik dan sekaligus berhubungan langsung dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah akan diuraikan berikut ini :

Pendidikan

- a). Angka putus sekolah tingkat SD dan SMP yang masih tinggi mencapai 0.0174 untuk Pendidikan Dasar dan 0,07 untuk Sekolah Menengah Pertama
- b). Jumlah Produktifitas Karya Tulis Siswa masih 2% di tahun 2017
- c). Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi sertifikasi masih 52,83 dari Total Keseluruhan tenaga pendidik.

Kesehatan

- a). Persentase Kasus Pemasungan masih tinggi mencapai 0,16%
- b). Puskesmas yang terakreditasi masih 68,75%
- c). Ponkesdes Pustu Sesuai Standar masih 46%
- d). Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar masih 29,67%

Infrastruktur

- a). Infrastruktur Jalan dan Jembatan Masih Perlu Pemeliharaan dengan kondisi jalan dan jembatan mantap mencapai 72% dan 67% untuk jembatan
- b). Persentase Ketersediaan lampu PJU masih 48,14%
- c). Saluran Pengendalian banjir masih 36,63%
- d). Kemantapan Irigasi masih 22,16%

Penanggulangan Kemiskinan

- a). Tingkat partisipasi angkatan kerja yang masih rendah
- b). Masih terdapat PMKS yang memerlukan penangananan
- c). penyandang disabilitas perlu ditangani secara tuntas
- d). eks Penyandang Penyakit Sosial Masih banyak yang belum tertangani
- e). Persentase Penanganan WRSE

Dari permasalahan diatas muncul Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD Kabupaten Gresik. Artinya perlu tindakan dan peningkatan kinerja dalam RKPD ditahun 2019 sehingga masing-masing permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan demi ketercapaian target yang ditetapkan di RPJMD. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya sebagaimana berikut :

Tabel 2.42

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi ketidakberhasilan

Prioritas	Kebijakan atau tindakan
Pendidikan	a). Peningkatan atribusi dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan seluruh masyarakat Gresik didukung penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, transparan, berkualitas, dan inklusif dengan mengintegrasikan keluhuran Budaya Gresik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama'an; b). Penguatan kualitas penyelenggaran pendidikan melalui transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pengelolaan anggaran pendidikan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai.
Kesehatan	a). Peningkatan pembangunan kesehatan melalui penguatan upaya kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) secara promotif maupun preventif, pemenuhan jaminan kesehatan, aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan serta pembangunan sumber daya kesehatan. b). Penguatan pembangunan gizi masyarakat melalui penguatan upaya kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) secara promotif maupun preventif ditunjang penguatan keberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan; c). Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan Obat, Mutu Obat, Makanan, dan Sumberdaya Manusia Kesehatan d). Perlindungan terintegratif secara promotif, preventif, dan kuratif (finasial) terhadap

	masyarakat kategori miskin dan rentan miskin dalam mengakses layanan
Infrastruktur	a). Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan harmonis berlandaskan Rencana Tata Ruang guna mendukung daya saing daerah, menguatkan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali didukung keselarasan dan pemerataan pembangunan. b). Peningkatan kualitas layanan dasar infrastruktur melalui perbaikan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, sarana prasarana penunjang, dan peningkatan keberdayaan masyarakat. c). Penguatan peran lintas sektor dalam meletakkan pembangunan sesuai dengan tata ruang ditunjang komprehensifitas regulasi dan validitas data.
Penanggulangan Kemiskinan	a). Keberlanjutan dan Kebersinambungan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang berkeadilan, dan kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan. b). Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui penguatan akses dan produktifitas terhadap pengelolaan sumberdaya produktif

2.5.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Berdasarkan Gambaran Umum daerah maka permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik pada tahun 2017 dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 2.43

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan Pembangunan
1.	Pendidikan	- Masih lemahnya evaluasi dan klarifikasi terhadap APBS. - Integrasi Output Pendidikan dan Networking Dunia Kerja - Integrasi dan Validasi Data Pokok Pendidikan - Pencapaian SPM yang belum optimal terutama untuk satuan pendidikan madrasah

		- Kesejahteraan tenaga pendidik masih belum terdistribusikan dengan merata - Banyak penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang didirikan oleh masyarakat belum berbadan hukum
2.	Kesehatan	- Prevalensi HIV / AIDS Tinggi - Prevalensi TB tinggi - Proporsi rumah tangga yang mempunyai akses berkelanjutan terhadap air minum layak belum mencapai 100%; - Proporsi rumah tangga yang mempunyai akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak belum mencapai 100%; - Masih Ditemukan Garam Konsumsi Dengan Kandungan Iodium Dibawah 30 Ppm - Jumlah Dokter Umum dan Dokter Spesialis Masih Kurang
3.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	- Ketersediaan distribusi air bersih perpipaan PDAM dan non perpipaan belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat - jumlah keluarga memiliki SPAL 60,99%, sehingga masih ada 39,01% yang belum memiliki SPA - Kesulitan memproses izin mendirikan bangunan karena terdapat disharmoni antara dokumen pertanahan dengan rencana bangunan - Penataan ruang secara mendetail melalui RDTR belum terlaksana untuk seluruh kecamatan
4.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	- Gresik mengalami backlog perumahan sebesar 1,700,708 unit rumah dengan asumsi ketersediaan rumah dengan type landed housing - Masih terdapat kawasan kumuh - penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman seringkali tidak sesuai antara yang akan diserahkan dengan ketentuan
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	- Belum optimalnya forum kewaspadaan dini masyarakat/FKDM di Kabupaten/ Kec/ Kel/ Desa; - Masyarakat masih rentan terhadap isu-isu yang berpotensi konflik ; - Gresik merupakan daerah rawan bencana banjir dan kekeringan

6.	Sosial	- Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) belum optimal - Pelaksanaan pemutakhiran data penanganan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Basis Data Terpadu) belum optimal - Belum Tersedia Pusat Rehabilitasi Sosial Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah - Belum Tersedia Panti Asuhan untuk Anak-Anak dan Lansia Terlantar Yang Diselenggarakan dan/atau Difasilitasi Penuh oleh Pemerintah
7.	Tenaga Kerja	- Data urusan ketenagakerjaan belum faktual dan up to date - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan - Job fair belum efektif menyerap tenaga kerja terutama warga Gresik - Belum ada data terkait beberapa perlindungan TKI - Masih adanya perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan PP dan PKB karena masih dalam proses perundingan
8.	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	- Masih Lemahnya Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan anak termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat - Lemahnya Kelembagaan serta Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender serta Kekerasan pada Perempuan dan Anak
9.	Pangan;	- minimnya sarana prasarana penunjang ketahanan pangan - perubahan iklim global yang berpengaruh pada ketersediaan dan keterbatasan infrastruktur pendukung akses dan distribusi pangan - alih fungsi lahan - kurang optimalnya diversifikasi pangan - keterbatasan daya beli masyarakat terhadap pangan, - belum adanya sistem pengendalian dan pengawasan pangan.
10.	Pertanahan	- Proses pembebasan lahan masih terhambat terutama kerjasama warga terdampak - Penggunaan kembali tanah-tanah terlantar - Rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat

11.	Lingkungan Hidup	- Perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten belum optimal - Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup wilayah belum optimal - Jumlah produksi sampah (m3/ hari) mencapai 3.270 m3/ hari sedangkan penanganan sampah mencapai 2.435 m3/ hari atau 74,46%
12.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	- Keterbatasan blangko dalam penerbitan dokumen kependudukan - Diskrepansi data register dan data proxy
13.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	- Perencanaan tata ruang Desa dan pengembangan kawasan perdesaan belum optimal. - Penataan asset-asset desa masih belum teridentifikasi dalam GIS - Regulasi Penataan Desa belum terbentuk - Belum adanya kerjasama antar Desa yang telah memiliki legal standing - Belum adanya pengaturan terhadap Asset, Resources dan Profit Shares. - Sistem Informasi Desa belum aplikatif dan integratif - Basis data, Kapasitas kelembagaan, dan Sumber Daya Pemerintah Desa - Belum terbentuknya Tim Terpadu Pembangunan Basis Data Desa - Peningkatan alokasi anggaran Desa
14.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	- Laju Pertumbuhan Penduduk lebih tinggi dari nasional - Beban PLKB belum sesuai SPM
15.	Perhubungan	- Penataan parkir on street dan of street belum optimal - Pengelolaan perkeretapihan belum menjadi alternatif dalam sistem logistic barang dan orang - Konektivitas daerah belum optimal terkoneksi dengan sistem logistik nasional
16.	Komunikasi Dan Informatika	- Sistem informasi penunjang kinerja OPD belum terintegrasi - belum optimalnya aksesibilitas koneksi jaringan internet di wilayah pedesaan - Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM aparatur terhadap TIK

17.	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;	- Pasar bebas di lingkup ASEAN dapat menjadi ancaman bagi pelaku Koperasi dan UKM yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif. - Pendataan perkembangan UKM masih belum optimal sehingga menyulitkan untuk membuat waiting list UKM yang akan diikutsertakan dalam kegiatan promosi - Pihak yang ingin melakukan Izin usaha simpan pinjam kurang memahami persyaratan prosedur pengurusan Badan Hukum - Masih belum optimalnya penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang sudah terdaftar. - Masih belum optimalnya memfasilitasi bagi anggota koperasi agar lebih memahami tentang seluk beluk koperasi
18.	Penanaman Modal	- Kesulitan memproses izin mendirikan bangunan karena terdapat disharmoni antara dokumen pertanahan dengan rencana bangunan - Kurangnya event – event promosi khususnya dibidang investasi - operasional PTSP belum memberikan kemudahan pelayanan perzininan secara optimal - fasilitasi dan pengendalian tentang penanaman modal (Regulasi pemberian fasilitas/intensif, peta potensi, pengendalian pelaksanaan) - Masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan.
19.	Kepemudaan Dan Olah Raga	- Peranan kepemudaan belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan pembangunan - Advokasi terhadap organisasi kepemudaan di Gresik belum terlaksana secara komprehensif pada tataran peningkatan kapasitas, pengembangan kewirausahaan, pengarusutamaan gender hingga perkembangan mental dan perilaku - belum terdapatnya basis data keolahragaan yang komprehensif - Prestasi keolahragaan Kabupaten Gresik pada jenjang usia pelajar hingga tingkat professional masih belum memunculkan prestasi ikonik
20.	Statistik	- Diskrepansi data register dan data proxy
21.	Persandian	- Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi belum optimal - Belum ditetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar OPD

22.	Kebudayaan	- kurang optimalnya inisiasi kebudayaan Gresik dalam produksi produk-produk lokal baik di lingkup mikro, menengah, maupun industri besar; - inovasi cipta karya seni yang kurang mengangkat budaya khas Gresik, - belum adanya city branding berbasis kebudayaan Gresik - belum optimal pengelolaan, promosi, dan pengembangan. Cagar budaya religi, sejarah, dan permuseuman
23.	Perpustakaan	- Kemudahan, kesederhanaan, dan kecepatan akses informasi secara online telah menggeser perilaku kebutuhan informasi secara konservatif melalui perpustakaan. - Pengelolaan perpustakaan tidak meningkatkan daya tarik masyarakat untuk membaca - lemahnya basis data terkait naskah kuno milik Daerah dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah
24.	Kearsipan	- pengelolaan arsip baik bersifat statis maupun dinamis adalah kecenderungan kesalahan klasifikasi, - kompetensi arsiparis yang tidak menyesuaikan dengan tatakerja kearsipan terkini, fasilitas penunjang kearsipan yang belum memadai, - kurangnya advokasi terhadap pegawai mengenai peranan penting arsip. - Ketidaksesediaan Record Center atau depo pengelolaan arsip terpadu dengan klasifikasi tertentu - Publikasi dan/atau penggunaan arsip-arsip dengan klasifikasi tertutup masih belum diatur secara normatif
25.	Kelautan Dan Perikanan	- Daya Dukung lahan masih kurang optimal - Terdapat alih fungsi tambak akibat tidak adanya perlindungan lahan tambak produktif - Kurangnya bibit ikan/udang yang berkualitas. - Sarana dan Prasarana penangkapan ikan kurang memadai sehingga kurang optimalnya hasil tangkapan
26.	Pariwisata	- Perkembangan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud belum diiringi manajemen pengelolaan yang representatif untuk menghadirkan pelayanan kepariwisataan yang elegan dan berdaya tarik tinggi. - pengembangan ekonomi kreatif berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah masih

		belum terintegrasi dengan destinasi pariwisata. - frekuensi promosi yang masih rendah
27.	Pertanian	- Semakin tingginya konversi lahan pertanian ke lahan no pertanian - Ketersediaan bibit tanaman perkebunan baik jumlah kualitas maupun ketepatan waktu penyediaannya sangat kurang ; - Tingkat penguasaan teknologi petani masih terbatas ditengah persaingan pasar yang semakin ketat. - Produk pangan segar pertanian belum bersertifikat baik prima tani maupun SNI
28.	Kehutanan	- Adanya Perubahan Aturan perundang undangan yang berlaku terkait kewenangan, prosedur, tatakelola maupun penatausahaan hasil hutan. - Masih terbatasnya upaya konversi hutan dan lahan
29.	Energi Dan Sumber Daya Mineral	- Belum adanya kajian dan fasilitasi Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.
30.	Perdagangan	- Lemahnya pengawasan terhadap pendirian took modern yang berbenturan dengan took tradisional - Masih kurangnya fasilitasi dan koordinasi tentang promosi, kerjasama dan pengawasan jaringan distribusi perdagangan - Pengembangan pasar sebagai sarana distribusi perdagangan serta Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat - Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
31.	Perindustrian	- Masih kurangnya fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana bagi industri kecil dan menengah - Masih kurangnya fasilitasi kemitraan antara Industri Besar terhadap Industri Kecil
32.	Transmigrasi	- Kabupaten Gresik bukan tujuan transmigrasi

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan ekonomi makro Daerah dalam kerangka ekonomi daerah ditunjukkan pada Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini serta Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana sasaran ekonomi Makro Nasional yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 serta memperhatikan juga Target pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

3.1.1 Sasaran Ekonomi Makro Nasional

3.1.1.1 Target Pembangunan Nasional Tahun 2019

Pada tahun 2019, ekonomi makro Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

Target Pembangunan Nasional Tahun 2019

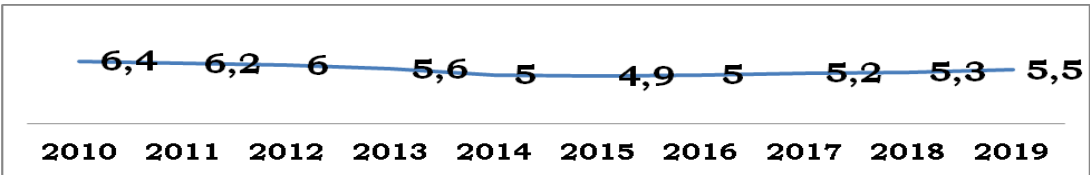


Sumber : RKP Tahun 2019

Pertumbuhan ekonomi Nasional ditargetkan akan tumbuh 5,4 sampai dengan 5,8%. Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut pada dasarnya dapat dicapai dengan memberikan stimulus permintaan yang sebesar-besarnya. Namun, kebijakan stimulus dari sisi permintaan yang tidak diiringi dengan upaya perubahan ekonomi secara struktural (kebijakan sisi penawaran) dapat menyebabkan ekonomi mengalami *overheating*. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu untuk dijaga keberlanjutannya dalam jangka panjang, agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*).

Untuk itu, Pemerintah tidak hanya akan menitikberatkan pada pertumbuhan tinggi jangka pendek, tetapi juga akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang, melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan memastikan terjadinya proses transformasi struktural di perekonomian. Adapun kebijakan Makro Nasional yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi adalah:(a) Mempertahankan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Di Tengah Tahun Politik, (b)Menjaga Stabilitas Makroekonomi Di Tengah Tekanan Eksternal, (c) Mendorong Pertumbuhan Yang Inklusif Dan Berkelanjutan. Perkembangan Ekonomi Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

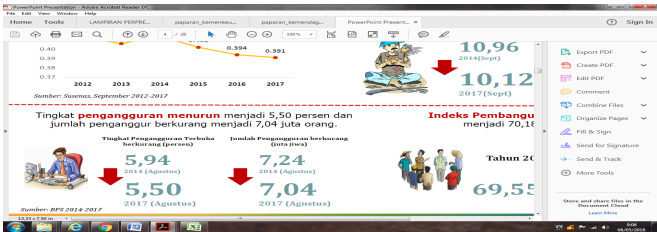
Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2019



Sumber : RKP Nasional Tahun 2019

Penurunan tingkat pengangguran terbuka bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja yang baik seluas-luasnya. Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak dua juta orang dan penurunan tingkat pengangguran terbuka sekitar 4,8-5,2 persen. Untuk mencapai target tersebut, upaya strategis penciptaan lapangan kerja sejalan dengan strategi pencapaian target pertumbuhan ekonomi, antara lain: (i) meningkatkan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal, (ii) memprioritaskan pengembangan industri manufaktur padat pekerja, (iii) meningkatkan program Pemerintah yang banyak menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha, (iv) mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis dan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, dan (v) meningkatkan keahlian dan kompetensi tenaga kerja.

Tabel 3.2
Tingkat Pengangguran Nasional



Didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tingkat inflasi yang stabil, serta pencapaian sasaran makro yang lain, tingkat kemiskinan di akhir tahun 2019 ditargetkan turun sekitar 8,5-9,5 persen. Penurunan tingkat kemiskinan juga diarahkan melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial secara tepat sasaran antara lain melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui satu kartu. Hal ini diharapkan juga memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar melalui: (i) perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar, (ii) peningkatan inklusivitas pelayanan dasar, dan (iii) peningkatan pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk mensasar kebutuhan dasar 40,0 persen penduduk berpendapatan terendah, seperti dokumen kependudukan dan perumahan.
3. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi antara lain melalui: (i) peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil, (ii) peningkatan akses terhadap permodalan usaha, dan (iii) peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

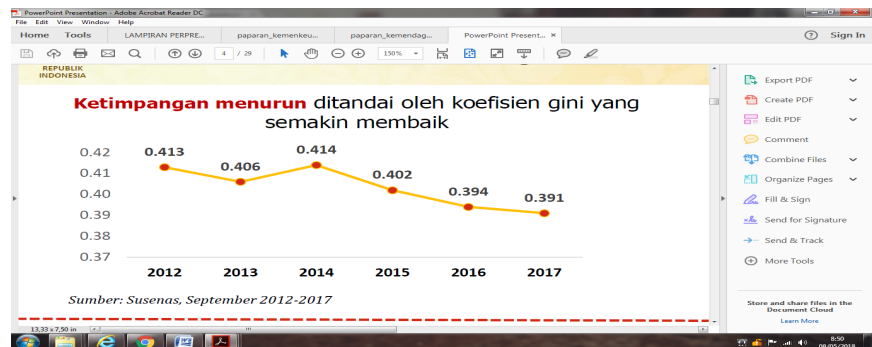
Pada tahun 2019, tingkat ketimpangan di masyarakat diharapkan juga dapat mengalami perbaikan. Gini rasio, sebagai salah satu ukuran tingkat ketimpangan, pada tahun 2017 0,391 dan ditargetkan turun menjadi 0,38 sampai dengan 0,39. Beberapa upaya untuk menurunkan ketimpangan dilakukan melalui :

1. Perbaikan akses yang menunjang kegiatan ekonomi produktif, termasuk akses kepemilikan lahan dan permodalan,
2. Penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan terutama bagi pekerja rentan dan perluasan kesempatan kerja agar kesejahteraannya terus meningkat dan berkelanjutan
3. Perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, termasuk bila terjadi guncangan terkait kesehatan, lapangan pekerjaan, sosial dan ekonomi, (iv) pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola program-program pembangunan secara konsisten, agar manfaat pembangunan dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 3.3
Tingkat Kemiskinan



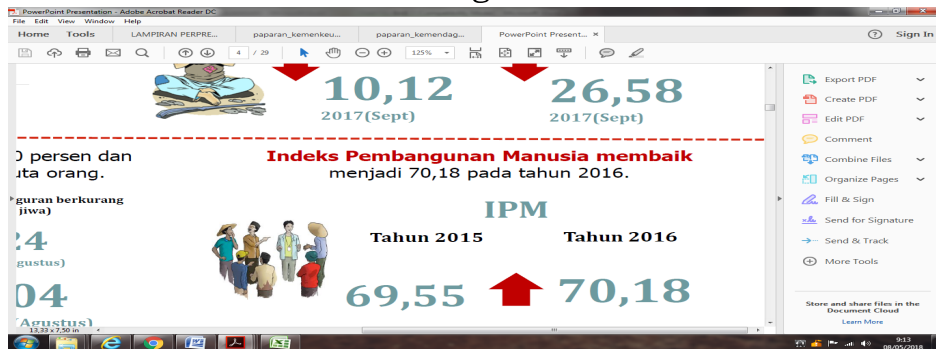
Tabel 3.4
Indeks Gini Nasional Tahun 2012 s.d Tahun 2017



Sumber : Susenas 2012 -2017

Terkait sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indonesia meningkat dari 69,55 pada tahun 2015 menjadi 70,81. Pada tahun 2019, IPM ditargetkan meningkat menjadi sebesar 71,98. Untuk mencapai target tersebut, arah kebijakan yang diperlukan adalah (i) meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas yang difokuskan pada upaya untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong masyarakat hidup sehat, dan penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, (ii) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk menjamin layanan pendidikan dasar berkualitas dan memperluas akses pendidikan menengah berkualitas, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi, serta (iii) menjaga daya beli masyarakat terutama golongan menengah ke bawah, sehingga pengeluaran riil masyarakat perkapita dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.5
Indeks Pembangunan Manusia



3.1.1.2 Arah Kebijakan Makro Nasional Tahun 2019

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2019 dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

- A. Mempertahankan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Di Tengah Tahun Politik
 1. Meningkatkan daya saing ekspor
 2. Melanjutkan momentum peningkatan iklim investasi
 3. Memperkuat konsumsi masyarakat
 4. Meningkatkan nilai tambah sektor: Industri Pengolahan Non Migas Pertanian Jasa Produktif
- B. Menjaga Stabilitas Makroekonomi Di Tengah Tekanan Eksternal
 1. Menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan normalisasi kebijakan moneter negara maju
 2. Menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang aman
 3. Mempertahankan sustainabilitas fiskal
 4. Menjaga inflasi pada tingkat yang tabil
 5. Memperkuat resiliensi sistem keuangan
- C. Mendorong Pertumbuhan Yang Inklusif Dan Berkelanjutan
 1. Meningkatkan tingkat produktivitas melalui reformasi struktural
 2. Mendorong pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan
 3. Mempertahankan keseimbangan lingkungan
 4. Mengantisipasi tantangan disrupti ekonomi di masa depan

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2017 tumbuh 51,75 persen mengikuti pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,2 Persen.

Dalam perekonomian terbuka (perekonomian empat sektor) faktor eksternal akan mempengaruhi kinerja ekonomi, salah satunya adalah dinamika global di berbagai belahan dunia yang berdampak pada kinerja ekspor Nasional dan Jawa Timur. Disamping itu melemahnya kurs rupiah terhadap US Dollar maupun Suku Bunga acuan Bank Indonesia (SBI) yang masih relatif tinggi di tahun 2017 sampai pada 7,50%, sangat mempengaruhi kinerja sektor riil. Faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya berdampak pada melambannya kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Tabel 3.6
Pertumbuhan Ekonomi Nasional terhadap Perekonomian Global



Sumber : RKP Nasional Tahun 2018

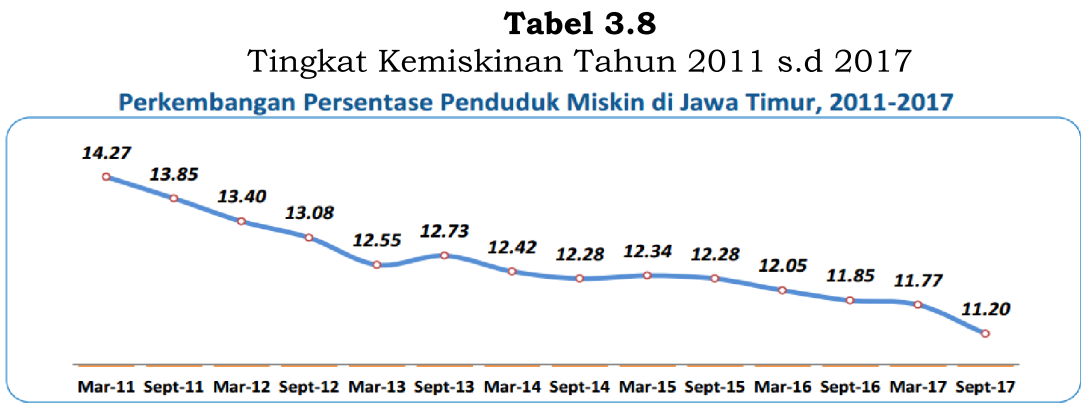
Tabel 3.7
PDRB Perkapita
Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 s.d 2019



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Angka kemiskinan di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir secara gradual (2011-2017) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2011 angka kemiskinan sebesar 14,27 persen selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 11,20 persen. Turunnya persentase penduduk miskin selama periode tahun 2011-2017, sebagai wujud upaya keras Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Berbagai upaya dan strategi yang dilakukan memberikan kontribusi penurunan

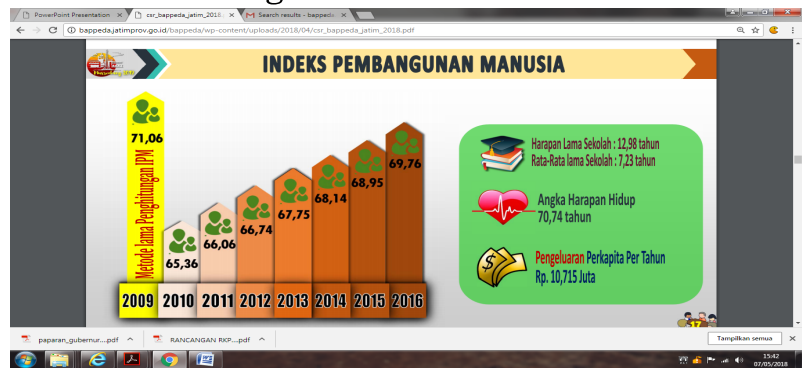
kemiskinan dengan tetap meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. Penurunan Tingkat Kemiskinan Tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 dilihat pada tabel berikut :



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas 2011-2017

Secara umum angka IPM di Jawa Timur selama periode 2009-2016 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2010 angka IPM sebesar 65.36, dan selanjutnya meningkat 69.76 pada tahun 2016. Di tahun 2016, melalui metode penghitungan baru ini, secara keseluruhan komponen IPM di Jawa Timur mengalami peningkatan sehingga berdampak positif terhadap capaian IPM. Kenaikan IPM ini diantaranya disebabkan oleh adanya berbagai program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan angka IPM, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana lainnya. Keberhasilan program juga tergantung pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana tersebut.

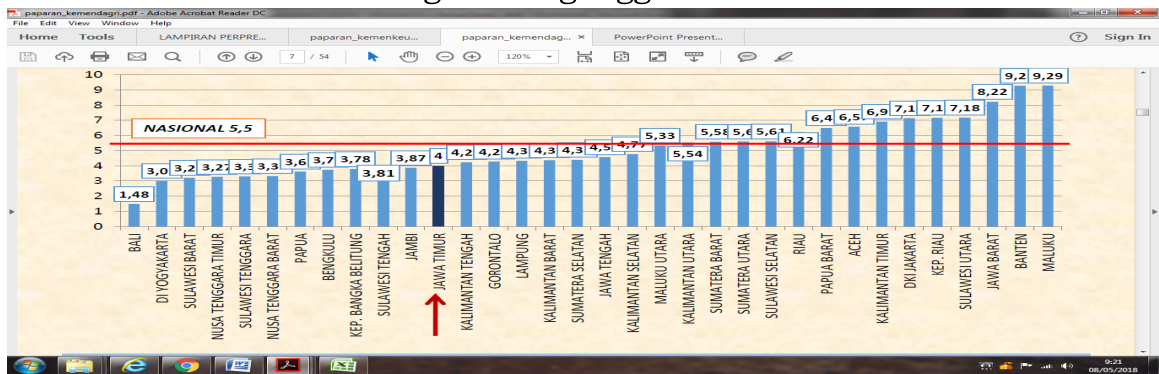
Tabel 3.9
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009 s.d 2016



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2017 menunjukkan tren penurunan yaitu dari 4,25 persen.

Tabel 3.10
Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

3.1.3 Arah kebijakan Ekonomi Kabupaten Gresik

a). Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektorsektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor.

Pertumbuhan ekonomi nasional dipublikasikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap kuartal sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dipublikasi setiap 1 (satu) tahun. Berdasarkan publikasi BPS, secara keseluruhan, hingga kuartal ke-IV, pertumbuhan ekonomi nasional membaik secara *year on year* mencapai 5.15%, provinsi Jawa timur mencapai 5,07, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik tumbuh di atas rata-rata nasional mencapai 5,92% pada tahun 2017.

b). Laju Pertumbuhan PDRB

Ditinjau dari kerangka ekonomi makro berdasarkan data termutakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Gresik mencapai 85,8 juta per kapita dengan perhitungan migas dan gini ratio 0,31 atau ketimpangan rendah. Penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik adalah industri pengolahan dengan kontribusi mencapai 47-54%. Adapun sektor pertambangan dan penggalian dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi kontributor terbesar kedua dan ketiga dengan dengan valuasi yang berimbang yaitu 10,6 -11,4 Milyar Rupiah. Sedangkan sektor dengan kontribusi terkecil adalah Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan rata-rata nilai 48 Juta Rupiah.

Adapun secara rinci PDRB Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Gresik (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.535.009,4	6.304.242,1	7.252.042,5	8.274.300,5	9.038.999,0
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.674.936,9	2.907.101,9	3.215.871,1	3.537.647,4	3.736.322,6
	a. Tanaman Pangan	1.410.373,2	1.527.114,4	1.693.284,0	1.856.673,9	1.926.006,2
	b. Tanaman Hortikultura	101.448,3	105.652,5	119.395,0	130.606,7	142.759,9
	c. Perkebunan	218.665,6	235.528,1	262.285,4	291.344,3	308.156,0
	f. Peternakan	908.453,8	998.316,9	1.094.517,7	1.205.849,6	1.300.869,5
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	35.996,0	40.489,9	46.388,9	53.172,9	58.531,1
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	2.141,2	2.370,2	2.662,0	2.980,0	2.902,2
	3 Perikanan	2.857.931,3	3.394.770,0	4.033.509,4	4.733.673,2	5.299.774,2
B	Pertambangan dan Penggalan	9.827.424,3	10.245.762,8	11.463.102,3	8.771.931,6	7.574.492,2
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	8.628.033,9	8.982.072,3	10.033.865,3	7.185.668,1	5.874.775,6
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalan Lainnya	1.199.390,4	1.263.690,5	1.429.237,0	1.586.263,5	1.699.716,6
C	Industri Pengolahan	36.088.595,4	39.960.124,3	45.217.878,8	49.572.708,3	52.567.458,8
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	418.110,1	492.499,3	501.597,4	489.534,4	483.062,6
	a. Industri Batu Bara	10.726,5	8.517,5	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	407.383,6	483.981,8	501.597,4	489.534,4	483.062,6
	2 Industri Makanan dan Minuman	6.523.063,8	7.089.644,6	7.992.391,8	9.651.566,1	11.442.043,5
	3 Pengolahan Tembakau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	959.865,1	1.061.793,1	1.189.930,7	1.263.247,5	1.375.465,5
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	500.198,5	577.890,8	655.168,7	720.475,7	791.033,0
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	5.909.180,2	6.538.161,0	7.407.903,4	7.617.702,7	7.655.884,7

PDRB Gresik Tahun 2012-2016.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Edit View Window Help

Home Tools PDRB Gresik Tahun... x ? Sign In

1 / 6 146%

	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2.135.191,2	2.199.997,0	2.355.636,2	2.575.180,6	2.790.002,2
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	9.316.487,4	10.910.904,0	12.870.693,0	14.171.659,7	14.410.733,3
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.444.399,0	1.472.002,8	1.582.239,3	1.656.060,0	1.660.105,2
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	2.058.130,7	2.225.122,5	2.412.305,2	2.653.051,3	2.691.211,8
	11 Industri Logam Dasar	2.414.364,6	2.599.763,7	3.051.536,2	3.039.948,6	3.240.991,6
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	2.223.641,2	2.450.121,7	2.615.266,9	2.881.936,1	2.988.289,8
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	93.947,0	96.510,7	107.312,1	119.207,0	127.512,1
	14 Industri Alat Angkutan	717.907,6	783.381,3	840.908,9	919.630,2	970.702,4
	15 Industri Furnitur	1.132.750,9	1.217.583,5	1.367.627,6	1.524.127,9	1.635.776,0
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	241.358,1	244.748,3	267.361,3	289.380,3	304.645,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	360.991,5	363.811,1	412.948,0	464.121,5	510.547,0
	1 Ketenagalistrikan	356.458,4	358.969,3	407.510,7	457.989,9	504.115,2
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	4.533,1	4.841,8	5.437,4	6.131,6	6.431,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46.488,6	52.878,8	56.577,8	62.525,5	69.039,1
F	Konstruksi	5.765.918,0	6.623.078,6	7.746.726,3	8.876.471,5	10.212.251,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.340.282,9	9.564.482,2	10.617.743,2	12.183.312,8	13.873.126,6
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.666.403,2	3.178.781,6	3.444.321,2	3.684.212,1	4.052.007,0
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	5.673.879,7	6.385.700,6	7.173.422,0	8.499.100,7	9.821.119,6
H	Transportasi dan Pergudangan	1.589.251,3	1.794.461,8	2.062.787,5	2.319.528,1	2.544.864,7
	1 Angkutan Rel	4.551,2	5.363,8	6.896,4	8.547,7	10.036,5
	2 Angkutan Darat	378.097,0	416.267,1	473.902,5	538.754,2	608.107,3
	3 Angkutan Laut	322.617,5	362.239,9	419.803,0	481.386,0	527.480,7
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	3.926,3	4.376,3	4.787,7	5.257,1	5.737,7
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	5.804,5
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	880.059,4	1.006.214,8	1.157.398,0	1.285.583,1	1.387.698,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	789.221,9	892.743,7	1.053.473,6	1.227.220,9	1.427.925,7
	1 Penyediaan Akomodasi	25.689,4	30.812,8	38.898,7	41.470,8	45.155,4
	2 Penyediaan Makan Minum	763.532,6	861.930,9	1.014.574,9	1.185.750,0	1.382.770,3
J	Informasi dan Komunikasi	2.687.928,8	3.019.245,0	3.221.708,5	3.654.736,9	4.116.188,2

9:14 AM
6/20/2017

PDRB Gresik Tahun 2012-2016.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Edit View Window Help

Home Tools PDRB Gresik Tahun... 1 / 6 146% Sign In

J	Informasi dan Komunikasi	2.687.928,8	3.019.245,0	3.221.708,5	3.654.736,9	4.116.188,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	763.654,3	888.457,4	997.635,5	1.139.195,6	1.285.909,8
1	Jasa Perantara Keuangan	482.195,8	577.300,0	646.317,3	744.463,0	836.533,1
2	Asuransi dan Dana Pensiun	65.218,0	73.022,7	83.208,3	94.392,8	107.314,5
3	Jasa Keuangan Lainnya	214.532,5	236.109,4	265.747,3	297.851,2	337.275,2
4	Jasa Penunjang Keuangan	1.718,0	2.025,3	2.262,5	2.488,5	2.787,0
L	Real Estate	875.947,2	968.157,8	1.037.164,5	1.191.245,7	1.336.191,6
M,N	Jasa Perusahaan	194.965,5	221.696,0	245.394,8	272.918,6	302.834,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.005.892,8	1.063.516,3	1.078.834,3	1.215.931,9	1.365.981,8
P	Jasa Pendidikan	611.016,6	679.522,5	751.311,5	837.051,1	922.896,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	262.153,5	292.050,9	332.793,2	373.461,6	407.580,9
R,S,T,U	Jasa lainnya	201.541,5	218.772,8	249.683,3	287.135,2	325.666,3
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	74.946.284,2	83.153.004,3	93.797.769,6	106.723.787,3	107.881.973,0
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	65.910.866,8	73.686.950,2	83.262.242,9	93.046.584,8	101.524.134,9

9:14 AM 6/20/2017

Sumber :Badan Pusat Statistik Tahun 2017

Tabel 3.12
Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Gresik (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.730.239,2	4.986.429,5	5.244.731,7	5.563.337,9	5.910.982,6
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.286.885,7	2.273.514,8	2.305.759,3	2.363.140,9	2.430.496,0
	a. Tanaman Pangan	1.209.129,7	1.193.887,9	1.216.692,3	1.256.356,5	1.292.037,0
	b. Tanaman Hortikultura	95.468,2	94.750,6	95.747,8	97.626,2	100.836,8
	c. Perkebunan	183.928,1	183.224,7	186.383,2	189.719,4	190.780,3
	f. Peternakan	767.138,1	769.398,9	773.363,7	785.556,0	812.674,6
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	31.221,5	32.252,7	33.572,3	33.882,7	34.167,3
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.821,2	1.983,7	1.949,7	2.005,8	1.814,0
	3 Perikanan	2.441.532,4	2.710.931,1	2.937.022,7	3.198.191,3	3.478.672,6
B	Pertambangan dan Penggalian	8.348.891,1	7.797.528,9	8.531.409,3	9.038.143,9	9.234.194,0
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	7.233.054,6	6.669.000,1	7.378.425,9	7.845.267,4	8.003.741,8
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.115.836,5	1.128.528,8	1.152.983,4	1.192.876,6	1.230.452,2
C	Industri Pengolahan	32.380.789,3	34.834.077,5	37.267.132,5	39.359.843,1	41.016.851,0
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	525.303,1	535.262,8	538.394,1	543.006,1	538.282,0
	a. Industri Batu Bara	10.637,7	8.942,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	514.665,4	526.320,8	538.394,1	543.006,1	538.282,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	5.647.702,4	5.945.901,1	6.319.303,7	7.216.653,0	8.149.044,5
	3 Pengolahan Tembakau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	830.654,4	889.464,8	950.624,4	990.455,5	1.057.686,9
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	430.876,3	461.352,2	503.073,9	516.931,7	551.721,2
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	5.492.318,3	5.846.572,8	6.182.283,0	6.140.862,5	6.098.839,3
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1.944.144,6	1.954.370,8	1.962.923,2	2.050.121,6	2.178.330,4

PDRB Gresik Tahun 2012-2016.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Edit View Window Help

Home Tools PDRB Gresik Tahun... x Sign In

146%

8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	8.017.834,2	9.096.633,7	10.113.855,7	10.798.552,2	10.951.081,7
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.347.011,8	1.364.811,2	1.447.136,6	1.507.482,2	1.537.207,8
10	Industri Barang Galian bukan Logam	1.868.726,0	1.998.041,8	2.008.271,8	2.133.387,1	2.131.467,1
11	Industri Logam Dasar	2.138.969,3	2.319.363,5	2.639.528,5	2.657.480,6	2.842.707,0
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	2.077.413,4	2.240.822,7	2.298.098,1	2.405.649,1	2.487.200,6
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	85.872,3	86.249,2	87.756,6	89.731,1	92.663,0
14	Industri Alat Angkutan	664.121,8	716.274,0	767.201,1	796.738,3	815.461,7
15	Industri Furnitur	1.073.920,2	1.140.997,2	1.197.682,0	1.254.332,3	1.316.421,8
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	235.921,3	237.959,6	250.999,8	258.459,8	268.736,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	389.814,3	417.222,3	448.249,8	445.800,8	467.482,5
1	Ketenagalistrikan	385.956,7	413.176,9	443.996,9	441.327,4	462.864,2
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	3.857,5	4.045,4	4.252,9	4.473,4	4.618,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43.074,1	46.400,2	47.060,0	49.394,2	51.789,8
F	Konstruksi	5.397.869,1	5.842.464,5	6.315.840,3	6.939.213,7	7.617.068,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.652.725,2	8.377.567,7	8.935.823,0	9.757.223,8	10.546.822,7
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.426.712,1	2.665.012,8	2.839.784,3	2.910.641,1	3.115.531,9
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	5.226.013,1	5.712.554,9	6.096.038,7	6.846.582,7	7.431.290,8
H	Transportasi dan Pergudangan	1.433.700,4	1.528.906,4	1.619.184,7	1.721.756,2	1.819.887,3
1	Angkutan Rel	3.598,3	3.603,0	3.882,0	4.226,0	4.597,4
2	Angkutan Darat	372.934,4	394.363,2	416.171,5	441.016,9	476.033,6
3	Angkutan Laut	309.537,4	332.056,2	353.307,8	371.821,2	386.991,5
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	3.647,1	3.751,8	3.858,0	3.980,7	4.063,1
5	Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	2.905,0
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	743.983,3	795.132,2	841.965,4	900.711,5	945.296,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	712.587,7	765.685,8	835.346,0	908.408,6	995.088,1
1	Penyediaan Akomodasi	21.635,5	23.658,4	26.308,4	27.858,0	30.356,9
2	Penyediaan Makan Minum	690.952,1	742.027,3	809.037,6	880.550,6	964.731,2
J	Informasi dan Komunikasi	2.619.147,4	2.938.569,2	3.131.927,1	3.345.974,1	3.638.412,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	687.098,1	771.520,6	811.255,1	870.799,5	935.510,9
L	Jasa Reparasi, Perbaikan, dan Pemeliharaan	420.016,3	403.416,5	521.704,1	567.030,7	611.035,0

9:17 AM 6/20/2017

PDRB Gresik Tahun 2012-2016.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Edit View Window Help

Home Tools PDRB Gresik Tahun... x

2 / 6 146%

Sign In

	2 Penyediaan Makan Minum	690.952,1	742.027,3	809.037,6	880.550,6	964.731,2
J	Informasi dan Komunikasi	2.019.147,4	2.938.569,2	3.131.927,1	3.345.974,1	3.638.412,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	687.098,1	771.520,6	811.255,1	870.799,5	935.510,9
	1 Jasa Perantara Keuangan	430.916,2	492.416,5	521.794,1	567.920,7	611.025,9
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	58.582,1	66.939,7	68.016,4	71.675,7	75.159,1
	3 Jasa Keuangan Lainnya	196.094,9	210.496,1	219.694,7	229.397,4	247.405,1
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1.504,9	1.668,3	1.749,9	1.805,7	1.920,7
L	Real Estate	836.475,4	891.850,1	948.999,9	1.006.176,3	1.095.625,3
M,N	Jasa Perusahaan	172.811,1	183.423,4	199.105,1	213.826,1	229.307,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	867.898,1	883.884,8	885.648,7	942.574,0	999.330,5
P	Jasa Pendidikan	539.815,9	576.431,6	616.608,9	665.223,4	713.053,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	242.115,1	267.740,4	282.845,0	305.289,5	324.461,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	193.740,0	204.476,0	214.879,7	227.455,7	239.241,1
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	57.248.791,5	71.314.176,9	76.336.048,6	81.360.443,9	85.835.107,8
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	59.501.071,5	64.118.858,0	68.419.227,9	72.972.170,4	77.293.084,0

Windows Taskbar: 9:18 AM 6/20/2017

Sumber :Badan Pusat Statistik Tahun 2017

c). **Inflasi**

Secara umum harga konsumen pada tahun 2017 Kabupaten Gresik dalam kurun waktu tiga bulan terus mengalami kenaikan. Perubahan IHK selama bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2017 terlihat cukup tinggi dari 127,27 pada bulan Oktober 2017 naik menjadi 128,15 pada bulan Desember 2017. Momen perayaan Natal dan tahun baru serta adanya anomali cuaca menyebabkan kenaikan harga di beberapa komoditas penyusun inflasi diantaranya beras, cabe rawit, cabe merah, daging ayam ras, telur ayam ras dan beberapa kelompok sayuran.

Inflasi dalam periode tiga bulan, bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember tahun 2017 tertinggi tercatat sebesar 0,54 persen pada bulan Desember 2017 dan sebaliknya inflasi terendah terjadi pada bulan Oktober sebesar 0,05 persen. Secara umum laju inflasi bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember tahun 2017 di Kabupaten Gresik jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan kotakota penghitung inflasi nasional cukup terkendali. Semua daerah mengalami inflasi di tiga periode selama bulan Oktober sampai Desember 2017.

d). **Tingkat Kemiskinan**

Tingkat Kemiskinan (P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan merupakan data makro sedangkan sebaran penduduk miskin secara *by name by addres* merupakan data mikro berdasarkan Basis Data terpadu Tahun 2015. pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik yang terus mengalami penurunan namun cenderung melambat. Kondisi tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik pada Tahun 2017 berdasarkan publikasi BPS mencapai 12,80% atau turun signifikan sebesar 0,83% dibanding Tahun 2016 sebesar 13,63%. Penurunan angka kemiskinan diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan namun dipengaruhi oleh pelbagai faktor penting seperti resesif ekonomi secara global, laju inflasi yang menyebabkan harga barang atau jasa meningkat, serta faktor lain seperti dinamika pertumbuhan penduduk menyebabkan garis kemiskinan (taraf hidup

pengeluaran seorang individu atau rumah tangga) meningkat lebih tinggi dibandingkan akselerasi peningkatan kesejahteraan. Pada Tahun 2018 ditargetkan turun diantara 12.75 - 11.75%. Pada Tahun 2019 diestimasi kembali turun 12.25-11.25% melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial secara tepat sasaran antara lain melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar melalui: (i) perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar, (ii) peningkatan inklusivitas pelayanan dasar, dan (iii) peningkatan pemanfaatan Basis Data Terpadu.
3. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi antara lain melalui: (i) peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil, (ii) peningkatan akses terhadap permodalan usaha, dan (iii) peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

e). **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik secara trendline Perkembangan tingkat pengangguran terbuka selama Tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik menekan angka pengangguran pada tahun 2014 hingga mencapai 5,94% ternyata tidak diiringi pada tahun 2015 dengan mengalami peningkatan mencapai 6,18% sedangkan pada tahun 2016 **tingkat pengangguran terbuka** berhasil ditekan mencapai 5,50%.

Gejolak tingkat pengangguran ini disebabkan oleh pelbagai hal persaingan pencari kerja yang kompetitif antara masyarakat lokal dan masyarakat di luar Gresik, kultur budaya pencari kerja, persyaratan kompetensi yang dibutuhkan, dan didominasi oleh factor *cash inflow* sebagai bentuk investasi yang masuk Kabupaten Gresik cenderung padat modal mengingat dominasi manufaktur pada PDRB mencapai 49-52% selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pada Tahun 2018 ditargetkan turun diantara 5.35-5.05%. Pada Tahun 2019 diestimasi kembali turun 5.20-4.90% melalui kebijakan penurunan pengangguran antara lain:

1. Meningkatkan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal;
2. Memprioritaskan pengembangan industri manufaktur padat pekerja;
3. Meningkatkan Kegiatan Pemerintah Daerah yang banyak menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan kerja;
4. Meendorong hubungan industrial yang harmonis dan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, dan
5. Meningkatkan keahlian dan kompetensi tenaga kerja.

f). **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur Angka Harapan Lama Sekolah serta tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Perubahan metode pengukuran IPM secara fundamental adalah Angka Melek Huruf diganti dengan Indeks Pendidikan, Angka Harapan Hidup diganti Indeks Kesehatan sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Indeks Paritas Daya Beli. **Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik** terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru yaitu sebesar **74,46** meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,57.

Pada Tahun 2018 ditargetkan naik 76-77. Pada Tahun 2019 diestimasi kembali naik 77-78. Untuk mencapai target tersebut, arah kebijakan yang diperlukan adalah

1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas yang difokuskan pada upaya untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak;
2. Penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong masyarakat hidup sehat;

3. Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi.

Berikut ini Target Ekonomi Kabupaten Gresik Terhadap Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Tabel 3.13
 Target Ekonomi Kabupaten Gresik Terhadap Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

No	Uraian	Nasional	Prov.Jatim	Kab.Gresik
		Target 2019		
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,4 -5,8 %	5,66 – 6,06	>6.1-6.45
2	Tingkat Kemiskinan	8,5 – 9,5 %	11,20 – 10,90	12.25 - 11.25%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8 – 5,2%	3,99 – 3,90	5.20-4.90%
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,98	70,00 – 70,25	77-78

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

3.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu unsur penting adalah pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan pendorong bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diperlukan kebijakan strategis serta upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara terus menerus. Kebijakan strategis serta upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui program dan kegiatan terukur, terkoordinasi serta berkelanjutan dengan mengedepankan optimalisasi potensi

pendapatan daerah dan aspek pelayanan publik yang diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah sejalan dengan perkembangan perekonomian.

Pada dasarnya pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran serta tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara brutto, dalam arti bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Dari sisi perencanaan, maka pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

2. Realisasi Pendapatan

Dari table berikut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami kenaikan. Salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap Tahunnya.

Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tngganya sendiri (self supporting). APBD Tahun 2018 juga menunjukkan proyeksi yang naik secara signifikan. Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2015 s/d APBD 2018

Komposisi	Realisasi			APBD 2018
	2015	2016	2017	
Pendapatan	2.436.173.613.495	2.522.076.193.169	2.742.225.670.874	2.897.503.571.000
Pendapatan Asli Daerah	799.884.870.103	715.480.938.191	872.252.632.858	947.570.465.000
Pajak Daerah	450.326.075.139,76	412.112.744.756,71	497.066.458.080,49	517.050.000.000
Retribusi Daerah	117.641.024.546,20	77.108.109.540,65	78.798.888.987,00	126.010.881.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.234.376.050,50	15.393.353.604,09	13.631.162.210,28	13.157.353.000
Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	206.683.394.366,57	210.866.730.289,71	282.756.123.580,43	291.352.231.000
Dana Perimbangan	1.103.936.339.654	1.336.689.003.743	1.324.731.018.270	1.438.593.338.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	532.352.403.738	469.906.251.235	545.242.019.746	511.339.768.000

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

Dana perimbangan yang juga berperan penting dalam pembangunan di Kabupaten Gresik. Dana perimbangan/pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah. Dana Perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak: (2) Dana Alokasi Umum: dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintahan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Adapun perincian penerimaan Dana Perimbangan dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2015 s/d APBD 2018

Komposisi	Realisasi			APBD 2018
	2015	2016	2017	
Dana Perimbangan	1.103.936.339.654	1.336.689.003.743	1.324.731.018.270	1.438.593.338.000
Bagi Hasil Pajak / Hasil Bukan Pajak	119.825.600.654,00	149.468.790.396,00	156.045.163.060	177.133.682.000
Dana Alokasi Umum	873.265.959.000,00	923.469.024.000,00	907.246.643.000	909.888.092.000
Dana Transfer Khusus	110.844.780.000,00	263.751.189.347,00	261.439.212.210	351.571.564.000

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

Adapun Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus; (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; dan (5) Pendapatan Lainnya. Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2015 sampai dengan APBD tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16
Realisasi Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015 s/d APBD 2018

Komposisi	Realisasi			APBD 2018
	2015	2016	2017	
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	532.352.403.738,00	469.906.251.235,00	545.242.019.746,00	511.339.768.000
Pendapatan hibah	780.671.260,00	21.439.914.873,00	2.338.796.190,00	0
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah	169.826.577.478,00	181.169.348.862,00	213.102.459.056,00	214.548.840.000,
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	343.523.352.000,00	241.940.391.000,00	314.106.205.000,00	280.565.128.000
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	18.221.653.000,00	25.354.766.500,00	15.694.486.500,00	16.225.800.000
Pendapatan lainnya	150.000,00	1.830.000,00	73.000,00	0

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

3. Realisasi Belanja Daerah

Secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: 1) **Belanja Tidak Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (2) **Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Realisasi Belanja Kabupaten Gresik disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2015 s/d APBD 2018

Komposisi	Realisasi			APBD 2018
	2015	2016	2017	
Belanja Daerah	2.809.860.097.015	2.896.709.993.310	2.644.649.372.216,02	2.983.138.197.036,
Belanja Tidak Langsung	1.482.056.253.878	1.335.561.072.716	1.490.154.144.051,00	1.649.634.926.500,
Belanja Pegawai	937.030.419.465	886.837.609.662	787.851.400.388,00	865.620.340.750,
Belanja Hibah	146.330.724.300	185.232.248.250	152.177.016.913,00	242.613.836.250,
Belanja Bantuan Sosial	21.854.700.000	27.482.600.000	21.692.800.000,00	28.703.050.000,
Belanja Bagi Hasil Kpd Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	68.001.331.582	60.219.228.784	45.761.911.000,00	64.306.089.000,
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Propinsi/Kab/Kota dan Pem. Desa	306.838.078.531	400.877.233.898	482.671.015.750,00	446.891.610.500
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	500.000.000	0,00	1.500.000.000,0
Belanja Langsung	1.327.804.843.136	1.335.561.072.716	1.154.495.228.165,02	1.333.503.270.536,

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018

Memperhatikan data realisasi keuangan sebagaimana di atas serta mempedomani proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik maka Berikut ini proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 :

Tabel 3.18
Estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2019

No Rek						U R A I A N	Estimasi 2019
1						PENDAPATAN DAERAH	3.309.136.739.000
1	1					Pendapatan Asli Daerah	1.033.341.857.000
1	1	1				Pajak Daerah	567.961.744.000
1	1	1	1			Pajak Hotel	2.691.242.000
1	1	1	1	1		Hotel Bintang Tiga	1.779.516.000
1	1	1	1	2		Hotel Melati Satu	823.849.000
1	1	1	1	3		Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hotel/ Rumah Kos	87.877.000
1	1	1	2			Pajak Restoran	18.673.918.000
1	1	1	2	1		Restoran	9.886.192.000
1	1	1	2	2		Rumah Makan	4.613.556.000
1	1	1	2	3		Katering	4.152.201.000
1	1	1	2	4		Warung	21.969.000

1	1	1	3			Pajak Hiburan	1.208.312.000
1	1	1	3	1		Pergelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana	52.726.000
1	1	1	3	2		Sirkus/ Akrobat/ Sulap	38.446.000
1	1	1	3	3		Permainan Biliar	276.813.000
1	1	1	3	4		Permainan Ketangkasan	105.453.000
1	1	1	3	5		Pusat Kebugaran	131.816.000
1	1	1	3	6		Pertandingan Olahraga	217.496.000
1	1	1	3	7		Kolam Renang	296.586.000
1	1	1	3	8		Hiburan Dunia Anak	6.591.000
1	1	1	3	9		Hiburan Lainnya	82.385.000
1	1	1	4			Pajak Reklame	4.943.096.000
1	1	1	4	1		Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	2.965.858.000
1	1	1	4	2		Reklame Kain	1.971.746.000
1	1	1	4	3		Reklame Selebaran	5.492.000
1	1	1	5			Pajak Penerangan Jalan	215.299.298.000
1	1	1	5	1		Pajak Penerangan Jalan PLN	197.723.845.000
1	1	1	5	2		Pajak Penerangan Jalan Non PLN	17.575.453.000
1	1	1	6			Pajak Parkir	6.041.562.000
1	1	1	6	1		Pajak Parkir	6.041.562.000
1	1	1	7			Pajak Air Tanah	1.537.852.000
1	1	1	7	1		Pajak Air Tanah	1.537.852.000
1	1	1	8			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.897.573.000
1	1	1	8	1		Batu Kapur	8.897.573.000
1	1	1	9			Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	116.437.375.000
1	1	1	9	1		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	116.437.375.000
1	1	1	10			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	192.231.516.000
1	1	1	10	1		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	192.231.516.000
1	1	2				Retribusi Daerah	138.418.644.000
1	1	2	1			Retribusi Jasa Umum	21.035.621.000
1	1	2	1	1		Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.984.658.000
1	1	2	1	2		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	878.774.000
1	1	2	1	3		Retribusi Pelayanan Parir ditepi Jalan Umum	5.492.329.000
1	1	2	1	4		Retribusi Pelayanan Pasar	1.373.082.000
1	1	2	1	5		Retribusi Pelayanan Kendaraan Bermotor	2.306.778.000
1	1	2	2			Retribusi Jasa Usaha	8.080.008.000
1	1	2	2	1		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.636.451.000
1	1	2	2	2		Retribusi Tempat Pelelangan	16.477.000
1	1	2	2	3		Retribusi Terminal	131.816.000
1	1	2	2	4		Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.848.718.000
1	1	2	2	5		Retribusi Rumah Potong Hewan	121.490.000
1	1	2	2	6		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.050.440.000

1	1	2	2	7		Retribusi Penyebrangan di Air	274.616.000
1	1	2	3			Retribusi Perizinan tertentu	109.303.015.000
1	1	2	3	1		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	105.452.717.000
1	1	2	3	2		Retribusi Izin Trayek	5.668.000
1	1	2	3	3		Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	3.844.630.000
1	1	3				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.452.902.000
1	1	3	1			Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	14.452.902.000
1	1	3	1	1		Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1.647.699.000
1	1	3	1	2		Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik	1.241.266.000
1	1	3	1	3		PT Bank Jatim	11.545.300.000
1	1	3	1	4		PT BPR Jatim	18.637.000
1	1	4				Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	312.508.567.000
1	1	4	1			Penerimaan Jasa Giro	5.492.329.000
1	1	4	2			Pendapatan Bunga Deposito	13.181.590.000
1	1	4	3			Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah	168.266.589.000
1	1	4	4			Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	49.075.559.000
1	1	4	5			Pendapatan Dana BOS	76.492.500.000
1	2					Dana Perimbangan	1.616.410.651.000
1	2	1				Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	178.881.395.000
1	2	1	1			Bagi Hasil Pajak	139.791.670.000
1	2	1	1	1		Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan	30.050.489.000
1	2	1	1	2		Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pph Pasal 21	93.853.963.000
1	2	1	1	3		Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	15.887.218.000
1	2	1	1	3	1	Dinas Kesehatan	14.132.048.000
1	2	1	1	3	2	Dinas Pertanian	700.000.000
1	2	1	1	3	3	Bagian Humas	955.170.000
1	2	1	1	3	4	Satpol PP	100.000.000
1	2	1	1	4		Bagi Hasil Bukan Pajak	39.089.725.000
1	2	1	1	4	1	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000
1	2	1	1	4	2	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	37.664.702.000
1	2	1	1	4	3	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	200.000.000
1	2	1	1	4	4	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	30.365.000
1	2	1	1	4	5	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Kehutanan	250.915.000
1	2	1	1	4	6	Bagi Hasil Mineral Dan Batubara	716.000

1	2	2				Dana Alokasi Umum	1.022.354.799.000
1	2	2	1			Dana Alokasi Umum	1.022.354.799.000
1	2	3				Dana Alokasi Khusus	415.174.457.000
1	2	3	4			Fisik	
1	2	3	4	1		Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Sd	13.424.587.000
1	2	3	4	2		Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Smp	6.400.533.000
1	2	3	4	3		Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Skb	1.830.411.000
1	2	3	4	4		Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kesehatan Dan Kb Sub Bidang Pelayanan Dasar	5.938.241.000
1	2	3	4	5		Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kesehatan Dan Kb Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian	9.308.812.000
1	2	3	4	6		Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kesehatan Dan Kb Sub Bidang Prioritas Daerah	35.302.839.000
1	2	3	4	7		Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kesehatan (Rs Rujukan Dan Pratama)	21.407.541.000
1	2	3	4	8		Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kesehatan Dan Kb Sub Bidang Keluarga Berencana	1.123.046.000
1	2	3	4	9		Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Perumahan Dan Permukiman	2.710.189.000
1	2	3	4	10		Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Perumahan, Air Minum Dan Sanitasi Sub Bidang Sanitasi	2.660.591.000
1	2	3	4	11		Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Air Minum	11.105.280.000
1	2	3	4	12		Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan Sub Bidang Pendukung Konektifitas	20.125.072.000
1	2	3	4	13		Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Irigasi Sub Bidang Pendukung Kedaulatan Pangan	4.790.953.000
1	2	3	4	14		Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pertanian Sub Bidang Pertanian Kab/Kota	10.154.335.000
1	2	3	4	15		Dinas Perikanan	
1	2	3	4	16		Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kelautan Dan Perikanan Sub Bidang Perikanan Kab/Kota	707.365.000
1	2	3	4	17		Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sub Bidang Lingkungan Hidup	1.156.111.000
1	2	3	5			Non Fisik	
1	2	3	5	1		Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paud	36.660.886.000
1	2	3	5	2		Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Tunjangan Profesi Guru	187.201.732.000
1	2	3	5	3		Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Tambahan Penghasilan Guru	899.854.000
1	2	3	5	4		Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Tunjangan Khusus Guru	244.950.000

1	2	3	5	5		Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Bantuan Operasional Kesehatan	31.828.371.000
1	2	3	5	6		Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Bantuan Operasional Kb	6.679.748.000
1	2	3	5	7		Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.513.010.000
1	3					Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	659.384.231.000
1	3	1				H i b a h	-
1	3	2				Dana Darurat	-
1	3	3				Dana Bagi Hasil Pajak Dr Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	278.701.277.000
1	3	3	1			Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	278.701.277.000
1	3	3	1	1		Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	74.969.469.000
1	3	3	1	2		bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	59.149.090.000
1	3	3	1	3		Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	94.952.147.000
1	3	3	1	4		Bagi Hasil dari Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukiman	817.394.000
1	3	3	1	5		Bagi Hasil dari Pajak Rokok	48.813.177.000
1	3	4				Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	364.457.154.000
1	3	4	1			Dana Penyesuaian	364.457.154.000
1	3	4	1	1		Dana Desa	330.207.154.000
1	3	4	1	2		Dana Insentif Daerah	34.250.000.000
1	3	5				Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16.225.800.000

Upaya-upaya yang ditempuh dalam kaitannya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah pada tahun 2019 meliputi:

- Peningkatan manajemen pemungutan pendapatan daerah;
- Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah untuk memenuhi kewajibannya;
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah;
- Peningkatan kualitas pelayanan melalui kemudahan, ketepatan dan kecepatan sesuai dengan standar pelayanan;

- e. Melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundangan terkait dengan dasar pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kondisi terkini;
- f. Peningkatan koordinasi dan dukungan pemungutan bagi hasil pajak pemerintah dan provinsi; serta
- g. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pemungutan pendapatan daerah.

Adapun Estimasi Belanja Daerah tahun 2019 disajikan pada table berikut. Belanja daerah Tahun 2019 diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gresik, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.19
Estimasi Belanja Daerah Tahun 2019

No		URAIAN 2019	RKPD 2019
Belanja Tidak Langsung			1.803.671.897.903
1		Belanja Pegawai	927.687.108.628
1		Gaji Dan Tunjangan (Accress)	760.215.489.228
1		Tambahan Penghasilan PNS	114.546.250.000
1		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota Dprd Serta Kdh/Wkdh	17.606.350.000
1		Insentif Pemungutan Pajak Daerah (5% Pajak)	28.398.087.200
1		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (5% Retribusi)	6.920.932.200
2		Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	70.638.038.800
2	1	10% Pajak	56.796.174.400
2	2	10% Retribusi	13.841.864.400

3		Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000
4		Belanja Hibah	204.044.786.000,00
4	1	Kelembagaan	6.434.890.000
4	2	Hibah Kepada Organisasi Masyarakat	1.700.000.000
4	3	Lembaga/ Organisasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Bidang Kesra	1.236.000.000
4	4	Hibah kepada Pondok Pesantren	729.000.000
4	5	Hibah kepada Panti Asuhan	20.000.000
4	6	Hibah kepada Madrasah Diniyah	2.140.000.000
4	7	Hibah kepada SD sederajat	7.330.000.000
4	8	Hibah kepada SMP sederajat	3.180.000.000
4	9	Hibah kepada TPQ/ TPA/ RA/ TK/ KB/ PAUD/ RAM/ KOBER/ SLB	13.895.000.000
4	10	Hibah kepada SMA sederajat	180.000.000
4	11	MDA/MDW/MDU	550.000.000
4	12	Hibah kepada Kelompok Usaha Mikro	2.262.500.000
4	13	Hibah kepada Kelompok Nelayan	290.000.000
4	14	Hibah kepada Kelompok Tani/ Ternak	2.645.000.000
4	15	Hibah kepada Kelompok Budidaya Perikanan	575.000.000
4	16	Hibah kepada Kelompok Nelayan	15.000.000
4	17	Sarana Prasarana Kesehatan	300.000.000
4	18	Hibah kepada Masjid	4.845.000.000
4	19	Hibah kepada Musholla	5.145.000.000
4	20	Hibah kepada Tempat Ibadah Lainnya	76.000.000
4	21	Hibah kepada Lembaga Bidang Olahraga	115.000.000
4	22	Hibah kepada Lembaga Bidang Kesenian	155.000.000
4	23	Belanja Hibah Pendidikan (SD, MI, SMP, MTs, Ponpes, Madin/TPQ, Kober/Paud, Paket ABC)	93.555.510.000,00
4	24	BPPDGS (BK PROV DAN SHARING APBD)	20.010.000.000,00
4	25	Belanja Hibah Operasional Paud (Dak Non Fisik)	36.660.886.000,00
5		Belanja Bantuan Sosial	32.364.700.000,00
5	1	Pemugaran Rumah Keluarga Miskin	13.347.500.000,00
5	2	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMA	111.000.000,00
5	3	Bantuan Kuliah Anak Kurang Mampu	1.182.000.000,00
5	4	Bantuan Kepada Janda Miskin	8.508.600.000,00
5	5	Bantuan Kepada Anak Yatim	2.215.600.000,00
5	6	Bantuan Sosial Kematian	4.000.000.000,00

5	7	Bantuan Sosial Tidak direncanakan	3.000.000.000,00
6		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	567.437.264.474,52
6	1	Pembangunan Jalan / Jembatan / Saluran / TPT Jalan Lingkungan	43.371.187.710
6	2	Pembangunan Pagar / Jalan Makam	4.460.000.000
6	3	Pembangunan Jalan / Jembatan / Saluran / TPT / PJU Jalan Poros Desa	14.835.000.000
6	4	Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Air / Pengolahan / Perpipaan	870.000.000
6	5	Sarana Pengangkut Sampah	130.000.000
6	6	Pembangunan Jalan / Jembatan / Saluran / TPT / PJU Jalan Desa	5.150.000.000
6	7	Pembangunan JUT / TPT	4.955.000.000
6	8	Pembangunan Jaringan Irigasi Perikanan	335.000.000
6	9	Pembangunan TPS / TPST / Bank Sampah	925.000.000
6	10	Pembangunan Pasar Desa / BUMDes	2.299.000.000
6	11	Pembangunan Kantor / Balai Desa	11.085.000.000
6	12	Pembangunan Sarana / Prasarana Pariwisata	890.000.000
6	13	Perbaikan Kantor / Balai Desa	2.385.000.000
6	14	Perbaikan Tambatan Perahu / Dermaga	190.000.000
6	15	Pembangunan JITUT / JIDes	50.000.000
6	16	Pembangunan JIDes / Waduk Desa	350.000.000
6	17	Pembangunan Lapangan / GOR	1.145.000.000
6	18	Pembangunan TPS / TPST / Bank Sampah	50.000.000
6	19	Pembangunan Ponkesdes	830.000.000
6	20	Waduk	-
6	21	Dana Desa	330.207.154.364,52
6	22	ADD (10 % x (Dn Perimbangan - DAK))	120.123.619.400,00
6	23	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.001.303.000,00
6	24	Bantuan Khusus Pilkadaes Per Desa @Rp.80.000.000 x 260 Ds	20.800.000.000,00
6	25	Pengamanan Pilkadaes	1.000.000.000,00

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 diarahkan untuk :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya;
2. Pemantapan tata kelola birokrasi.
3. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan publik (*public interest*);
4. Mengakomodir aspirasi dan kepentingan publik dalam skala mikro (*bottom up*);
5. Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja;
6. Menjamin terlaksananya program dan kegiatan skala besar serta prioritas (*dedicated program*).
7. Mengalokasikan hibah dan bantuan sosial kepada organisasi, kelompok masyarakat, keluarga dan individu yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Peningkatan Alokasi Dana Desa serta pembangunan infrastruktur desa.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2019 merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan atas pencapaian target tahunan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*) maka RKPD Tahun 2019 menggunakan prinsip yang identik dengan menekankan pada target kinerja baik dampak (impact), kebermanfaatan hasil (*outcome*), maupun keluaran (*output*) dari suatu sasaran, program, hingga kegiatan. Berlandaskan terhadap keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 serta pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 maka Tujuan dan Sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 sebagai berikut;

Dalam rangka implementasi **Misi Pertama** “*Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri*” ditetapkan tujuan yaitu;

Mewujudkan Keharmonisan Sosial Berlandaskan Keluhuran Budaya Gresik

Perwujudan perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri adalah upaya dalam menciptakan tatanan kehidupan berbangsa yang harmonis dan kondusif berlandaskan keluhuran Budaya Gresik yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagam’an guna menciptakan kebersamaan yang damai dalam keberagaman moral, pemikiran, dan nilai-nilai budaya. Upaya ini ditunjang dengan pembangunan karakter dan mental yang dilandasi kearifan dan keluhuran Budaya Gresik.

Penetapan Sasaran Pembangunan Misi Pertama didukung 3 (tiga) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan (1)Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, (2)Kepemudaan dan olahraga, dan (3) Kebudayaan sebagaimana berikut;

Sasaran urusan **Ketentraman, Ketertiban Umum,& Perlindungan Masyarakat** meliputi;

Sasaran ke-1

Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat

Sasaran ke-2

Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan kebakaran

Sasaran pada urusan **Kepemudaan dan Olahraga** meliputi;

Sasaran ke-3

Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan

Sasaran pada urusan **Kebudayaan** meliputi;

Sasaran ke-4

Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal

Dalam rangka implementasi **Misi Kedua** “Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik” ditetapkan tujuan yaitu;

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Perwujudan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dimaknai dengan prioritas penguatan pada aspek keterbukaan informasi, akuntabilitas birokrasi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, supremasi hukum dan keadilan pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat serta sektor privat dalam pembangunan. Penetapan Sasaran Pembangunan Misi Kedua didukung 12 (Dua Belas) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan (1)Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2)Komunikasi dan Informatika, (3)Statistik, (4)Persandian, (5)Kearsipan, (6)Kecamatan, (7)Perencanaan, (8)Inspektorat, (9)Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, (10)Sekretariat Daerah, (11)Sekretariat DPRD, dan (12)Penelitian dan Pengembangan sebagaimana berikut;

Sasaran pada urusan **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kearsipan, dan Kecamatan** meliputi;

Sasaran ke-1

Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik

Sasaran pada urusan **Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian** meliputi;

Sasaran ke-2

Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi

Sasaran pada urusan **Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan** meliputi;

Sasaran ke-3

Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Sasaran pada urusan **Inspektorat** meliputi;

Sasaran ke-4

Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Sasaran pada urusan **Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah** meliputi;

Sasaran ke-5

Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

Sasaran pada urusan **Kepegawian serta Pendidikan dan Pelatihan** meliputi;

Sasaran ke-6

Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah

Dalam rangka implementasi **Misi Ketiga** “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Tujuan ke-2

Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Tujuan ke-3

Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

Peningkatan pertumbuhan secara menyeluruh dapat dimaknai dengan pembangunan perkonomian inklusif dengan dukungan infrastuktur yang berkelanjutan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia secara komprehensif dengan pendekatan strategis lintas sektoral dan terciptanya akses terhadap sumber daya pembangunan. Optimalisasi potensi daerah, penguatan ekonomi lokal, dan konsep ekonomi kerakyatan merupakan arsitektur pembangunan perekonomian secara integratif dengan mengedepankan kearifan lokal, membangun secara inklusif dengan penguatan pilar-pilar ekonomi daerah dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan berwawasan lingkungan dimaknai dengan Meletakkan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk menghadirkan kemajuan peradaban berdaya saing yang berwawasan lingkungan, mewujudkan kemadirian ekonomi, dan meneguhkan karakter kehidupan berbangsa berlandaskan keluhuran nilai-nilai budaya Gresik. Sedangkan *global competition oriented* adalah pembangunan perekonomian yang berdikari untuk menghadapi tantangan pasar global dalam rangka membangun Gresik sebagai salah satu poros perekonomian nasional. Sedangkan menekan angka kemiskinan bermakna optimalisasi penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh pada dimensi kemiskinan.

Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Ketiga didukung 20 (Dua Puluh) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi (1) Penanaman Modal, (2) Pertanahan, (3) Pariwisata, (4) Kelautan dan Perikanan, (5) Keuangan, (6) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (7)Perhubungan, (8) Lingkungan Hidup, (9) Tenaga Kerja, (10) Transmigrasi, (11) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, (12) Perdagangan, (13) Sosial, (14)Perindustrian, (15) Energi dan Sumber Daya Mineral, (16) Kehutanan, (17)Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, (18)Pangan, (19)Pertanian, (20) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana berikut;

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-1 misi ke-3** ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Penanaman Modal** dan **Pertanahan** meliputi;

Sasaran ke-1

Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah

Sasaran pada urusan **Pariwisata** meliputi;

Sasaran ke-2

Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif

Sasaran pada urusan **Kelautan dan Perikanan** meliputi;

Sasaran ke-3

Meningkatkan keberdayaan ekonomi nelayan

Sasaran pada urusan **Keuangan** meliputi;

Sasaran ke-4

Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

Sasaran pada urusan **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** meliputi;

Sasaran ke-5

Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.

Sasaran pada urusan **Perhubungan** meliputi;

Sasaran ke-6

Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-2 misi ke-3** ditetapkan sasaran strategis yaitu;

Sasaran pada urusan **Lingkungan Hidup dan Kehutanan** meliputi;

Sasaran ke-7

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-3 misi ke-3** ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Tenaga Kerja dan Transmigrasi** meliputi;

Sasaran ke-8

Menurunnya tingkat pengangguran

Sasaran pada urusan **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** meliputi;

Sasaran ke-9

Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif

Sasaran pada urusan **Perdagangan, Perindustrian, dan Energi dan Sumber Daya Mineral** meliputi;

Sasaran ke-10

Meningkatkan produktivitas perdagangan dan pertumbuhan industri kecil dan menengah secara berkelanjutan

Sasaran pada urusan **Sosial** meliputi;

Sasaran ke-11

Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan

Sasaran pada urusan **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** meliputi;

Sasaran ke-12

Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** meliputi;

Sasaran ke-13

Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa

Sasaran pada urusan **Pangan dan Pertanian** meliputi;

Sasaran ke-14

Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian

Dalam rangka implementasi **Misi Keempat** “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan

Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

Peningkatan kualitas kehidupan dimaknai dengan menghadirkan pembangunan insan manusia cendikia, cerdas dan berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan atribut pelayanan pendidikan dasar, penyelenggaraan pendidikan yang inklusif didukung oleh suprastruktur dan infrastruktur pendidikan berlandaskan keluhuran budaya Gresik. Hal ini selaras dengan upaya peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Disisi lain, kualitas hidup masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang mengedepankan pemerataan, kemudahan akses, keberlindungan dan kepastian layanan bagi seluruh masyarakat Gresik. Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Keempat didukung 4 (Empat) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi (1) Pendidikan, (2) Perpustakaan (3) Kesehatan, (4) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan (5) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana berikut

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-1 misi ke-4 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Pendidikan dan Perpustakaan** meliputi

Sasaran ke-1

Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif

Sasaran pada urusan **Kesehatan** meliputi;

Sasaran ke-2

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-2 misi ke-4 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** meliputi;

Sasaran ke-3

Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** meliputi;

Sasaran ke-4

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender

Sasaran ke-5

Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak anak

Adapun Matrikulasi Hubungan visi, misi dan tujuan, sasaran pembangunan RPJMD dan RKPD Tahun 2019 disajikan pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan RPJMD dengan RKPD Tahun 2019

Misi ke-1				
Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;				
Tujuan 1				
Mewujudkan Keharmonisan Sosial Berlandaskan Keluhuran Budaya Gresik				
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD 2019	Target RKPD 2019
1.1	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	10-20%	10-20%
1.2	Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran	Persentase Penanganan Bencana	100%	100%
1.3	Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	96%	96%
1.4	Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan local	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%
Misi ke-2				
Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;				
Tujuan				
Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik				
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD 2019	Target RKPD 2019
2.1	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82-86	82-86
2.2	Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi	Indeks e-Government	3.00-3.10	3.00-3.10

2.3	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Pangripta	A	A
2.4	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP
2.5	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	A	A
2.6	Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah	Indeks Profesionalitas ASN	80	80

Misi ke-3

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;

Tujuan 1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD 2019	Target RKPD 2019
3.1	Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	68.23% (Rp39,45T)	68.23% (Rp39,45T)
3.2	Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	6,5-7,5%	6,5-7,5%
3.3	Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	112,25	112,25
3.4	Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	59%	59%
3.5	Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	84,81% Jalan	84,81% Jalan
		Persentase Akses Air Bersih/Minum	100%	100%

		Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%
3.6	Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu	Angka Kecelakaan Angkutan Umum	0,12%	0,12%
Tujuan 2 Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.				
3.7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Air Sungai	60-64.3	60-64.3
		Indeks Kualitas Udara	83-87,5	83-87,5
		Indeks Tutupan Lahan	18,19%	18,19%
3.8	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.20-4.90%	5.20-4.90%
Tujuan 3 Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu.				
3.9	Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif	Pertumbuhan Komulatif Usaha Mikro	1,33% (191.035)	1,33% (191.035)
		Pertumbuhan Koperasi Sehat	6,91% (325)	6,91% (325)
3.10	Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/ Komoditi (US \$)	24,74%	24,74%
			(1.643.903)	(1.643.903)
		Pertumbuhan Komulatif IKM	2,84%	2,84%
			-7236	-7236
3.11	Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	4,9-5,4%	4,9-5,4%
3.12	Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	63% (30 ha)	63% (30 ha)
		Persentase Rumah Layak Huni	85,97%	85,97%
3.13	Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,675	0,675

3.14	Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	194 Kg/Kpt/Thn	194 Kg/Kpt/Thn
		Nilai Tukar Petani	109,32	109,32

Misi ke-4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.				
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan				
4.1	Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	APM SD dan Sederajat	99,10%	99,10%
		APM SMP sederajat;	86,99%	86,99%
		Angka Harapan lama sekolah	9,5	9,5
4.2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	72,6	72,6
Tujuan 2 Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan				
4.3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana	Angka laju pertumbuhan penduduk	0.6-1..4	0.6-1..4
4.4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63.25-63.75	63.25-63.75
	Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak nak	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	100%	100%
		Nilai Kabupaten Layak Anak	775-850	775-850

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ditelaah mempertimbangkan isu strategis pembangunan berskala global, regional, nasional, provinsi Jawa Timur, dan lokal dalam lingkup Kabupaten Gresik serta mempertimbangkan permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pembangunan Kabupaten Gresik tahun sebelumnya. Lebih lanjut, memperhatikan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 serta mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019 yaitu **Gresik, Teater Pembangunan Infrastruktur dan Investasi menuju Ekologi yang Berkelanjutan** maka prioritas pembangunan tematik dirumuskan sebagaimana berikut:

4.2.1 Prioritas Pembangunan Tematik

Prioritas pembangunan tematik berlandaskan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019 yaitu **Gresik, Teater Pembangunan Infrastruktur dan Investasi menuju Ekologi yang Berkelanjutan** mempertimbangkan prioritas nasional pada rancangan kerja pemerintah tahun 2019 meliputi :

- (1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
- (2) Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
- (3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif;
- (4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan; dan
- (5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Prioritas tema pembangunan Kabupaten Gresik juga memperhatikan Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur. Dengan tema Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi, dirumuskan empat prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan;

2. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan;
3. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan Pemilu;

Sedangkan memperhatikan arah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021 pada tahun perencanaan 2019 dijabarkan sebagaimana berikut:

- (1) Pembangunan ekologi untuk mewujudkan kota layak huni berlandaskan keluhuran Gresik sebagai Kota Santri
- (2) Pengembangan kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah dalam mendukung perekonomian secara berkelanjutan;
- (3) Pemenuhan layanan dasar dan pengentasan kemiskinan bersasaran melalui pemanfaatan integrasi pelayanan publik, pendekatan *human centered design* dan pembangunan sektoral;
- (4) Penetrasi teknologi informasi dalam pelayanan publik;

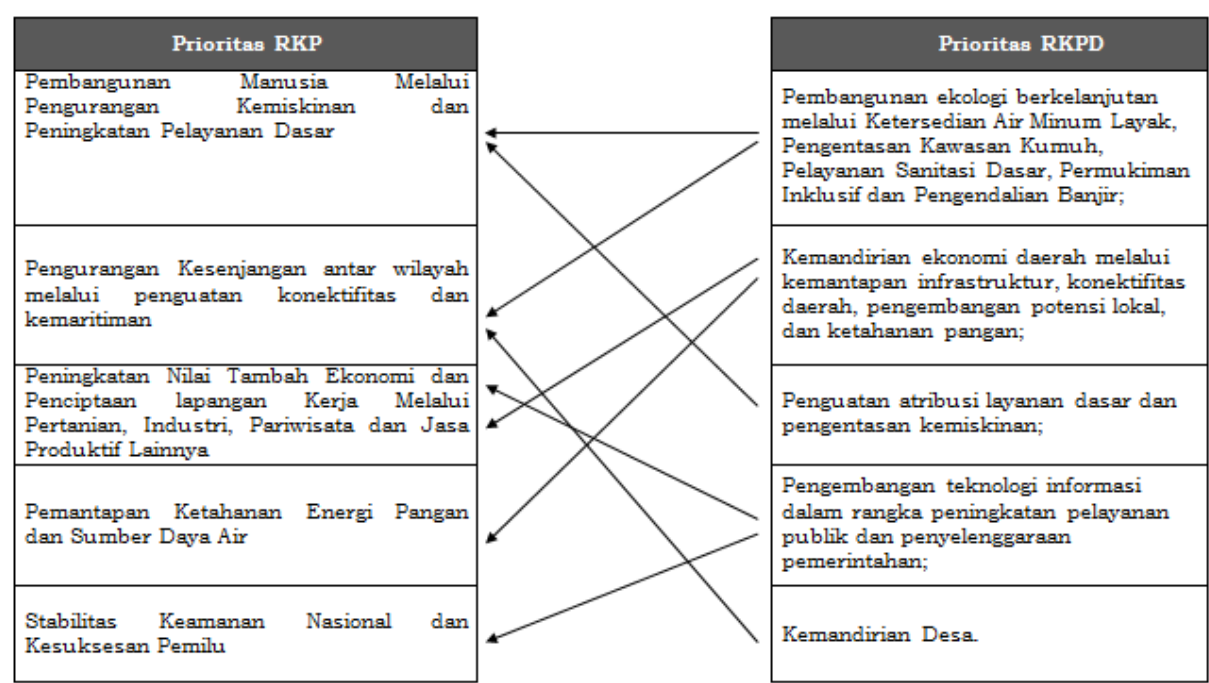
Berlandaskan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresik pada tahun 2019 dirumuskan:

1. Pembangunan ekologi berkelanjutan melalui Ketersediaan Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, Pelayanan Sanitasi Dasar, Permukiman Inklusif dan Pengendalian Banjir;
2. Kemandirian ekonomi daerah melalui kemantapan infrastruktur, konektivitas daerah, pengembangan potensi lokal, dan ketahanan pangan;
3. Penguatan atribusi layanan dasar dan pengentasan kemiskinan;
4. Pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan;
5. Kemandirian Desa.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Gresik disajikan sebagaimana berikut :

Gambar IV.1

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional
dan Prioritas RKPD Kabupaten Gresik



4.2.2 Prioritas Program Pembangunan

Prioritas Program Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2019 dirumuskan berlandaskan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 serta mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019 yaitu **Gresik, Teater Pembangunan Infrastruktur dan Investasi menuju Ekologi yang Berkelanjutan**. Dengan demikian dirumuskan prioritas program pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019 sebagaimana berikut:

Tabel 4.2

prioritas program pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019

Prioritas 2019	No	Program	Indikator Program	2019
Pembangunan ekologi berkelanjutan melalui Ketersediaan Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, Pelayanan Sanitasi Dasar, Permukiman Inklusif dan Pengendalian Banjir;	1.	Program pengendalian banjir	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik	64%
	2.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase Panjang Saluran Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik	52,71 %
	3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum	Persentase Pemenuhan Rumah Tangga pengakses Air Bersih/minum	68,17%

			non PDM dibanding Kebutuhan air bersih/minum non PDAM	
	4.	Program Pengembangan Rumah Swadaya	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni	14,03
	5.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Praswil SDA & LH	100%
	6.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum PD sesuai Petunjuk Teknis	100%
			Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76	85%
	7.	Program Pengeloaan Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani	30 ha (37%)
	8.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pengelolaan sampah	60%
	9.	Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100%
Kemandirian ekonomi daerah melalui kemantapan infrastruktur, konektifitas daerah, pengembangan potensi lokal, dan ketahanan pangan;	10.	Program Peningkatan kualitas Jalan dan Jembatan	1. Presentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	74.7
			2. Presentase Jumlah jembatan dalam kondisi baik	96,88%
	11.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan ekonomi	100%
	12.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	100%
	13.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan	Persentase Infrastruktur Pendukung pertanian dalam kondisi baik	23,72
	14.	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana	26 (68,42%)

			Perhubungan yang Tersedia sesuai Kebutuhan;	
			Persentase Lokasi Parkir yang ditetapkan;	104 (91,23%)
	15.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase pertumbuhan volume usaha koperasi	3.99
	16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	0.15
	17.	Program Peningkatan Pasar	Persentase stand Pasar kab yang dipelihara	5.18%
	18.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Verifikasi izin realisasi investasi	75%
	19.	Program Pemberdayaan Kelompok Tani	Persentase kelompok tani dengan klasifikasi utama sesuai permentan no 82 tahun 2013	0,45
	20.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan	Persentase penyuluh bersertifikat	33,33
	21.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Stabilitas Harga Pangan Utama	87
			Persentase Keamanan Pangan Segar	77
			Pola Pangan Harapan	90,85
	22.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produktivitas perikanan budidaya (ton)	140.516
			Persentase yang saluran tambak yang direhabilitasi	31
	23.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton)	20.690
			Persentase tempat pendaratan ikan yang direhabilitasi	100
Penguatan atribusi layanan dasar dan pengentasan kemiskinan;	24.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan kependudukan yang memiliki SOP	100.00 %

	25.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	100%
	26.	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven	4,17
			Persentase Peningkatan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja berbasis Entrepreneurship	7,14
	27.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja	69,01
	28.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS	5,33
	29.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;	95
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	107
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	93,25
	30.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4	96
			Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi Kompetensi	56
			Prosentase Jumlah Guru SMP memenuhi Kompetensi	52
	31.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);	55,00

			Persentase Sarana dan prasarana SD sesuai SPM	53,00
			Persentase Sarana dan prasarana SMP sesuai SPM	56,00
	32.	Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan nifas	93
			Cakupan pelayanan KN lengkap	96
			Persentase balita gizi kurang	8
			Cakupan pelayanan kesehatan remaja	85
			Cakupan pelayanan kesehatan lansia	70
	33.	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	83
	34.	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	93
			Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	86
			Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	5
			Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)	154
			Insiden / Angka kesakitan DBD	54
			Persentase kasus pemasangan yang ditangani	2.5
	35.	Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional	Persentase puskesmas terakreditasi	100
			Persentase Pustu sesuai standar	60
			Persentase Ponkesdes sesuai standar	62
			Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	100

			Persentase RS yang memiliki ijin operasional	100
			Persentase penyehat tradisional terdaftar	70
	36.	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100
			Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	65
			Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	90
			Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	41
	37.	Program Pengadaan, Peningkatan &Perbaikan Sarana &Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskemas, Pustu, dan Ponkesdes	
			Puskesmas :	81.3
			Pustu :	82.4
			Ponkesdes :	
	38.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	85%
	39.	Program Keluarga Berencana	Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB	9.90
	40.	Program Keluarga Sejahtera	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;	0.8
	41.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh	100%

			petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A);	
Pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan;	42.	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan	Jumlah PD yang memanfaatkan data administrasi kependudukan	8
			Persentase Arsip Akta Kependudukan yang dialihmediakan	47
	43.	Program Pengembangan E-Government	Persentase PD yang dapat mengakses WAN dan Fiber Optik	100%
			Kecepatan Akses internet untuk perkantoran Pemerintahan	250
			Persentase sistem informasi yang aktif	96.83
			Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi informasi	82.48
			Persentase Ketersediaan Pedoman Penyelenggaraan e-gov	83.33
	44.	Program Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100%
Kemandirian Desa.	45.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	48.04
	46.	Program Pengembangan Ekonomi desa	Persentase JumlahBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang memiliki AD ART	60
			Persentase JumlahBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik	60

			Desa (BUMaDes) yang mengalami peningkatan pendapatan	
			Prosentase Pasar desa dalam kondisi baik	60
			Prosentase pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh POKMAS dan atau warga masyarakat	22

4.2.3 Prioritas Output Kunci (Kegiatan)

Prioritas Output Kunci (Kegiatan) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2019 dirumuskan mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019 yaitu Gresik, Teater Pembangunan Infrastruktur dan Investasi menuju Ekologi yang Berkelanjutan, 5 (lima) prioritas tematik, prioritas program pembangunan, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan operasional antara lain Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah, dan dokume Rencana Aksi Daerah antara lain Masterplan Gresik Smart City, Rencana Aksi Peduli HAM, dsb. Prioritas output kunci dimaknai sebagai keluaran kegiatan prioritas yang dilaksanakan untuk menunjang sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Prioritas Output Kunci (Kegiatan) Kabupaten Gresik Tahun 2019 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4.3
Prioritas Output Kunci (Kegiatan) Kabupaten Gresik Tahun 2019

No.	Perangkat Daerah	Prioritas Output Kunci
1	Dinas Pendidikan	• Pengembangan Resources Center 1 lembaga’ • Pengembangan sekolah inklusi dan sekolah ramah anak • Rehabilitasi gedung sekolah
2	Dinas Kesehatan	• Layanan kegawatdaruratan yang terintegrasi • Optimalisasi pelayanan kesehatan tingkat pratama dan pemenuhan persyaratan puskesmas ramah anak • Pengawasan makanan berkoordinasi dengan BPOM • Penanggulangan HIV AIDs didukung data terpilah gender, usia, dan SES
3	Rsud Ibnu Sina	• Pelayanan kesehatan tepat waktu, kejelasan SOP, peningkatan integritas pelayanan (sikap petugas); • Sosialisasi faislitas, harga, dan kualitas pelayanan RSUD; • Pembinaan petugas pelayanan dan tenaga kesehatan kesehatan • Pengembangan Praktek Umum Bersama RSUD
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	• Pembangunan dan rehhabilasi trotoar di jalan dr. Sutomo, Panglima Sudirman, Kartini, Wahidin, Jaksa Agung • Pengembangan smart branding melauai penataan kawasan koridor Gapura Selamat Datang sampai

		dengan Alun-alun dan kawasan duduksampeyan sampai dengan perbatasan Lamongan • Pembangunan Sumur Air Bersih • Penataan Simpang • Pembangunan jalan konstruksi beton
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	• Pembangunan rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah • Pengentasan kawasan kumuh
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	• Pembentukan satuan tugas wilayah • Intensifikasi pemerikan atau sidak perizinan dan domain penegakan perda
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	• Pengembangan Early Warning System
8	Dinas Sosial	• Pelaksanaan verivali dan penyusunan databes perubahan kesejahteraan data kemiskinan Basis Data Terpadu • Pengembangan database kemiskinan secara spasial berintegrasi dengan NIK
9	Dinas Tenaga Kerja	• Pembangunan & Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan • Pengembangan Kartu Kuning Online
10	Dinas Pertanahan	• Penyelesaian konflik pertanahan • Sertifikasi tanah Negara bebas maupun tanah Negara dalam penguasaan • Penyusunan database dan penanganan tanah hak pakai
11	Dinas Lingkungan Hidup	• Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir • Penataan taman, lampu hias, dan fasilitas persampahan dengan seni khas keluhuran Gresik • Faislitasi Pembangunan TPS di Desa; • Pengembangan edukasi ekologi berkelanjutan di lingkungan sekolah • Pembangunan taman terbuka (ruang ekspresif) ramah anak dan penyandang disabilitas
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	• Integrasi Data KIA • Pencatatan akta kelahiran 100% dan pemenuhan identitas hukum lainnya untuk Keluarga belum sejatera dalam BDT • Pengembangan pelayanan admindukcapil berbasis <i>human centered design</i> • Peningkatan kebermanfaatan NIK untuk pelayanan publik atau pelaksanaan program di sektor lain
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	• Pengembangan pelayanan publik elektornik di Pemerintah Desa melalui e-Desa/Kel di 356 Desa • Pengembangan BUMDesa dengan bentuk usaha beragam sesuai potensi desa atau kawasan perdesaan • Pembentukan desa tematik (Desa mandiri) • Pembentukan database kemiskinan perdesaan terpilah
14	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	• Pencegahan Pernikahan Usia Anak • Replikasi Sekolah Perempuan • Optimalisasi pelayanan KB dan keluarga sejahtera di perdesaan
15	Dinas Perhubungan	• Kajian Penyediaan Transportasi Masal • Penyediaan suttle yang menghubungkan fasilitas kesehatan tingkat pratama dan RSUD • Optimalisasi Penataan parkir on street • Otimalisasi penertiban kendaraan angkutan tanpa KIR • Penataan parkir off street yang dikelola oleh pelaku usaha swasta, pemerintah daerah, dan instansi lain

16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	• Pembangunan Network operation Center (NOC) (1 unit) • Sistem Informasi Crisis Center • Perlindungan informasi dan pembangunan internet ramah anak
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	• Pengembangan usaha mikro di kawasan perdesaan; • Penertiban dan pengembangan pasar dan sentra pedagang kaki lima
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	• Pengembangan database perkembangan IPR • Pengembangan database koordinat blockplan atau site plan
19	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	• Pembinaan Olahraga di tingkat Kecamatan • Pembinaan pemuda dalam rangka revolusi mental, smart city, dan tematik lainnya
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	• Pengembangan perustakaan sebagai pusat pemberdayaan; • Pengembangan e-library; • Pengembangan kearsipan digital di OPD
21	Dinas Perikanan	• Penyusunan database alih fungsi lahan tambak, produksi dengan segregasi jumlah, jenis, luas lahan, kelompok nelayan, dan infrastruktur perikanan • Cool Storage untuk pengangkutan hasil produksi Bawean-Gresik
22	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	• Pelatihan terhadap pelaku usaha wisata; • Promosi wisata di Hub Transportasi • Pengembangan destinasi wisata baru • Fasilitasi pengembangan desa wisata • Pendataan terpilah meliputi cagar budaya, kesenian, wisata, dan pelaku usaha
23	Dinas Pertanian	• Penyusunan database alih fungsi lahan pertanian, produksi pertanian dengan segregasi jumlah, jenis, luas lahan. • Penyediaan Beras Bulog dari hasil produksi petani lokal dengan mekanisme penyimpanan di Gudang Desa • pengolahan pasca panen hasil pertanian
24	Inspektorat	• Peningkatan kuantitas dan kualitas auditor • Pelaporan hasil pemeriksaan infrastruktur bermasalah
25	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan	• Pelaksanaan Inventarisasi form, data dasar, dan data sektoral dalam seluruh pelayanan publik (100%) • Penyusunan Integrated Development Plan • Penyusunan perencanaan sektoral strategis • Penyusunan database terpilah gender
26	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	• Integrasi Data Wajib Pajak (100%) • Optimalisasi pemungutan pajak melalui intensifikasi pajak daerah
27	Badan Kepegawaian Daerah	• Pelaksanaan diklat strategis peningkatan kapasitas pegawai • Pembangunan gedung diklat multi fungsi
28	Sekretariat Daerah	
28.1	Bagian Pemerintahan Umum	• Optimalisasi pelaksanaan PATEN • Pelaksanaan pembakuan rupa bumi
28.2	Bagian Hukum	• Optimalisasi pelayanan bantuan hukum • Optimalisasi perumusan produk hukum daerah
28.3	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	• Perumusan regulasi strategis dalam pengentasan kemiskinan • Pendataan dan penertiban lembaga keagamaan (lembaga, tokoh agama, kegiatan keagamaan)
28.4	Bagian Humas Dan Protokol	• Validasi terhadap publikasi • Kerjasama publikasi dengan pelbagai media
28.5	Bagian Administrasi Pembangunan	• Evaluasi Integrasi sistem informasi pelaporan terhadap e-planning dan e-budgeting • Validasi Harga Satuan Operasional
28.6	Bagian Perekonomian Dan Sda	• Peningkatan kontribusi BUMD (Evaluasi Bussiness Plan)

		• Peningkatan pengawasan perizinan pertambangan disertai data penyusunan potensi dan izin pertambangan) • Perluasan informasi bahan pangan pokok melalui Sistem Informasi Pengendalian Laju Inflasi
28.7	Bagian Organisasi Dan Tatalaksana	• Evaluasi dan persiapan pelaporan AKIP • Evaluasi dan penilaian kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik • Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan penataan ulang kelembagaan yang tumpah tindih
28.8	Bagian Umum	• Optimisasi peningkatan kinerja pemeliharaan kawasan perkantoran
28.9	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	• Optimalisasi pemantauan lapangan • Evaluasi hasil pekerjaan lelang dan penilaian kinerja penyedia barang dan jasa
28.10	Bagian Keuangan	• Perumusan regulasi strategis administrasi keuangan dalam pelaksanaan cashless payment
29	Sekretariat DPRD	• Efisiensi pendampingan kunjungan kerja DPRD
30	Kecamatan	• Pemberdayaan perempuan melalui operasional Dharma Wanita dan PKK • Penyusunan database Industri kecil menengah dan besar di Kecamatan • Penyusunan database SOP pelayanan publik kecamatan • Laporan kejadian penanggulangan bencana di Kecamatan
31	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	• Pelaporan Data Intelijen terkait kondusifitas daerah ke Bupati • Fasilitasi penyelesaian konflik

4.2.4 Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2019

Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ditelaah mempertimbangkan isu strategis pembangunan berskala global, regional, nasional, provinsi Jawa Timur, dan lokal dalam lingkup Kabupaten Gresik serta mempertimbangkan permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pembangunan Kabupaten Gresik tahun sebelumnya, maka dirumuskan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019 sebagaimana berikut:

Tabel 4.4
Sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2019
1,1	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	10-20%
1,2	Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran	Persentase Penanganan Bencana	100%
1,3	Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	96%

1,4	Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan local	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%
2,1	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82-86
2,2	Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi	Indeks e-Governement	3.00-3.10
2,3	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Pangripta	A
2,4	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP
2,5	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	A
2,6	Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah	Indeks Profesionalitas ASN	80
3,1	Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	68.23% (Rp39,45T)
3,2	Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	6,5-7,5%
3,3	Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	112,25
3,4	Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	59%
3,5	Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	84,81% Jalan
		Persentase Akses Air Bersih/Minum	100%
		Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%
3,6	Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu	Angka Kecelakaan Angkutan Umum	0,12%
3,7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Air Sungai	60-64.3
		Indeks Kualitas Udara	83-87,5
		Indeks Tutupan Lahan	18,19%
3,8	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.20-4.90%
3,9	Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif	Pertumbuhan Komulatif Usaha Mikro	1,33% (191.035)
		Pertumbuhan Koperasi Sehat	6,91% (325)
3.10	Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/ Komoditi (US \$)	24,74% (1.643.903)
		Pertumbuhan Komulatif IKM	2,84%
			-7236

3,11	Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	4,9-5,4%
3,12	Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	63% (30 ha)
		Persentase Rumah Layak Huni	85,97%
3,13	Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,675
3,14	Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	194 Kg/Kpt/Thn
		Nilai Tukar Petani	109,32
4,1	Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	APM SD dan Sederajat	99,10%
		APM SMP sederajat;	86,99%
		Angka Harapan lama sekolah	9,5
4.2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	72,6
4,3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana	Angka laju pertumbuhan penduduk	0.6-1..4
4,4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63.25-63.75
	Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak nak	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	100%
		Nilai Kabupaten Layak Anak	775-850

4.2.5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Prioritas Pembangunan Tahun 2019 selain memperhatikan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur juga memperhatikan Pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun 2019 serta masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD memuat:

1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan ke dalam urusan SKPD.
2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan.
3. Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan aspek manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
5. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dan/pagu indikatif, catatan penting serta prakiraan maju tahun rencana yang meliputi capaian kerja dan kebutuhan pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matriks rencana program dan kegiatan prioritas seluruh SKPD.

RKPD 2019 Kabupaten Gresik merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan tahun 2017 dan proyeksi evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan untuk dapat memecahkan permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

Rencana penganggaran belanja tahun 2019 dipergunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Adapun rincian Belanja Langsung Prioritas dari masing-masing SKPD sebagaimana pada **Lampiran I**.

Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Provinsi.

Bantuan Keuangan kepada Desa dan Partai Politik serta Belanja Tidak Terduga, Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung pada Lampiran I dan II merupakan Belanja Prioritas, sedangkan Belanja yang belum Prioritas sebagaimana dalam *Lampiran Berita Acara MUSRENBANG KABUPATEN*. Berikut ini disajikan rekapitulasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2019.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019

No		URAIAN 2019	RKPD 2019
Belanja Tidak Langsung			1.803.671.897.903
1		Belanja Pegawai	927.687.108.628
1		Gaji Dan Tunjangan (Accress)	760.215.489.228
1		Tambahan Penghasilan PNS	114.546.250.000
1		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota Dprd Serta Kdh/Wkdh	17.606.350.000
1		Insentif Pemungutan Pajak Daerah (5% Pajak)	28.398.087.200
1		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (5% Retribusi)	6.920.932.200
2		Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	70.638.038.800
2	1	10% Pajak	56.796.174.400
2	2	10% Retribusi	13.841.864.400
3		Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000
4		Belanja Hibah	204.044.786.000,00
4	1	Kelembagaan	6.434.890.000
4	2	Hibah Kepada Organisasi Masyarakat	1.700.000.000
4	3	Lembaga/ Organisasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Bidang Kesra	1.236.000.000
4	4	Hibah kepada Pondok Pesantren	729.000.000
4	5	Hibah kepada Panti Asuhan	20.000.000
4	6	Hibah kepada Madrasah Diniyah	2.140.000.000
4	7	Hibah kepada SD sederajat	7.330.000.000
4	8	Hibah kepada SMP sederajat	3.180.000.000
4	9	Hibah kepada TPQ/ TPA/ RA/ TK/ KB/ PAUD/ RAM/ KOBER/ SLB	13.895.000.000
4	10	Hibah kepada SMA sederajat	180.000.000
4	11	MDA/MDW/MDU	550.000.000
4	12	Hibah kepada Kelompok Usaha Mikro	2.262.500.000
4	13	Hibah kepada Kelompok Nelayan	290.000.000
4	14	Hibah kepada Kelompok Tani/ Ternak	2.645.000.000
4	15	Hibah kepada Kelompok Budidaya Perikanan	575.000.000
4	16	Hibah kepada Kelompok Nelayan	15.000.000
4	17	Sarana Prasarana Kesehatan	300.000.000
4	18	Hibah kepada Masjid	4.845.000.000
4	19	Hibah kepada Musholla	5.145.000.000
4	20	Hibah kepada Tempat Ibadah Lainnya	76.000.000
4	21	Hibah kepada Lembaga Bidang Olahraga	115.000.000

No		URAIAN 2019	RKPD 2019
4	22	Hibah kepada Lembaga Bidang Kesenian	155.000.000
4	23	Belanja Hibah Pendidikan (SD, MI, SMP, MTs, Ponpes, Madin/TPQ, Kober/Paud, Paket ABC)	93.555.510.000,00
4	24	BPPDGS (BK PROV DAN SHARING APBD)	20.010.000.000,00
4	25	Belanja Hibah Operasional Paud (Dak Non Fisik)	36.660.886.000,00
5		Belanja Bantuan Sosial	32.364.700.000,00
5	1	Pemugaran Rumah Keluarga Miskin	13.347.500.000,00
5	2	Beasiswa Siswa Miskin jenjang SMA	111.000.000,00
5	3	Bantuan Kuliah Anak Kurang Mampu	1.182.000.000,00
5	4	Bantuan Kepada Janda Miskin	8.508.600.000,00
5	5	Bantuan Kepada Anak Yatim	2.215.600.000,00
5	6	Bantuan Sosial Kematian	4.000.000.000,00
5	7	Bantuan Sosial Tidak direncanakan	3.000.000.000,00
6		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	567.437.264.474,52
6	1	Pembangunan Jalan / Jembatan / Saluran / TPT Jalan Lingkungan	43.371.187.710
6	2	Pembangunan Pagar / Jalan Makam	4.460.000.000
6	3	Pembangunan Jalan / Jembatan / Saluran / TPT / PJU Jalan Poros Desa	14.835.000.000
6	4	Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Air / Pengolahan / Perpipaan	870.000.000
6	5	Sarana Pengangkut Sampah	130.000.000
6	6	Pembangunan Jalan / Jembatan / Saluran / TPT / PJU Jalan Desa	5.150.000.000
6	7	Pembangunan JUT / TPT	4.955.000.000
6	8	Pembangunan Jaringan Irigasi Perikanan	335.000.000
6	9	Pembangunan TPS / TPST / Bank Sampah	925.000.000
6	10	Pembangunan Pasar Desa / BUMDes	2.299.000.000
6	11	Pembangunan Kantor / Balai Desa	11.085.000.000
6	12	Pembangunan Sarana / Prasarana Pariwisata	890.000.000
6	13	Perbaikan Kantor / Balai Desa	2.385.000.000
6	14	Perbaikan Tambatan Perahu / Dermaga	190.000.000
6	15	Pembangunan JITUT / JIDes	50.000.000
6	16	Pembangunan JIDes / Waduk Desa	350.000.000
6	17	Pembangunan Lapangan / GOR	1.145.000.000

No		URAIAN 2019	RKPD 2019
6	18	Pembangunan TPS / TPST / Bank Sampah	50.000.000
6	19	Pembangunan Ponkesdes	830.000.000
6	20	Waduk	-
6	21	Dana Desa	330.207.154.364,52
6	22	ADD (10 % x (Dn Perimbangan - DAK))	120.123.619.400,00
6	23	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.001.303.000,00
6	24	Bantuan Khusus Pilkades Per Desa @Rp.80.000.000 x 260 Ds	20.800.000.000,00
6	25	Pengamanan Pilkades	1.000.000.000,00

Tabel 5.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2019

No	Uraian/OPD	Pagu Anggaran
	Belanja Langsung	1.624.645.426.751,00
1	Dinas Pendidikan	212.515.873.411,00
2	Dinas Kesehatan	191.673.981.150,00
3	RSUD Ibnu Sina	209.564.048.399,00
4	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	501.913.264.100,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	38.592.670.050,00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	10.900.000.200,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.757.671.900,00
8	Dinas Sosial	6.864.330.200,00
9	Dinas Tenaga Kerja	5.707.302.700,00
10	Dinas Pertanahan	56.130.825.500,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	23.000.000.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10.620.836.200,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	5.718.363.000,00
14	Dinas KB PP & PA	9.876.753.050,00
15	Dinas Perhubungan	14.518.845.650,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.148.149.900,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perindustrian Dan Perdagangan	6.677.050.000,00
18	Dinas Penanaman Modal & PTSP	6.066.207.000,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	15.845.008.000,00
20	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	4.926.089.445,00
21	Dinas Perikanan	6.785.467.000,00
22	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	15.354.579.800,00
23	Dinas Pertanian	15.264.065.000,00
24	Inspektorat	15.030.765.800,00
25	Bappeda	14.051.289.800,00
26	BPPKAD	26.765.867.600,00
27	Badan Kepegawaian daerah	20.000.000.000,00

No	Uraian/OPD	Pagu Anggaran
28	Bagian Pemerintahan Umum	3.393.664.800,00
29	Bagian Hukum	2.340.814.300,00
30	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.059.817.270,00
31	Bagian Humas	4.418.792.400,00
32	Bagian Pembangunan	2.215.300.000,00
33	Bagian Perekonomian Dan Sda	1.766.072.000,00
34	Bagian Organisasi Dan Tata Laksana	1.916.305.200,00
35	Bagian Umum	69.376.545.760,00
36	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1.129.637.000,00
37	Bagian Keuangan	3.258.688.000,00
38	Sekretariat DPRD	50.951.877.600,00
39	Kecamatan Gresik	4.711.176.000,00
40	Kecamatan Kebomas	3.204.228.286,00
41	Kecamatan Manyar	800.000.000,00
42	Kecamatan Cerme	800.000.000,00
43	Kecamatan Balongpanggang	800.000.000,00
44	Kecamatan Benjeng	800.000.000,00
45	Kecamatan Duduk Sampean	800.000.000,00
46	Kecamatan Driyorejo	800.000.000,00
47	Kecamatan Kedamean	800.000.000,00
48	Kecamatan Sidayu	800.000.000,00
49	Kecamatan Ujungpangkah	800.000.000,00
50	Kecamatan Panceng	800.000.000,00
51	Kecamatan Bungah	800.000.000,00
52	Kecamatan Dukun	800.000.000,00
53	Kecamatan Wringinanom	800.000.000,00
54	Kecamatan Menganti	800.000.000,00
55	Kecamatan Tambak	825.000.000,00
56	Kecamatan Sangkapura	825.000.000,00
57	Kantor Kesbangpol	2.783.203.280,00

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 sebagai perencanaan tahunan strategis merumuskan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun keempat atas pencapaian RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021.

Dalam konteks pencapaian program maka indikator kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara *lagging indicators* dan *leading indicators*. **Lagging indicators** adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun **leading indicators** adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah hasil (*outcome measures*) bagi indikator kinerja dari perspektif-perspektif yang ada dibawahnya (*performance drivers*).

Adapun ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2016 2021 ditetapkan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Daerah sebagaimana berikut:

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama

NO	Kinerja Utama	IKU	2017	Target	
				2018	2019
1	Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik.	Nilai Peduli HAM	89	>75	>75
2	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (71,09)	>70-80 BB	>70-80 BB
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	5.83	>6.0-6.35	>6.1-6.45
		Laju Inflasi	2,83%	3-4%	3-4%
4	Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,36	61.5-68.2	66.5-70.4
5	Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Tingkat Kemiskinan	12,80	12.75 - 11.75%	12.25 - 11.25%
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	74,46	76-77	77-78
7	Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	89,31	89.6-90.2	89.9-90.5

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			2018	2019
1,1	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	10-20%	10-20%
1,2	Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran	Persentase Penanganan Bencana	100%	100%
1,3	Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	94%	96%
1,4	Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan local	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%
2,1	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80-84	82-86
2,2	Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi	Indeks e-Governement	2.95-3.05	3.00-3.10
2,3	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Pangripta	B	A
2,4	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP
2,5	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	BB	A
2,6	Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah	Indeks Profesionalitas ASN	77	80
3,1	Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	51,17% (Rp35,45T)	68.23% (Rp39,45T)
3,2	Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	6,0-7,0%	6,5-7,5%
3,3	Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	112,00	112,25
3,4	Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	57%	59%
3,5	Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	83,31 % Jalan	84,81% Jalan
		Persentase Akses Air Bersih/Minum	85.95%	100%
		Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			2018	2019
3,6	Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu	Angka Kecelakaan Angkutan Umum	0,13%	0,12%
3,7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Air Sungai	55.75-60	60-64.3
		Indeks Kualitas Udara	79-83	83-87,5
		Indeks Tutupan Lahan	18,19%	18,19%
3,8	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.35-5.05%	5.20-4.90%
3,9	Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif	Pertumbuhan Komulatif Usaha Mikro	0.14 (230 usaha mikro)	1,33% (191.035)
		Pertumbuhan Koperasi Sehat	5.26% (320)	6,91% (325)
3,10	Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/ Komoditi (US \$)	13.4% (1.494.457,28)	24,74% (1.643.903)
		Pertumbuhan Komulatif IKM	13.4% (1.494.457,28)	2,84% -7236
3,11	Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	4,7-5,2%	4,9-5,4%
3,12	Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	79% (15 ha)	63% (30 ha)
		Persentase Rumah Layak Huni	85,86%	85,97%
3,13	Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,6250	0,675
3,14	Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	194 Kg/ Kpt/ Thn	194 Kg/ Kpt/ Thn
		Nilai Tukar Petani	109,12	109,32
4,1	Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	APM SD dan Sederajat	99.02%	99,10%
		APM SMP sederajat;	86.83%	86,99%
		Angka Harapan lama sekolah	9,4	9,5
4.2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	72,4	72,6
4,3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana	Angka laju pertumbuhan penduduk	0.6-1..4	0.6-1..4

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			2018	2019
4,4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63.00-63.50	63.25-63.75
	Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak nak	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	100%	100%
		Nilai Kabupaten Layak Anak	700-775	775-850

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 adalah dokumen yang ditujukan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan pembangunan. RKPD tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2016-2021.

Melalui tema "Gresik, Teater Pembangunan Infrastruktur dan Investasi menuju Ekologi yang Berkelanjutan" diharapkan mampu memberikan daya ungkit yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

RKPD tahun 2019 menetapkan 5 Prioritas Nasional (PN), yaitu: (1)Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; (2)Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; (3)Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif; (4)Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan; dan (5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. Kelima prioritas tersebut dijabarkan dengan menggunakan pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan RKPD tahun 2019, dilakukan melalui berbagai forum koordinasi dan konsultasi dengan melibatkan pelaku pembangunan atau stakeholder melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD hingga Musrenbang Kabupaten yang berfungsi sebagai forum untuk menjaring aspirasi, penyelarasan, dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, guna menghasilkan rencana kerja yang baik. Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2019 juga telah mengikuti kaidah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat kabupaten, pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa. Adapun Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 menjadi landasan bagi masing-masing SKPD untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2019 menjadi Rencana Kerja SKPD Tahun 2019.
2. Dalam rangka konsistensi dan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran daerah maka RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.
3. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah di tingkat desa, maka RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 menjadi landasan bagi Pemerintahan Desa untuk menyusun atau review RPJM Desa dan RKPDesa Tahun 2019.
4. Pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dengan sumber pendanaan meliputi APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten, partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
5. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang pada Rencana RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 memiliki akses secara terbuka dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik berkewajiban untuk melakukan pengendalian perumusan

kebijakan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019, Pengendalian pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 dan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017.

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T.,M.Si.